

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun Anggaran 2025



BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja juga merupakan alat pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa kinerja, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja BBSPJPPI.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program kegiatan kedepannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas capaian kinerja BBSPJPPI.

Semarang, Januari 2026

Kepala BBSPJPPI,

Sofyari Rahman

#

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) merupakan satker di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang memiliki kompetensi di bidang penanganan pencemaran industri. Dengan dukungan sarana prasarana berikut kompetensi SDM yang dimiliki, BBSPJPPI berkontribusi dalam pemberian layanan jasa teknis di bidang standardisasi dan penanganan permasalahan industri di bidang lingkungan. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010 telah ditetapkan menjadi satker yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah pembinaan teknis Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri.

Dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Perindustrian dan BSKJI, BBSPJPPI memiliki 1 (satu) Tujuan, 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPPI Tahun 2025. Dimana target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja secara keseluruhan mayoritas dapat tercapai. Akan tetapi, terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai yaitu pada indikator nilai minimal IKPA dimana kendala pencapaian disebabkan nilai pada aspek belanja kontraktual yang kurang maksimal dikarenakan terdapat pendaftaran kontrak yang bersumber anggaran Rupiah Murni *non inaproc* yang dilakukan pada saat mendekati akhir tahun.

Berkaitan dengan dukungan anggaran, pada 2025 BBSPJPPI memperoleh alokasi anggaran awal sebesar Rp. 36.159.131.000,- yang dalam pelaksanaannya mengalami 15 (lima belas) kali proses revisi anggaran. Berdasarkan pengesahan DIPA revisi terakhir, anggaran BBSPJPPI berubah menjadi Rp. 40.465.963.000, dengan pagu blokir sebesar Rp. 4.942.674.000,- sehingga pagu efektif sebesar Rp. 35.523.289.000,-. Dari pagu efektif tersebut, anggaran terbagi atas Rupiah Murni sebesar Rp. 17.430.943.000, - dan PNPB tahun berjalan sebesar Rp. 18.092.346.000,-. Adapun capaian realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp 35.173.183.417,- atau sebesar 99,01% dengan komposisi

penyerapan sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp17.335.122.831 atau 99,45% dan sumber anggaran PNBPN tahun berjalan sebesar Rp. Rp17.838.060.586 atau 98,59%. Capaian penyerapan anggaran tersebut belum tercapai apabila dibandingkan dengan usulan realisasi anggaran satker BBSPJPPI yang disampaikan kepada BSKJI. Dari sisi capaian keluaran output kegiatan, sebagian besar target dalam DIPA melampaui target yang ditetapkan. Tetapi terdapat target pada KRO sarana bidang industri dan perdagangan serta layanan sarana dan prasarana yang tidak tercapai karena terkena blokir anggaran pada belanja modal.

Sementara capaian target kinerja jasa layanan satker BBSPJPPI sampai dengan akhir 2025 tercapai dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 20.483.355.953,- atau 109,62% dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 18.686.000.000,-. Realisasi tersebut berdasarkan pelaksanaan pemberian jasa layanan teknis kepada 1.063 pelanggan yang terdiri 881 pelanggan sektor industri dan 182 pelanggan non industri. Komposisi penerimaan PNBP utamanya masih ditopang dari layanan jasa pengujian yang berkontribusi sebesar 67,19% dan layanan sertifikasi 12,23% dari total penerimaan.

Upaya kedepannya untuk mengoptimalkan upaya penerimaan PNBP akan dilakukan melalui peningkatan promosi dan pengembangan kapasitas jasa layanan (pengembangan lingkup layanan baru diantaranya layanan verifikasi GRK, dan pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) serta menginisiasi peluang sumber penerimaan baru dengan mendorong komersialisasi produk inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI (teknologi AiMS). Untuk mendorong capaian realisasi penerimaan PNBP tahun berjalan juga akan dilakukan dengan melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan, kedepannya akan dilakukan koordinasi intensif antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang dapat memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan ke pelanggan.

Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, penyusunan rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran akan dilakukan lebih cermat serta dilakukan monitoring secara berkala. Pada periode Triwulan

akhir akan dilakukan identifikasi atas potensi anggaran yang tidak terserap untuk selanjutnya dapat dilakukan realokasi anggaran dalam rangka mendukung optimasi kinerja penyerapan anggaran.

Semarang, Januari 2026

Kepala BBSPJPI,

#

Sofyari Rahman

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Ikhtisar Eksekutif | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Bab I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi | 1 |
| 1.2. Peran Strategis Organisasi | 2 |
| 1.3. Struktur Organisasi | 9 |
| Bab II. PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA | 13 |
| 2.1. Rencana Strategis Organisasi | 13 |
| 2.2. Rencana Kinerja | 19 |
| 2.3. Rencana Anggaran | 22 |
| 2.4. Dokumen Penetapan Kinerja | 31 |
| Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA | 35 |
| 3.1. Analisis Capaian Kinerja | 35 |
| 3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2025 | 36 |
| 3.1.2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2025–2029) | 109 |
| 3.2. Akuntabilitas Keuangan | 115 |
| 3.2.1. Realisasi Anggaran Keuangan | 115 |
| 3.2.2. Realisasi Anggaran Keuangan PNBP/BLU | 132 |
| 3.3. Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum | 143 |
| 3.4. Penghargaan yang diperoleh Satker..... | 151 |
| Bab IV. Penutup | 153 |
| 4.1. Kesimpulan | 153 |
| 4.2. Permasalahan dan Kendala..... | 154 |
| 4.3. Saran dan Rekomendasi | 157 |

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Pengukuran Perjanjian Kinerja TA 2025
3. Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2025
4. Realisasi Renstra Satker/ Unit Kerja (2025-2029)
5. Pernyataan/Berita Acara Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri.
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri.
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri.
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diwujudkan melalui pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, maju serta berorientasi pada industri hijau. Dalam rangka membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJP Nasional Tahun 2005-2025) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN Tahun 2015-2035), khususnya tahap III yang dimulai pada 2025. Visi RIPIN tahap III (2025-2035) difokuskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri Tangguh yang ditandai dengan struktur industri nasional yang kuat dan mendalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

RPJPN Tahap I 2025-2029 berfokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas produksi untuk memperbesar kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional. Dalam periode ini, industri berbasis sumber daya alam seperti kelapa sawit, kelapa, dan mineral strategis seperti nikel dan tembaga menjadi prioritas pengembangan. Pemerintah mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, sekaligus memperkuat rantai pasok nasional. Pengembangan Industri mineral penting, khususnya nikel, diarahkan untuk mendukung transisi energi melalui pengembangan baterai kendaraan listrik (EV).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar di bawah koordinasi BSKJI, BBSPJPI berperan dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan di tingkat Kementerian

Perindustrian dan BSKJI selaku pembina teknis dapat diimplementasikan secara efektif guna mendukung pemerataan pembangunan industri. Peran tersebut diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan dan penerapan teknologi industri, serta penyediaan layanan jasa teknis kepada masyarakat industri, khususnya dalam penerapan standardisasi industri dan layanan di bidang pengendalian, penanganan, serta pemantauan kualitas lingkungan industri yang mendukung pembangunan industri hijau. Dalam perumusannya, arah kebijakan BBSPJPPI diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri nasional.

Ke depan, peran BBSPJPPI akan semakin krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri nasional. Meningkatnya perhatian masyarakat global dan nasional terhadap isu lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi sektor industri. Oleh karena itu, strategi pembangunan industri di masa mendatang diarahkan pada pengembangan industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga tercipta keselarasan antara pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi:

- i. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk
- ii. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
 - Kalibrasi Instrument

- Kalibrasi Lingkungan
- iii. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Sistem Mutu
 - Sertifikasi Industri Hijau
- iv. Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- v. Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri;
 - Konsultasi Keteknikan
 - Rancang Bangun dan Rekayasa
- vi. Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Industri
 - Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
- vii. Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal
- viii. Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Untuk mendukung pemberian layanan jasa teknis, sarana berupa Lembaga Penilaian Kesesuaian yang dimiliki dan dikelola BBSPJPPI antara lain:

1. Sarana Laboratorium Uji

Sarana laboratorium uji yang dimiliki BBSPJPPI meliputi:

a) Laboratorium uji limbah dan lingkungan, terdiri dari:

- Laboratorium Uji Air dan Air Limbah
- Laboratorium Uji Udara, Kebisingan dan Getaran
- Laboratorium Uji Limbah Padat dan B3
- Laboratorium Uji Mikrobiologi dan Biologi Lingkungan

Laboratorium uji limbah dan lingkungan yang dimiliki oleh BBSPJPPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LP-084-IDN) dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mampu melakukan pengujian parameter lingkungan diantaranya:

1. Emisi, udara ambien dan ruang kerja.
2. Kebisingan, getaran, kebauan.
3. Air limbah dan air permukaan.
4. Limbah padat, limbah B3 dan Ld 50.
5. Biota air, flora dan fauna

b) Laboratorium pengujian mutu produk, terdiri dari:

- Laboratorium Uji Aneka Produk
- Laboratorium Uji Aneka Komoditi
- Laboratorium Uji Mikrobiologi

Laboratorium pengujian yang dimiliki oleh BBSPJPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025 (LP-084-IDN) yang mampu melakukan pengujian kualitas produk industri, meliputi:

1. Garam.
2. Air minum dalam kemasan.
3. Rokok, pupuk, tepung terigu.
4. Mie, kecap, sirup, saos, madu, minyak goreng, biskuit, kopi instan.
5. Produk kimia

c) Laboratorium kalibrasi, dengan ruang lingkup meliputi:

- Kalibrasi Suhu dan Kelembaban: oven, inkubator, waterbath, refrigerator, termometer gelas, termometer digital, dan termohigrometer.
- Kalibrasi massa : timbangan elektronik, timbangan mekanik.
- Kalibrasi volume: pipet volume, labu ukur, pipet ukur, gelas ukur
- Kalibrasi instrumen analitik: spektrofotometer, autoclave, gas analyzer

Laboratorium kalibrasi BBSPJPI telah terakreditasi KAN sesuai SNI ISO 17025(LK 075-IDN).

Pada tahun 2025, BBSPJPPI juga telah mengembangkan lingkup layanan kalibrasi yang mendukung pada penjaminan mutu hasil pengukuran emisi menggunakan sistem pemantauan emisi terus menerus (CEMS) diantaranya melalui pemberian layanan audit CEMS (uji RATA, CGA dan RCA).

2. Lembaga Sertifikasi

Dalam mendukung kebijakan standarisasi dan penerapan standar mutu produk, BBSPJPPI memiliki dan mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meliputi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LS-SMM), Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dengan lingkup layanan sebagai berikut:

1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu BBSPJPPI - BISQA yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan telah di akreditasi oleh KAN (LSSM-007-IDN), sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001. Dengan ruang lingkup yang terakreditasi sebanyak 9 (sembilan) ruang lingkup meliputi produk pertanian, kehutanan dan perikanan; makanan, minuman dan tembakau; tekstil dan produk tekstil; kayu dan produk kayu; bahan kimia, produk kimia dan serat; obat- obatan; produk karet dan produk plastik; konstruksi;pabrik lainnya yang tidak diklasifikasikan.
2. Lembaga Sertifikasi Produk BBSPJPPI – LS Pro yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17065 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSPR-016-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). Dengan ruang lingkup yang terakreditasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) ruang lingkup meliputi berbagai produk makanan dan minuman, pupuk, furnitur dan produk kimia.

Sementara dalam mendukung kebijakan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen lingkungan dan kebijakan industri hijau, BBSPJPPI memiliki dan mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang meliputi Lembaga

Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LS-SML) dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dengan lingkup layanan sebagai berikut:

1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BBSPJPPI - BRISEMA yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17021 dan telah diakreditasi oleh KAN (LSSML-024-IDN) sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh sertifikasi lingkungan ISO 14001. Dengan jumlah ruang lingkup yang terakreditasi 4(empat) ruang lingkup meliputi Tekstil dan Produk Tekstil, Kayu dan produk kayu, Bahan kimia, produk kimia, dan serat, Karet dan produk plastik.
2. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang dikelola sesuai dengan ISO/IEC 17065 dan telah ditunjuk oleh Menteri Perindustrian sehingga dapat melayani masyarakat industri untuk memperoleh Sertifikat Industri Hijau. Adapun ruang lingkup LSIH BBSPJPPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 3065 tahun 2024 sebanyak 26 (dua puluh enam) ruang lingkup meliputi kelompok industri Ubin Keramik; Semen Portland; Tekstil Penyempurnaan Kain Dan Industri Tekstil Pencetakan Kain; Bubur Kertas dan Bubur Kertas Terintegrasi Kertas; Karet Remah; Pengasapan karet dalam bentuk RSS; Susu Bubuk; Ammonia dan industri Pupuk Urea, SP-36 dan ZA; Minyak Goreng dari Kelapa Sawit; Batik; Gula Kristal Putih; Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya; Pengolahan Kopi Instan; Air Mineral; Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat; Tepung Terigu; Monosodium Glutamat; Bumbu Kaldu; Tepung Bumbu; Bumbu Siap Saji; Saus Bumbu; Saus Cabai; Saus Tomat; Mayones.

Disisi lain untuk mendukung kebijakan pengembangan industri halal, BBSPJPPI sejak tahun 2023 telah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal yang telah terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, BBSPJPPI memiliki kualifikasi LPH Pratama kategori 2 dengan ruang pemeriksaan dan/atau pengujian lingkup makanan dan minuman.

3. Lembaga Verifikasi Industri

BBSPJPPI selaku unit verifikator di bawah BSKJI juga telah ditunjuk untuk melakukan pemberian layanan penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN

4. Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi

Uji Profisiensi (PUP) BBSPJPPI (PUP-052-IDN) telah mendapatkan akreditasi KAN sebagai bukti pemenuhan kompetensi dan persyaratan atas sistem mutu ISO 17043:2023 terkait penyelenggaraan uji profisiensi untuk lingkup pengujian air limbah (parameter COD, Daya Hantar Listrik, Warna, Cu total, Cd total, Cr total, Fe terlarut, Mn terlarut, Nitrat, Nitrit, Ammonia, pH, Crom Hexavalent, dan Padatan Terlarut Total).

5. Teknologi Informasi dan Modernisasi BLU.

Saat ini sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan adalah Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDII) BBSPJPPI dengan fokus pengembangan dengan mengintegrasikan seluruh proses layanan jasa teknis pada sistem SINDII, penggunaan digital signature untuk pengesahan dokumen/sertifikat layanan, integrasi digital marketing dan digitalisasi laboratorium serta konektivitas pemantauan lingkungan secara online terintegrasi SINDII.

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

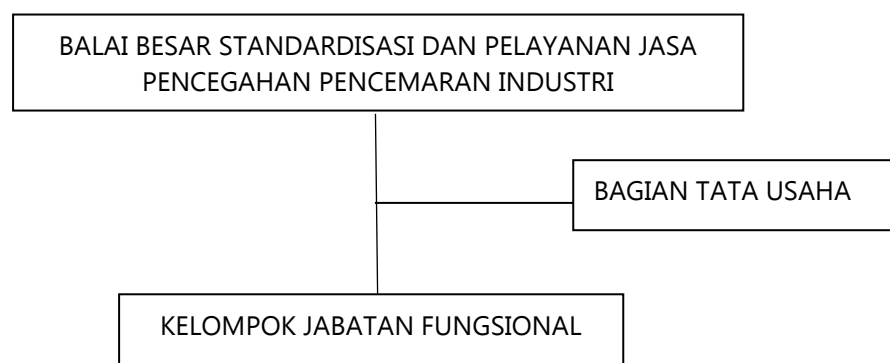
1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II , Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut dibentuk Tim Kerja pada UPT BBSPJPPI dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Bagian Tata Usaha
- 2) Tim Kerja Sertifikasi, Standardisasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri;
- 3) Tim Kerja Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi;
- 4) Tim Kerja Pengujian Lingkungan dan Aneka Komoditi
- 5) Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri.
- 6) Tim Kerja Kalibrasi Lingkungan dan Instrumen.

Data Jabatan ASN BBSPJPPI Tahun 2025 :

Berdasarkan data kepegawaian terakhir sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah pegawai PNS & PPPK di lingkungan satker BBSPJPPI sebanyak 131 personil.

A. Komposisi personil ASN BBSPJPPI jika dirinci menurut jabatannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) Jabatan struktural | : 1 personil |
| 2) Fungsional Pembina Industri | : 25 personil |
| 3) Fungsional Perekayasa | : 1 personil |
| 4) Fungsional Litkayasa | : 7 personil |
| 5) Fungsional Pustakawan | : 1 personil |
| 6) Fungsional AMMI | : 11 personil |
| 7) Fungsional Pengujian Mutu Barang | : 44 personil |
| 8) Fungsional Arsiparis | : 6 personil |
| 9) Fungsional Pranata Humas | : 6 personil |
| 10) Fungsional Analis Anggaran | : 1 personil |
| 11) Fungsional Analis Kepegawaian | : 4 personil |
| 12) Fungsional Analis Pengelola APBN | : 1 personil |

- 13) Fungsional Pranata Kepegawaian : 2 personil
14) Fungsional PLB : 2 personil
15) Fungsional Pranata Komputer : 4 personil
16) Fungsional Pranata Keuangan : 2 personil
17) Fungsional Perencana : 2 personil
18) Fungsional Umum : 11 personil
- B. Adapun komposisi ASN BBSPJPI berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

| Data Golongan dan Ruang ASN | Jumlah |
|------------------------------------|---------------|
| II/a | 3 |
| II/b | 1 |
| II/c | 10 |
| II/d | 17 |
| III/a | 13 |
| III/b | 21 |
| III/c | 12 |
| III/d | 26 |
| IV/a | 7 |
| IV/b | 2 |
| IV/c | 1 |
| V | 4 |
| VII | 3 |
| IX | 11 |

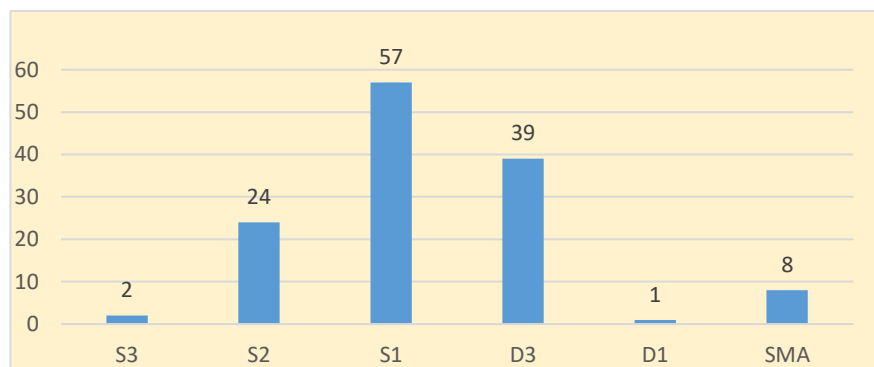


Grafik 1. Komposisi Pegawai ASN BBSPJPI Berdasarkan Golongan

C. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. Komposisi Pegawai ASN BBSPJPI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|------------|----------------|
| SMA | 8 |
| D1 | 1 |
| D3 | 39 |
| S1 | 57 |
| S2 | 24 |
| S3 | 2 |



Grafik 2. Komposisi Pegawai ASN BBSPJPI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2025-2029, Visi BBSPJPPI adalah ***“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju dan berkelanjutan”***. Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi ***“Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau”***. Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan mendukung misi BSKJI pada ciri ke 6 (Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing) dan ke 7 (Pelaksanaan tata Kelola yang baik/gppd governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien) yaitu berkontribusi dalam mendukung pelayanan pembangunan industri yang berdaya

saing serta pelaksanaan tata kelola yang baik/ *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sector industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan pada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

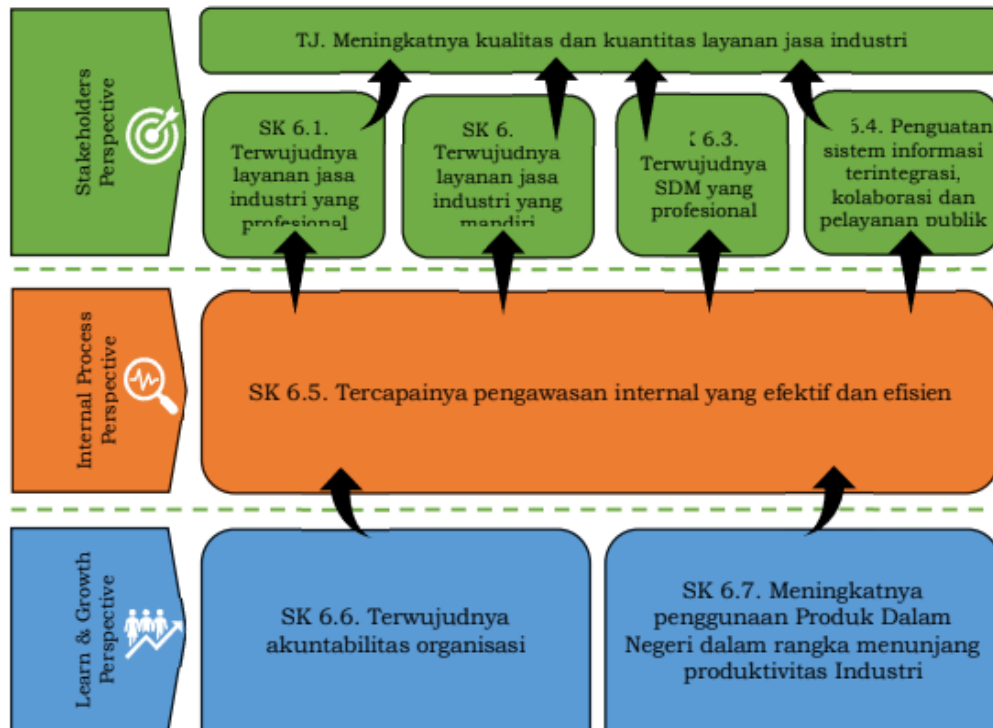
Misi yang diemban BBSPJPPI dijalankan dalam mendukung pencapaian tujuan BBSPJPPI kedepannya yang juga selaras dengan pencapaian tujuan BSKJI yaitu meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri. Dari tujuan tersebut, BBSPJPPI menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029 meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.

Dalam pengembangan sasaran strategis BBSPJPPI perlu mengakomodir Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tiga aspek penting yang mencakup Perspektif Pemangku kepentingan (*Stakeholders*), Perspektif Proses Internal (*Internal Process*) serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi (*Learn & Growth*).

Sasaran kegiatan BBSPJPPI 2025-2029 ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai, serta langkah konkret yang diambil oleh BBSPJPPI untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BBSPJPPI menggunakan pendekatan analisis SWOT guna mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi. Analisis ini didasarkan pada peta strategis yang telah ditetapkan baik di tingkat Kementerian maupun Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dilakukan karena BBSPJPPI bukan sebagai *Strategic Business Unit* yang mampu berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPPI adalah turunan dari Kementerian Perindustrian

dan BSKJI, dengan mempertimbangkan indikator tambahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi BBSPJPI, sehingga diharapkan dapat terpenuhi dengan optimal.



Gambar 2. Peta strategis BBSPJPI 2025-2029

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

A. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *stakeholders* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Sasaran ini diwujudkan melalui SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3 dan SK 6.4 yang menjadi ujung tombak BBSPJPI dalam mencapai tujuan (TJ) dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan yang relevan dan tepat sasaran. Perspektif *stakeholders* juga memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, dengan penjelasan lebih detailnya sebagai berikut:

- 1) TJ Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri. TJ ini dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
 - b. Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri.
- 2) SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA).
 - b. Nilai *Net Promoter Score* (NPS).
- 3) SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja kegiatan :
 - a. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Jumlah hasil layanan jasa industri.
 - c. Nilai *Revenue on Asset* (RoA).
 - d. Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO).
- 4) SK 6.3 Terwujudnya SDM yang profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN.
- 5) SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja kegiatan:
 - a. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI.
 - b. Tingkat Penerapan SPBE.
 - c. Indeks Pelayanan Publik (IPP).

B. Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif *internal process* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses

internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif *stakeholders*, yakni:

1. SK 6.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja:
 - a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
 - b. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).

C. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI. yaitu:

1. SK 6.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - a. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker.
 - b. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
 - c. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan.
2. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SK 6.7 memiliki indikator kinerja:
 - a. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.

Keberhasilan pencapaian tujuan strategis BBSPJPPI secara kuantitatif dapat ditunjukkan dengan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan visi, misi dan tujuan strategis BBSPJPPI, maka sasaran strategis yang akan dicapai BBSPJPPI dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target Kinerja BBSPJPI 2025-2029

| SK/ IKK | Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan | Satuan | Baseline (2024) | Target | | | | |
|--------------|--|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TJ | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | | | | | | | |
| ITJ 6.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.69 | 3.69 | 3.70 |
| ITJ 6.2 | Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri | Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi | 960 | 960 | 990 | 1.020 | 1.060 | 1.080 |
| SK 6.1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | | | | | | | |
| IKK 6.1.1 | Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) | Persen | 91.17 | 88.00 | 88.50 | 89.00 | 89.50 | 90.00 |
| IKK 6.1.2 | Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS) | Nilai | 36 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| SK 6.2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | | | | | | | |
| IKK 6.2.1 | Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/ PNBP (Rp.) | Rupiah | 15,5M | 18,68M | 21,35M | 22,67M | 23,56M | 24,99M |
| | Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak/ PNBP (Indeks) | Indeks | 15,5M | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| IKK 6.2.2 | Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri | Hasil Layanan | 9,169 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 8,700 | 9,000 |
| IKK 6.2.3 | Nilai <i>Revenue on Assets</i> (RoA) | Persen | 14.11 | 14.50 | 14.60 | 14.70 | 14.75 | 14.80 |
| IKK 6.2.4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | Persen | 58.68 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 |
| SK 6.3 | Terwujudnya SDM yang profesional | | | | | | | |
| IKK 6.3.1 | Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 78.01 | 81.30 | 81.40 | 81.50 | 81.60 | 81.70 |
| SK 6.4 | Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik | | | | | | | |
| IKK 6.4.1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | Persen | 0 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100 |
| IKK 6.4.2 | Tingkat Penerapan SPBE | Persen | 0 | 77.00 | 78.00 | 80.00 | 83.00 | 85.00 |
| IKK 6.4.3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 4.86 | 4.62 | 4.64 | 4.66 | 4.68 | 4.70 |
| SK 6.5 | Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien | | | | | | | |
| IKK 6.5.1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker | Persen | - | 60.00 | 62.00 | 65.00 | 67.00 | 70.00 |
| IKK 6.5.2 | Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan | Nilai | 90.45 | 70.10 | 73.00 | 76.00 | 79.00 | 82.00 |
| SK 6.6 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | | | | | | | |
| IKK 6.6.1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | Nilai | 81.95 | 79.45 | 79.45 | 79.70 | 79.70 | 80.00 |
| IKK 6.6.2 | Nilai minimal IKPA | Nilai | 91.89 | 93.40 | 93.40 | 94.00 | 94.00 | 94.50 |
| IKK 6.6.3 | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | Nilai | - | 75.00 | 75.25 | 75.50 | 75.75 | 76.00 |
| SK 6.7 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri | | | | | | | |
| IKK 6.7.1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah | Persen | 37.50 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 82.00 | 82.00 |

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja BBSPJPPI 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BBSPJPPI yang merupakan perencanaan jangka menengah. Di dalam Renkin ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Oleh karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di BBSPJPPI pada Tahun Anggaran 2025 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra BBSPJPPI 2025-2029. Pelaksanaan kinerja pada setiap tahun anggaran akan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan utama Renstra dan visi organisasi dapat diraih.

Rencana program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 disebut sebagai Rencana Kinerja (Renkin BBSPJPPI) Tahun 2025. Dalam rangka penguatan akuntabilitas untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian maka rencana kinerja BBSPJPPI 2025 telah disesuaikan dengan rencana kinerja Pemerintah, Kementerian Perindustrian dan BSKJI dengan indikator kinerja berorientasi pada hasil/capaian outcome.

Secara rinci, Renkin/RKT BBSPJPPI tahun 2025 disajikan dalam bentuk matriks yang menguraikan sasaran, indikator, rencana tingkat capaian, program, uraian kegiatan, indikator (masukan, keluaran dan hasil), satuan, serta rencana tingkat capaian kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Target Kinerja BBSPJPPI TA 2025

| No. | Sasaran Kegiatan | | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Ket |
|-----|---|----|---|--------|------------------------------|-----|
| 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3,68 | indeks | IKU |
| | | 2. | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang | 960 | Perusahaan Industri / Pelaku | IKU |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Ket | |
|-----|--|-------------------|--|------------------|---------------|---------|
| | | | memanfaatkan layanan jasa industri | Usaha / Instansi | | |
| 2. | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1 | Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | 88 | Persen | Non IKU |
| | | 2 | Nilai Net Promoter Score (NPS) | 40 | Nilai | Non IKU |
| 3. | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. | Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 3 | Persen | Non IKU |
| | | 2. | Jumlah hasil layanan jasa industri | 7.500 | Hasil Layanan | Non IKU |
| | | 3. | Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14,50 | Persen | Non IKU |
| | | 4. | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 59 | Persen | Non IKU |
| 4. | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81,30 | Indeks | Non IKU |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik | 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 | Persen | Non IKU |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Ket | |
|-----|--|-------------------|---|--------|--------|---------|
| | | 2 | Tingkat Penerapan (SPBE) | 77 | Persen | Non IKU |
| | | 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,62 | Indeks | Non IKU |
| 6. | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 60 | Persen | Non IKU |
| | | 2. | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 70.10 | Nilai | Non IKU |
| 7. | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 79,45 | Nilai | Non IKU |
| | | 2. | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | 93.40 | Nilai | Non IKU |
| | | 3. | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | 75.00 | Nilai | Non IKU |
| 8 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam | 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang | 81 | Persen | Non IKU |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Ket |
|-----|---|--------------------------|--------|--------|-----|
| | rangka menunjang produktivitas Industri | dam/atau jasa pemerintah | | | |

2.3 RENCANA ANGGARAN

Pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2025 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 36.159.131.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 pada 17 Januari 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- b. Revisi ke-2 pada 21 Februari 2025, revisi dalam rangka efisiensi anggaran BBSPJPPI Tahun 2025. Nilai efisiensi belanja BBSPJPPI TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam

nota dinas BSKJI sebesar Rp 6.589.339.000 yang terdiri dari efisiensi belanja sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 1.917.839.000 dan Sumber PNBP/BLU sebesar Rp 4.617.500.000. Pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 sebesar Rp 29.569.792.000. Revisi ini tanpa merubah pagu.

- c. Revisi ke-3 pada 3 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi rekomposisi revisi efisiensi anggaran. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan
- d. Revisi ke-4 pada 11 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi pencantuman saldo awal.

Besaran saldo awal BLU BBSPJPPI TA 2025 sebesar Rp. 2.937.097.225,- sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Semarang I Nomor KET-3/KPN. 1401/2025 tanggal 10 Februari 2025.

Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.

- e. Revisi ke-5 pada 17 April 2025, dengan pertimbangan revisi adalah pemutakhiran RPD Hal III DIPA.

Untuk mendukung pencapaian kinerja IKPA yang optimal khususnya pada aspek perencanaan, telah dilakukan pengajuan revisi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada satker BBSPJPPI sd Triwulan III 2025.

Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.

- f. Revisi ke-6 pada 27 Mei 2025, dengan pertimbangan revisi adalah relaksasi Blokir Kode A.

Besaran relaksasi blokir kode A sebesar Rp. 175.815.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor). Relaksasi ini menyebabkan nilai efisiensi belanja yang semula Rp. 6.589.339.000,- menjadi sebesar Rp. 6.413.524.000,-, sehingga besaran pagu efektif BBSPJPPI TA 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-

- g. Revisi ke-7 pada 25 Juni 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- h. Revisi ke-8 pada 7 Juli 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran RPD halaman III DIPA Triwulan III tanpa merubah pagu.

- i. Revisi ke-9 pada 22 Agustus 2025, revisi dalam rangka relaksasi blokir anggaran BBSPJPI Tahap II. Dimana BBSPJPI mendapatkan relaksasi blokir kode A tahap II sebesar Rp. 591.306.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan kepada industri dan perjalanan dinas pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Pagu efektif anggaran menjadi Rp.30.336.913.000,-
- j. Revisi ke-10 pada 19 September 2025, revisi dalam rangka penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp.2.788.144.000,-. Revisi menyebabkan penambahan pagu anggaran pada DIPA BBSPJPI menjadi sebesar Rp. 38.947.275.000,- dengan nilai pagu efektif anggaran sebesar Rp. 33.125.057.000,-.
- k. Revisi ke-11 pada 1 Oktober 2025, revisi terkait pemutakhiran KPA dimana mengakomodir potensi pagu minus belanja pegawai tanpa merubah pagu.
- l. Revisi ke-12 pada 3 Oktober 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran RPD hal III DIPA Triwulan IV tanpa merubah pagu anggaran.
- m. Revisi ke-13 pada 10 November 2025, revisi dalam rangka relaksasi blokir anggaran BBSPJPI TA 2025 Tahap III berdasarkan Nota Dinas Kepala BSKJI Nomor 918/BSKJI/PR/X/2025 dimana mendapatkan relaksasi blokir sebesar Rp. 879.544.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 181.148.000,- (untuk listrik) di Program Dukungan Manajemen dan dari BLU sebesar Rp. 698.396.000,- (untuk sewa GCMS) di Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.
Revisi ini turut mengakomodir penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.518.688.000,- yang dipergunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai tahun 2025. Sehingga pagu BBSPJPI mengalami perubahan dari semula Rp. 38.947.275.000,- menjadi Rp. 40.465.963.000,-.
- n. Revisi ke-14 pada 17 November 2025, revisi dalam pergeseran antar KRO dalam satu satker, antar jenis belanja yang mengakibatkan penambahan volume RO secara total tanpa merubah pagu anggaran. Total pagu Rp. 40.465.963.000,- dengan nilai pagu efektif anggaran sebesar Rp. 35.523.289.000,-.
- o. Revisi ke-15 pada 12 Desember 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran POK Kewenangan KPA tanpa merubah pagu anggaran.

Tabel 5. Pagu Anggaran Program BBSPJPPI TA 2025

| Program / Kegiatan / KRO | Pagu Anggaran 2025 | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| Anggaran BBSPJPPI | 36.159.131.000 | 36.159.131.000 | 38.947.275.000 | 40.465.963.000 |
| Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri | 12.659.906.000 | 12.659.906.000 | 15.448.050.000 | 15.448.050.000 |
| 1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | 12.659.906.000 | 12.659.906.000 | 15.448.050.000 | 15.448.050.000 |
| KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi | 557.212.000 | 557.212.000 | 557.212.000 | 662.447.000 |
| KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri | 8.755.599.000 | 8.755.599.000 | 11.543.743.000 | 11.171.188.000 |
| KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | 3.347.095.000 | 3.347.095.000 | 3.347.095.000 | 3.614.415.000 |
| Program Dukungan Manajemen | 23.499.225.000 | 23.499.225.000 | 23.499.225.000 | 25.017.913.000 |
| 2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri | 23.499.225.000 | 23.499.225.000 | 23.499.225.000 | 25.017.913.000 |
| KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal | 21.072.144.000 | 21.072.144.000 | 21.072.144.000 | 22.582.166.000 |
| KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1.474.826.000 | 1.474.826.000 | 1.474.826.000 | 1.474.826.000 |
| KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal | 700.524.000 | 700.524.000 | 700.524.000 | 712.284.000 |
| KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal | 251.731.000 | 251.731.000 | 251.731.000 | 248.637.000 |

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai tahun 2025 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 6 berikut :

Tabel 6. Program/Kegiatan BBSPJPPI TA 2025

| Program / Kegiatan / KRO | Pagu Anggaran Triwulan IV | | |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Pagu | Blokir | Efektif |
| Anggaran BBSPJPPI | 40.465.963.000 | 4.942.674.000 | 35.523.289.000 |
| Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri | 15.448.050.000 | 2.035.944.000 | 13.412.106.000 |
| 1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | 15.448.050.000 | 2.035.944.000 | 13.412.106.000 |
| KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi | 662.447.000 | 227.537.000 | 434.910.000 |
| KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri | 11.171.188.000 | 214.882.000 | 10.956.306.000 |
| KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | 3.614.415.000 | 1.593.525.000 | 2.020.890.000 |
| Program Dukungan Manajemen | 25.017.913.000 | 2.906.730.000 | 22.111.183.000 |
| 2.Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri | 25.017.913.000 | 2.906.730.000 | 22.111.183.000 |
| KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal | 22.582.166.000 | 1.290.876.000 | 21.291.290.000 |

| Program / Kegiatan / KRO | Pagu Anggaran Triwulan IV | | |
|---|---------------------------|---------------|-------------|
| | Pagu | Blokir | Efektif |
| KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 1.474.826.000 | 1.273.091.000 | 201.735.000 |
| KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal | 712.284.000 | 294.006.000 | 418.278.000 |
| KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal | 248.637.000 | 48.757.000 | 199.880.000 |

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPI Tahun 2025 sesuai DIPA revisi ke-15 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana Anggaran Tahun 2025

| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | | SD/CP | |
|----------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|
| | | DIPA Pagu Awal | Blokir | Penambahan Alokasi Anggaran | | Efektif |
| EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | 12.659.906.000 | 2.035.944.000 | | 13.412.106.000 | |
| 6077 | Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri | 12.659.906.000 | 2.035.944.000 | | 13.412.106.000 | |
| 6077.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | 557.212.000 | 227.537.000 | | 434.910.000 | |
| 013 | Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri | 557.212.000 | 227.537.000 | | 434.910.000 | |
| 051 | Sosialisasi Layanan Jasa Teknis | 285.484.000 | 114.375.000 | | 186.209.000 | BLU |
| A | Temu Pelanggan | 285.484.000 | 114.375.000 | | 186.209.000 | |
| 052 | Publikasi Layanan Jasa Teknis | 271.728.000 | 113.162.000 | | 248.701.000 | BLU |
| A | Promosi | 228.696.000 | 94.180.000 | | 230.251.000 | |
| B | Pameran | 43.032.000 | 18.982.000 | | 18.450.000 | |
| 6077.BAD | Pelayanan Publik Kepada Industri | 8.755.599.000 | 214.882.000 | | 10.956.306.000 | |
| 002 | Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri | 6.390.307.000 | 129.294.000 | | 8.529.552.000 | |
| 051 | Jasa Pelayanan Teknis Pengujian | 6.200.577.000 | | | 8.524.552.000 | BLU |
| A | Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian | 2,227,752,000 | | | 3.457.319.000 | |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | | SD/CP | |
|--------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| | | DIPA Pagu Awal | Blokir | Penambahan Alokasi Anggaran | | Efektif |
| B | Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran | 3,202,825,000 | | | 4.315.527.000 | |
| C | Layanan Pengujian Aneka Komoditi | 770,000,000 | | | 751.706.000 | |
| 052 | Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian | 189.730.000 | 129.294.000 | | 5.000.000 | BLU |
| 022 | Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri | 524.236.000 | 48.500.000 | | 748.607.000 | |
| 051 | Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi | 462.920.000 | | | 748.607.000 | BLU |
| A | Layanan Kalibrasi | 462.920.000 | | | 748.607.000 | |
| 052 | Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi | 61.316.000 | 48.500.000 | | - | BLU |
| A | Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi | 61.316.000 | | | - | |
| 034 | Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri | 940.140.000 | 37.088.000 | | 653.979.000 | |
| 051 | Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi | 714.700.000 | | | 529.936.000 | BLU |
| A | Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu | 72.600.000 | | | 32.352.000 | |
| B | Layanan Sertifikasi Produk | 508.560.000 | | | 408.592.000 | |
| C | Layanan Sertifikasi Industri Hijau | 38.460.000 | | | 16.165.000 | |
| D | Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan | 14.160.000 | | | 2.220.000 | |
| E | Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal | 37.000.000 | | | 26.687.000 | |
| F | Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri | 43.920.000 | | | 43.920.000 | |
| 052 | Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi | 225.440.000 | 37.088.000 | | 124.043.000 | BLU |
| A | Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi | 225.440.000 | 37.088.000 | | 124.043.000 | |
| 055 | Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri | 217.110.000 | | | 122.632.000 | |
| 051 | Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri | 217.110.000 | | | 122.632.000 | BLU |
| A | Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri | 217.110.000 | | | 122.632.000 | |
| 056 | Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri | 28.668.000 | | | 28.668.000 | |
| 051 | Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri | 28.668.000 | | | 28.668.000 | BLU |
| A | Layanan Verifikasi TKDN | 28.668.000 | | | 28.668.000 | |
| 057 | Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri | 462.382.000 | 464.762.000 | | 841.444.000 | |
| 051 | Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri | 367.080.000 | 464.762.000 | | 748.942.000 | BLU |
| A. | Konsultasi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek | 155.190.000 | | | 97.590.000 | |
| B | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri | 211.890.000 | 464.762.000 | | 651.352.000 | |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | | SD/CP | |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | DIPA Pagu Awal | Blokir | Penambahan Alokasi Anggaran | | Efektif |
| 052 | Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri | 95.302.000 | | | 92.502.000 | BLU |
| A. | Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri | 95.302.000 | | | 92.502.000 | |
| 096 | Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri | 155.668.000 | | | 31.424.000 | |
| 051 | Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi | 112.000.000 | | | 29.924.000 | BLU |
| A. | Penyelenggara Uji Profisiensi | 112.000.000 | | | 29.924.000 | |
| 052 | Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi | 43.668.000 | | | 1.500.000 | BLU |
| A. | Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi | 43.668.000 | | | 1.500.000 | |
| 6077.CAH | Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | 3.347.095.000 | 1.593.525.000 | | 2.020.890.000 | |
| 013 | Peralatan Fasilitas aboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri | 3.347.095.000 | 1.593.525.000 | | 2.020.890.000 | |
| 051 | Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan | 3.347.095.000 | 1.593.525.000 | | 2.020.890.000 | BLU |
| A. | Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium | 3.347.095.000 | 1.593.525.000 | | 2.020.890.000 | |
| WA | Program Dukungan Manajemen | 23.499.225.000 | 2.906.730.000 | | 22.111.183.000 | |
| 6042 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri | 23.499.225.000 | 2.906.730.000 | | 22.111.183.000 | |
| 6042.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 21.072.144.000 | 1.290.876.000 | | 21.291.290.000 | |
| 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 333.528.000 | 230.000.000 | | 103.528.000 | |
| 051 | Pengelolaan Data dan Informasi | 333.528.000 | 230.000.000 | | 103.528.000 | BLU |
| A. | Pengelolaan Data dan Informasi | 333.528.000 | 230.000.000 | | 103.528.000 | |
| 962 | Layanan Umum | 73.958.000 | | | 65.292.000 | |
| 051 | Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga | 73.958.000 | | | 65.292.000 | BLU |
| A. | Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga | 73.958.000 | | | 65.292.000 | |
| 994 | Layanan Perkantoran | 20.664.658.000 | 1.060.876.000 | | 21.122.470.000 | |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | 14.982.432.000 | | 1.518.688.000 | 16.501.120.000 | RM |
| A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 14.647.771.000 | | 1.230.493.000 | 15.878.264.000 | |
| B | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK | 334.661.000 | | 288.195.000 | 622.856.000 | |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 5.682.226.000 | 1.060.876.000 | | 4.621.350.000 | RM/BLU |
| A | Operasional Perkantoran dan Pimpinan | 3.191.858.000 | 1.004.657.000 | | 2.055.551.000 | RM/BLU |
| B | Langganan Daya Dan Jasa | 916.200.000 | 2.414.000 | | 790.276.000 | RM/BLU |
| C | Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor | 717.570.000 | | | 960.289.000 | RM/BLU |
| D | Pemeliharaan Kendaraan Operasional | 271.540.000 | 53.805.000 | | 217.735.000 | RM/BLU |
| E | Pemeliharaan Alat Laboratorium | 225.000.000 | | | 247.416.000 | BLU |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| OUTPUT | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | | SD/CP | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| | | DIPA Pagu Awal | Blokir | Penambahan Alokasi Anggaran | | Efektif |
| F | Pemeliharaan Sarana Kantor | 106.258.000 | | | 96.163.000 | RM/ BLU |
| G | Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh | 199.800.000 | | | 199.800.000 | BLU |
| H | Penyelenggaraan Poliklinik | 54.000.000 | | | 54.120.000 | BLU |
| 6042.EBB | Layanan Sarana Dan Prasarana Internal | 1.474.826.000 | 1.273.091.000 | | 201.735.000 | |
| 951 | Layanan Sarana Internal | 674.826.000 | 473.091.000 | | 201.735.000 | |
| 051 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional | 35.000.000 | 35.000.000 | | 0 | RM |
| 052 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi | 298.266.000 | 298.266.000 | | 0 | RM |
| 053 | Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran | 341.560.000 | 139.825.000 | | 201.735.000 | BLU |
| 971 | Layanan Prasarana Internal | 800.000.000 | 800.000.000 | | 0 | |
| 051 | Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan | 800.000.000 | 800.000.000 | | 0 | BLU |
| 6042.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | 700.524.000 | 294.006.000 | | 418.278.000 | |
| 954 | Layanan Manajemen SDM | 256.252.000 | 203.064.000 | | 35.871.000 | |
| 051 | Pengelolaan/Manajemen SDM | 256.252.000 | 203.064.000 | | 35.871.000 | RM/ BLU |
| 996 | Layanan Pendidikan Dan Pelatihan | 444.272.000 | 90.942.000 | | 382.407.000 | |
| 051 | Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM | 444.272.000 | 90.942.000 | | 382.407.000 | |
| A | Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN | 60.160.000 | | | 28.435.000 | BLU |
| B | Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional | 28.990.000 | | | 7.055.000 | BLU |
| C | Pendidikan Dan Pelatihan Teknis | 355.122.000 | 90.942.000 | | 346.917.000 | RM/ BLU |
| 6042.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 251.731.000 | 48.757.000 | | 199.880.000 | |
| 952 | Layanan Perencanaan Dan Penganggaran | 45.906.000 | | | 45.906.000 | |
| 051 | Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran | 45.906.000 | | | 45.906.000 | BLU |
| 953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 44.061.000 | | | 44.061.000 | |
| 051 | Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi | 44.061.000 | | | 44.061.000 | BLU |
| 955 | Layanan Manajemen Keuangan | 129.620.000 | 22.728.000 | | 103.798.000 | |
| 051 | Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan | 129.620.000 | | | 103.798.000 | RM/ BLU |
| 961 | Layanan Reformasi Kinerja | 32.144.000 | 26.029.000 | | 6.115.000 | |
| 051 | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP | 32.144.000 | | | 6.115.000 | BLU |

2.4 DOKUMEN PENJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2025-2029 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pada 2025, menindaklanjuti pelaksanaan review atas indikator kinerja UPT di lingkungan BSKJI telah dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2025 sebagaimana berikut:

Perjanjian Kinerja BBSPJPPI sesuai hal tersebut terdiri atas 1 tujuan dan 7 sasaran kegiatan dan 18 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan TA 2025

| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Satuan | Target |
|------|---|----------------------------------|--|---|--------|
| TJ | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3,68 |
| | | 2 | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri | Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi | 960 |
| SK.1 | | 1 | Persentase pelayanan tepat waktu | Persen | 88,00 |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Satuan | Target |
|------|--|----------------------------------|--|---------------|--------|
| | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | | sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) | | |
| | | 2 | Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS) | Nilai | 40 |
| SK.2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1 | Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Indeks | 3 |
| | | 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | Hasil Layanan | 7.500 |
| | | 3 | Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA) | Persen | 14,50 |
| | | 4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | Persen | 59,00 |
| SK.3 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1 | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | Indeks | 81,30 |
| SK.4 | Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | Persen | 20,00 |
| | | 2 | Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Persen | 77,00 |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Satuan | Target |
|------|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| | | | | | |
| | | 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 4,62 |
| SK.5 | Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien | 1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | Persen | 60,00 |
| | | 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan) | Nilai | 70,10 |
| SK.6 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | Nilai | 79,45 |
| | | 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 93,40 |
| | | 3 | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | Nilai | 75,00 |
| SK.7 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah | Persen | 81,00 |

Indikator kinerja tujuan pada tujuan meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri yang terdiri dari:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan satuan berupa Indeks, serta
- 2) Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, dengan satuan berupa Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan. Pada bab ini, menjelaskan target dan realisasi dari Perjanjian Kinerja TA. 2025 dan capaian dari kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk menginformasikan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selain itu, juga memaparkan capaian kinerja satker berdasarkan Renstra BSKJI Tahun 2025-2029. Uraian di bawah merupakan realisasi kinerja BBSPJPPI pada tahun 2025 yang disajikan berdasarkan sumber dana dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam mencapai visi dan misinya, BBSPJPPI melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSKJI dan Renstra BBSPJPPI dengan target kinerja pada setiap awal tahun anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025, BBSPJPPI melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri dan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri guna mendukung perwujudan 1 Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan BSKJI yang meliputi :

- 1 Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
- 2 Sasaran Kinerja 1 :Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.
- 3 Sasaran Kinerja II : Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.
- 4 Sasaran Kinerja III : Terwujudnya SDM yang profesional
- 5 Sasaran Kinerja IV: Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik.
- 6 Sasaran Kinerja V: Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- 7 Sasaran Kinerja VI : Penguatan Akuntabilitas Organisasi.
- 8 Sasaran Kinerja VII: Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025

Sasaran strategis BBSPJPI telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat Kementerian Perindustrian dan Unit Eselon I (BSKJI) dimana seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BBSPJPI adalah turunan dari tingkat kementerian dan Unit Eselon I (BSKJI). Hal ini dapat terlihat sesuai pemetaan sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan pemetaan/matriks alur sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 9. Matriks Alur IKU Kemenperin, BSKJI Sampai Perjanjian Kinerja Balai TA.2025

| KEMENPERIN | | | BSKJI | | | UNIT PELAKSANA TEKNIS | | |
|------------|---|--|-------|---|---|-----------------------|---|--|
| KODE | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KODE | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KODE | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
| SS2 | Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif | 1.Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | SP4 | Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif | 1. Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional | TJ | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | 2. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas | | | | | | 2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri |
| | | 3. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja | | | | SK6.1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) |
| | | 4. Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah | | | | | | 2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS) |
| | | | | | | SK6.2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
| | | | | | | | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri |
| | | | | | | | | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| KEMENPERIN | | | BSKJI | | | UNIT PELAKSANA TEKNIS | | |
|------------|---|-------------------------------------|-------|---|--|-----------------------|---|--|
| KODE | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KODE | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KODE | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
| | | | | | | | | 4. Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO) |
| SS7 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik | Indeks RB Kementerian Perindustrian | SP5 | Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah | SK6.7 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah |
| | | | SP6 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. Indeks Profesionalitas ASN | SK6.3 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) |
| | | | SP7 | Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | SK6.4 | Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI |
| | | | | | 2. Indeks Manfaat Kerja Sama | | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| | | | | | 3. Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A | | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) |
| | | | | | 4. Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral | | | |
| | | | SP8 | Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien | 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI | SK6.5 | Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien | 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker |

| KEMENPERIN | | | BSKJI | | | UNIT PELAKSANA TEKNIS | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|--|
| KODE | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KODE | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | KODE | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
| | | | | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (unit kearsipan) | | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan) |
| | | | SP9 | Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI | SK6.6 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker |
| | | | | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) |
| | | | | | 3. Penilaian dan analisis laporan keuangan | | | 3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan |

Berdasarkan Tabel 9 di atas, terdapat dua Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang menjadi acuan bagi BSKJI, yaitu **SS2: Tumbuh dan berkembangnya industri yang inklusif** dan **SS7: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Perindustrian**.

Mengacu pada **SS2**, BSKJI menurunkannya ke dalam **SP4 : Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif**. Sasaran Program tersebut selanjutnya diturunkan pada tingkat satuan kerja menjadi **SK.6.1** dan **SK.6.2**, yang merupakan turunan dari tujuan satuan kerja.

Selanjutnya, mengacu pada **SS7**, BSKJI menurunkannya ke dalam beberapa Sasaran Program, yaitu **SP5: Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri**, **SP6: Terwujudnya SDM yang profesional**, **SP7: Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik**, serta **SP8: Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien**. Sasaran Program tersebut pada tingkat satuan kerja BSKJI selanjutnya diturunkan ke dalam **SK.6.7, SK.6.3, SK.6.4, SK.6.5, dan SK.6.6**.

Adapun penjelasan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut :

3.1.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan pada Perjanjian Kinerja TA 2025

1. Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 10,Capaian Berdasarkan Tujuan Perjanjian Kinerja 2025

| No. | Tujuan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|--|---|----------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 3,68 indeks | 3,70 indeks | 100,54% |
| | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 1063 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 110,73 % |

a. Indikator Tujuan 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 sd 4, dimana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik ; nilai indeks 2,6-3,064 kurang baik; nilai indeks 3,0644-3,532 baik serta nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.

1. Hasil yang telah dicapai

Pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri memiliki target sebesar indeks 3,68 dan realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri Balai sebesar indeks 3,70 sehingga capainnya 100,54%.

Pengisian kuesioner dilakukan oleh pengguna jasa layanan secara daring maupun luring. Kuesioner terdiri dari sembilan pertanyaan yang dibagi kedalam sembilan aspek yaitu aspek persyaratan, aspek sistem, mekanisme, dan prosedur, aspek waktu penyelesaian, aspek biaya/tarif, aspek produk spesifikasi jenis layanan, aspek kompetensi pelaksana, aspek perilaku pelaksana, aspek penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan aspek sarana dan prasarana. Pelaksanaan survei berlangsung selama 1 tahun mulai dari tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan jumlah responden sebanyak 308 responden dari total pelanggan selama 1 tahun sebanyak 1.063 pelanggan. Indeks tertinggi terdapat pada aspek perilaku pelaksana dan aspek terendah terdapat pada aspek sarana dan prasarana. Jika dilihat dari jenis layanan, layanan dengan nilai indeks tertinggi terdapat pada layanan sertifikasi dengan nilai indeks sebesar 3,84. Indeks terendah pada layanan pengujian dengan nilai indeks sebesar 3,58.

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri selama TA 2021-2025 adalah sebagai berikut

Tabel 11. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat TA 2021-2025

| Indikator Kinerja | Realisasi TA 2021 | Realisasi TA 2022 | Realisasi TA 2023 | Realisasi TA 2024 | Realisasi TA 2025 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 3,65 | 3,66 | 3,66 | 3,68 | 3,70 |

Tabel 12. Perbandingan IKM dan Realisasi Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri di UPT BSKJI

| No. | Nama Satker | Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat | Realisasi Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri |
|-----|------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | BBSPJIKFK | 3.67 | 988 |
| 2 | BBSPJIA | 3.76 | 3.734 |
| 3 | BBSPJIKMN | 3.82 | 520 |
| 4 | BBSPJIT | 3.83 | 894 |
| 5 | BBSPJIBBT | 3.65 | 3.725 |
| 6 | BBSPJIS | 3.77 | 683 |
| 7 | BBSPJILM | 3.72 | 756 |
| 8 | BBSPJIKKP | 3.899 | 835 |
| 9 | BBSPJIKB | 3.66 | 648 |
| 10 | BBSPJIPPI | 3.70 | 1.063 |
| 11 | BBSPJIHPMM | 3.68 | 886 |
| 12 | BSPJI Aceh | 3.75 | 471 |
| 13 | BSPJI Medan | 3.66 | 556 |
| 14 | BSPJI Padang | 3.62 | 451 |
| 15 | BSPJI Palembang | 3.70 | 445 |
| 16 | BSPJI Lampung | 3.65 | 595 |
| 17 | BSPJI Surabaya | 3.76 | 1.273 |
| 18 | BSPJI Pontianak | 3.67 | 384 |
| 19 | BSPJI Banjarbaru | 3,84 | 1.038 |
| 20 | BSPJI Samarinda | 3.85 | 358 |
| 21 | BSPJI Manado | 3.83 | 825 |
| 22 | BSPJI Ambon | 3.69 | 120 |
| 23 | BSPJI Jakarta | 3,71 | 895 |
| 24 | BSPJI Pekanbaru | 3,73 | 207 |

Berdasarkan Tabel 11, realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 3,70, realisasi IKM BBSPJPI Tahun 2025 telah mencapai nilai 3,70. Dengan demikian, capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2025 dan telah sesuai dengan target jangka menengah.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan capaian satuan kerja lain di bawah BSKJI sesuai tabel 12, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BBSPJPI berada pada kategori baik dan menempati posisi capaian di tingkat menengah.

Analisis penyebab keberhasilan :

Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melampaui target pada periode Tahun 2021–2025 didukung oleh komitmen BBSPJPI dalam mengedepankan pelayanan prima kepada pelanggan. Selain itu, masukan dan umpan balik yang diperoleh melalui pengisian kuesioner kepuasan pelanggan telah dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan BBSPJPI secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan kegiatan *business gathering* secara rutin juga berkontribusi dalam meningkatkan kedekatan dan komunikasi langsung dengan pelanggan. Di samping itu, peningkatan kualitas BBSPJPI terus dilakukan, baik dari aspek sarana dan prasarana, kualitas pelayanan teknis, maupun layanan administrasi yang semakin memudahkan pelanggan. Pemanfaatan sistem informasi SINDi yang dapat diakses oleh pelanggan setiap waktu turut berperan sebagai sarana penyediaan informasi layanan secara transparan dan responsif.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pagu anggaran pada kegiatan sosialisasi dan diseminasi mengalami pemblokiran sebesar Rp227.537.000 atau setara dengan 34% dari total pagu anggaran kegiatan. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pemilihan lokasi kegiatan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan dilaksanakan di hotel, pada Tahun 2025

kegiatan dialihkan dan dilaksanakan di Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya efisiensi anggaran.

Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, kegiatan *business gathering* tetap dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif serta dihadiri oleh klien/pelanggan BBSPJPI. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu tetap mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan manfaat kegiatan bagi para pemangku kepentingan.

3. Kendala

Beberapa hal yang jika diatasi bisa meningkatkan jumlah responden kuesioner seperti belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua pelanggan pada semua jasa layanan yang dapat diberikan kuesioner IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Selain itu, sistem SINDi belum mengakomodir keharusan untuk mengisi kuesioner pelanggan sebelum perusahaan mengunduh LHU mandiri.

Kendala pada Tahun Anggaran 2024 yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2025 adalah terbatasnya variasi penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan. Pada Tahun 2025, tindak lanjut dilakukan dengan memperluas dan memvariasikan penyebaran kuesioner kepada pelanggan pada seluruh jenis layanan, sehingga data kepuasan pelanggan yang diperoleh menjadi lebih representatif dan mencerminkan kualitas layanan secara menyeluruh.

4. Tindak Lanjut

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner yang diblasting melalui WA dan email, platform SINDi belum bisa digunakan sebagai sarana pengisian kuesioner, sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner IKM belum dilaksanakan di media sosial BBSPJPI serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu pintu.

Tindak lanjut dari kendala TA 2024 adalah penyebaran kuesioner ke pelanggan untuk semua jenis layanan jasa.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

1. Membuat tampilan kuesioner yang lebih menarik, sehingga minat pelanggan untuk mengisi kuesioner semakin meningkat.
2. Optimalisasi platform SINDIi sebagai sarana dan prasarana penyampaian dan pengisian kuesioner agar dapat terealisasi dimana pelanggan diharuskan mengisi kuesioner IKM sebelum mengunduh LHU.
3. Penjadwalan sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner terintegrasi BBSPJPPI dilakukan setiap awal bulan.
4. Membuat dokumen data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu (rekapitulasi lengkap, terutama narahubung). Selain itu, dapat pula membuat database melalui SINDIi berdasarkan nomor order layanan yang digunakan (nomor order masih dalam tahap pengembangan).

b. Indikator Tujuan 2 : Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi/ pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT BSKJI pada tahun ke-n (tahun berjalan).

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah 1.063 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dari target 960 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dengan capaian 110,73%.

b. Analisis hasil yang telah dicapai

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Desember 2025 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai Desember berdasarkan data berikut :

Tabel 13. Jumlah Layanan Jasa yang Digunakan oleh Industri

| No | Jenis Layanan | Satuan | Realisasi Layanan |
|----|--|---|-------------------|
| | | | Jan – Des 2025 |
| 1 | Layanan Pengujian | Perusahaan/ pelaku industri/ instansi | 506 |
| 2 | Layanan Kalibrasi | | 73 |
| 3 | Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis | | 23 |
| 4 | Layanan Sertifikasi | | 261 |
| 5 | Layanan Inspeksi Teknik | | 0 |
| 6 | Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek) | | 50 |
| 7 | Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS) | | 1 |
| 8 | Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL) | | 1 |
| 9 | Layanan Verifikasi (TKDN, GRK) | | 37 |
| 10 | Layanan Pemeriksaan Produk Halal | | 62 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 11 | Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi | | 49 |
| 12 | Layanan Produsen Bahan Acuan | | 0 |
| 13 | Layanan lainnya | | 0 |
| | | Total | 1063 |

Tabel 14. Perbandingan Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri TA 2021-2025

| Indikator Kinerja | Realisasi | | | | |
|--|-----------|------|------|-------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri | 681 | 720 | 792 | 1.014 | 1.063 |

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator kinerja jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri pada setiap tahun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Hal ini mencerminkan meningkatnya tingkat kepercayaan serta kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan jasa industri yang diselenggarakan BBSPJPI.

Apabila dibandingkan dengan capaian satuan kerja lain di bawah BSKJI sebagaimana ditampilkan pada Tabel 12, capaian indikator pada Tahun 2025 tergolong tinggi, dengan realisasi mencapai lebih dari 1.000 pengguna layanan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar satuan kerja sejenis, serta menegaskan peran strategis unit kerja dalam mendukung pelayanan jasa industri.

Analisis Penyebab Keberhasilan :

Tren peningkatan jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri setiap tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan layanan telah berjalan efektif dan berhasil.

Peningkatan capaian ini mencerminkan bertambahnya tingkat kepercayaan dan kebutuhan pelaku usaha terhadap layanan yang disediakan.

Selain itu, keberhasilan pencapaian indikator ini juga mencerminkan adanya sinergi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan layanan jasa industri. Dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berjalan secara berkelanjutan, organisasi mampu melakukan perbaikan layanan secara tepat waktu sehingga tren peningkatan capaian dapat dipertahankan secara konsisten.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan peningkatan jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terencana dan berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kualitas dan ragam layanan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, kegiatan promosi dan sosialisasi layanan yang dilakukan secara konsisten kepada pelaku industri turut meningkatkan visibilitas dan akses terhadap layanan. Integrasi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program yang berjalan dengan baik memungkinkan adanya perbaikan layanan secara berkelanjutan, sehingga mampu mendorong dan menjaga tren peningkatan capaian indikator kinerja.

c. Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan capaian belum optimal antara lain :

- Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor yang lebih murah.
- Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, audit CEMS, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan.

Kendala pada Tahun Anggaran 2024 yang telah ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2025 adalah perlunya pengembangan jasa layanan baru, seperti LVV GRK dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), mengingat tingkat persaingan pada layanan tersebut masih relatif rendah serta peluang pasar yang tersedia masih terbuka lebar.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPPI dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Tindak lanjut dari kendala 2024 adalah telah difasilitasi layanan jasa baru yaitu LVV GRK dan LSP. Dimana untuk dokumen sudah dibuat dan SDM sudah tersertifikasi.

Tindak lanjut atas kendala pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan melalui fasilitasi pengembangan layanan jasa baru, yaitu layanan LVV GRK dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Dalam pelaksanaannya, dokumen pendukung yang diperlukan telah disusun dan dipenuhi, serta sumber daya manusia yang terlibat telah mengikuti proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah:

1. *Follow up* secara berkala untuk calon pelanggan dari hasil kegiatan pameran salah satunya dengan blasting promosi jasa layanan BBSPJPPI.
2. *Finalisasi* draft revisi tariff agar tariff jasa layanan lebih kompetitif.

3.1.1.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja TA 2025

Seperti yang diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan rencana aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan dan e-monitoring berbagai aplikasi monev. Adapun realisasi fisik per triwulan dari rencana aksi yang dimaksud adalah:

Tabel 15. Realisasi Perjanjian Kinerja Per Triwulan TA 2025

| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | |
|------|---|----------------------------------|--|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | | | | | | % Fisik | | % Fisik | | % Fisik | | % Fisik | | |
| | | | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| TJ | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 3,68 | 3,7 | 100,54 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | | 2 | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri | Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 960 | 1063 | 110,73 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| SK.1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1 | Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | Persen | 88 | 94,23 | 107,08 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | | 2 | Nilai Net Promoter Score (NPS) | Nilai | 40 | 63 | 157,50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| SK.2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1 | Indeks peningkatan Penerimaan | Indeks | 3 | 3 | 100,00 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---------------|------|-------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | | Negara Bukan Pajak (PNBP) | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | Hasil Layanan | 7500 | 8574 | 114,32 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | | 3 | Nilai Revenue on Asset (RoA) | Persen | 14,5 | 15,9 | 109,66 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | | 4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | Persen | 59 | 61,46 | 104,17 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| SK.3 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1 | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | Indeks | 81,3 | 83,43 | 102,62 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| SK.4 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik | 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | Persen | 20 | 20 | 100,00 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | | 2 | Tingkat Penerapan (SPBE) | Persen | 77 | 88,81 | 115,34 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| | | 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 4,62 | 4,95 | 107,14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--------|-------|-------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| SK.5 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | Persen | 60 | 100 | 166,67 | 15 | 15 | 40 | 40 | 75 | 85 | 100 | 100 |
| | | 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | Nilai | 70,1 | 86,47 | 123,35 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| SK.6 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | Nilai | 79,45 | 83,6 | 105,22 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| | | 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | Nilai | 93,4 | 90,92 | 97,34 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| SK.7 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | Persen | 81 | 89,79 | 110,85 | 30 | 20 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |

Dari tabel di atas dapat kita lihat pada umumnya, indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan per Triwulan, namun terdapat satu indikator yang realisasinya tidak mencapai target yakni pada indikator Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA, adapun kendala dalam pencapaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Rendahnya nilai pada aspek Belanja Kontraktual karena terdapat terdapat pendaftaran kontrak yang bersumber anggaran Rupiah Murni *non inaproc* yang dilakukan pada saat mendekati akhir tahun.

Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator.

Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi, dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun penjelasan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing Sasaran Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Sasaran Kegiatan I : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

Tabel 16, Capaian Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|-----------|--------------|---------|
| 1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i> | 88 Persen | 94,23 Persen | 107,08% |
| | | 2. Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i> | 40 nilai | 63 nilai | 157,5 % |

a. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 : Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai *Service Level Agreement (SLA)*

Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai *Service Level Agreement (SLA)* merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar

Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, dimana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

$(\frac{\sum \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM}}{\sum \text{Pelayanan yang diberikan}}) \times 100\%$

1) Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah 94,23 persen dari target 88 persen dengan capaian 107,08 %. Total order/SPK/transaksi TA 2025 sebesar 8.146 order/SPK/transaksi sedangkan jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah 7.676 order/SPK/transaksi.

2) Analisis hasil yang telah dicapai

Tabel 17,Rincian Sampel Jenis Layanan

| Layanan | Januari - Desember | |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| | Jumlah sampel/ transaksi/Order | Sampel sesuai SPM |
| Layanan Pengujian | 6.924 | 6.465 |
| Layanan Kalibrasi | 718 | 716 |
| Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis | 23 | 23 |
| Layanan Sertifikasi | 281 | 272 |
| Layanan Inspeksi Teknik | 0 | 0 |
| Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek) | 50 | 50 |
| Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS) | 1 | 1 |
| Layanan Jasa Rancang Bangun dan | 1 | 1 |

| Layanan | Januari - Desember | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | Jumlah sampel/ transaksi/Order | Sampel sesuai SPM |
| Perekayasaan (Design IPAL) | | |
| Layanan Verifikasi (TKDN, GRK) | 37 | 37 |
| Layanan Pemeriksaan Produk Halal | 62 | 62 |
| Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi | 49 | 49 |
| Layanan Produsen Bahan Acuan | 0 | 0 |
| Layanan lainnya | 0 | 0 |
| Total | 8.146 | 7.676 |

Tabel 18. Realisasi Capaian Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA) Tahun 2021-2025

| Indikator Kinerja | Realisasi | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Persentase Pemenuhan Waktu Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) | 93,00 % | 93,06 % | 92,36 % | 97,75 % | 94,32 % |

Capaian Kinerja pemenuhan waktu layanan sesuai SLA selama 2021–2025 menunjukkan tren positif dengan puncak capaian pada 2024 dan kinerja 2025 yang masih berada pada level baik. Dengan penguatan sistem dan konsistensi penerapan praktik terbaik, indikator ini berpotensi dipertahankan secara stabil di atas 95% pada tahun-tahun berikutnya

Tabel 19. Realisasi capaian Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai *Service Level Agreement* (SLA) satker BSKJI

| Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Waktu Sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) | Nilai |
|--|-------|
| BBSPJIKFK | 99,05 |
| BBSPJIA | 100 |
| BBSPJIKMN | 88,94 |

| | |
|------------------|--------------|
| BBSPJIT | 95,49 |
| BBSPJIBBT | 99,77 |
| BBSPJIS | 99,25 |
| BBSPJILM | 84,62 |
| BBSPJIKKP | 99,59 |
| BBSPJIKB | 100 |
| BBSPJPPI | 94,23 |
| BBSPJIHPMM | 99,99 |
| BSPJI Aceh | 92 |
| BSPJI Medan | 91,26 |
| BSPJI Padang | 99,6 |
| BSPJI Palembang | 98,10 |
| BSPJI Lampung | 98,25 |
| BSPJI Surabaya | 97,47 |
| BSPJI Pontianak | 96,1 |
| BSPJI Banjarbaru | 99,99 |
| BSPJI Samarinda | 96,96 |
| BSPJI Manado | 89,64 |
| BSPJI Ambon | 74,12 |
| BSPJI Jakarta | 77,68 |
| BSPJI Pekanbaru | 96,16 |

Capaian BBSPJPPI sebesar 94,23% menunjukkan kinerja yang baik namun belum optimal dibandingkan satker yg capaiannya 100%.

Analisa keberhasilan :

Secara keseluruhan, capaian indikator Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai SLA BBSPJPPI didorong oleh sinergi beberapa faktor kunci, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap SOP layanan
2. Kompetensi SDM yang handal,

3. Modernisasi dan pemeliharaan peralatan uji, serta
4. Komitmen organisasi dalam memenuhi SPM.

Kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk fondasi keberhasilan yang kuat dalam menjaga mutu dan ketepatan waktu layanan.

3) Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi pada TA 2025 adalah :

- Adanya permintaan khusus dari pelanggan (PT. KPI RU IV) untuk penerbitan LHU menunggu data rata-rata debit di awal bulan berikutnya. Dimana rata-rata tiap bulan terdapat 15 LHU.
- Masih terdapat parameter uji yang disubkontrak ke laboratorium lain, dimana SPM laboratorium subkontrak tersebut melebihi dari 14 hari sebagaimana standar yang ditetapkan BBSPJPI. Contohnya subkon di AAS, BATAN dan Labkes Propinsi Jateng. Hal ini berpengaruh pada capaian SPM ke pelanggan.
- Kendala kerusakan peralatan dan keterlambatan bahan kimia. Kerusakan terjadi di alat AAS Flame dan Grafit Furnace dan berpengaruh pada proses pengujian pada parameter logam. Sedangkan untuk bahan kimia adalah reagen Spektro Gallery dimana bahan kimia memang khusus buatan Thermo sehingga tidak ada alternatif lain.
- Pelanggan mengajukan revisi alamat pada lembar sertifikat kalibrasi.
- Adanya perubahan dokumen legalitas perusahaan yang harus disesuaikan, sehingga butuh waktu lebih lama untuk penyelesaian pekerjaan.
- Untuk pekerjaan *one stop service* (audit SNI dan ISO yang dilakukan bersamaan) untuk SLAnya tidak sama dan kadang untuk Pantek perusahaan minta dilakukan bersamaan karena untuk menyamakan siklus.

Kendala pada tahun 2024 berupa tingginya ketergantungan terhadap subkontrak telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 melalui upaya perluasan ruang lingkup parameter pengujian menggunakan peralatan GCMS. Selain itu, dilakukan pencarian laboratorium pembanding rujukan subkontrak yang telah

terakreditasi dengan biaya layanan yang lebih kompetitif. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian layanan pengujian serta efisiensi anggaran.

4) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan adalah

- Koordinasi dengan Tim SINDIi untuk penambahan kode contoh dengan permintaan khusus pelanggan.
- Laboratorium sudah melakukan pelatihan dan mulai menginventaris kebutuhan untuk perluasan ruang lingkup pengujian.
- Membuat skala prioritas untuk peremajaan peralatan pengujian.
- Memastikan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai pada saat di proses
- Untuk kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan bersamaan antara SNI dan ISO 9001:2015 akan dicoba untuk di lakukan evaluasi secara terpisah

Tindak lanjut pada kendala 2024 adalah perbaikan dokumen perluasan ruang lingkup dan pada pertengahan tahun terjadi pergantian laboratorium rujukan subkon dimana dari laboratorium ALS , sekarang menggunakan laboratorium AAS (Anugrah Analisis Sempurna).

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah pada sistem Aplikasi SINDIi ditambahkan kode contoh "4" untuk pengujian dengan permintaan khusus dari pelanggan, melakukan pengadaan untuk bahan dan peralatan untuk memperluas parameter pengujian dan untuk tahun 2026 telah ditetapkan skala prioritas pengadaan alat uji berupa AAS Flame – GF, berkaitan permohonan sertifikasi melalui aplikasi SIINAS tim kerja Sertifikasi akan berkoordinasi dengan tim Kerja PJI untuk memastikan kelengkapan dokumen permohonan yang sesuai dan lengkap dan untuk kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan bersamaan antara SNI dan ISO 9001:2015 proses pelaksanaan rapat Pantek akan dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian SLA masing-masing kegiatan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 : Nilai *Net Promoter Score* (NPS)

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

>**Promoters (9-10)**: Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

>**Passives (7-8)**: Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.

>**Detractors (0-6)**: Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*.

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*)

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian NPS dengan nilai 63 dari target 40 dengan persen capaian sebesar 157,5 %.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 20. Kategori Pelanggan dalam NPS

| Kategori | Jumlah |
|-------------------|---------------|
| <i>Promoters</i> | 204 |
| <i>Passives</i> | 94 |
| <i>Detractors</i> | 10 |
| Total | 308 |

Tabel 21. Perbandingan nilai NPS Antar Satker di Bawah BSKJI

| Indikator Kinerja Nilai NPS | Nilai |
|------------------------------------|--------------|
| BBSPJIKFK | 64,42 |
| BBSPJIA | 72,99 |
| BBSPJIKMN | 82,67 |
| BBSPJIT | 83,4 |
| BBSPJIBBT | 72 |
| BBSPJIS | 80,23 |
| BBSPJILM | 68,6 |
| BBSPJIKKP | 67,6 |
| BBSPJIKB | 86 |
| BBSPJIPPI | 63 |
| BBSPJIHPMM | 90,6 |
| BSPJI Aceh | 85,5 |
| BSPJI Medan | 80,66 |
| BSPJI Padang | 95,4 |
| BSPJI Palembang | 88,27 |
| BSPJI Lampung | 64,89 |
| BSPJI Surabaya | 83 |
| BSPJI Pontianak | 75,22 |
| BSPJI Banjarbaru | 91,36 |

| | |
|-----------------|-------|
| BSPJI Samarinda | 60,58 |
| BSPJI Manado | 99 |
| BSPJI Ambon | 98,28 |
| BSPJI Jakarta | 78,15 |
| BSPJI Pekanbaru | 83 |

Analisa Capaian

Capaian NPS BBSPJPPI tahun 2025 yang telah memenuhi target mencerminkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang tinggi dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan satker BSKJI lainnya, posisi BBSPJPPI sudah tergolong cukup baik dan kompetitif.

Banyak pelanggan secara aktif mempromosikan layanan balai kepada pihak lain menunjukkan bahwa BBSPJPPI tidak hanya berhasil memuaskan pelanggan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang mendorong loyalitas sehingga mendorong pelanggan untuk turut merekomendasikan layanan BBSPJPPI kepada pihak lain.

c. Kendala

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDIi sebelum perusahaan mengunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan. Selain itu belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS.

NPS merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner yang diblasting melalui WA dan email, platform SINDIi

belum bisa digunakan sebagai sarana pengisian kuesioner, sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner NPS belum dilaksanakan di media sosial BBSPJPPI serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu pintu.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah melakukan edukasi dan komunikasi secara intens ke pelanggan untuk pengisian kuesioner dan mengirimkannya kembali secara online ke BBSPJPPI, edukasi kepada pelanggan terkait upaya peningkatan layanan BBSPJPPI untuk memaksimalkan penilaian NPS dan memperbaiki sistem SINDIi sehingga pelanggan yang mengunduh LHU dapat langsung terkoneksi dengan kuesioner dan sebagai keharusan pengisian sebelum mengunduh LHU.

II. Sasaran Kegiatan II : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri

Tabel 22, Capaian Sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------------------|--------------------|----------|
| Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 3 indeks | 3 indeks | 100 % |
| | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7500 hasil layanan | 8574 hasil layanan | 114,32 % |
| | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14.50% | 15,90 % | 109,66% |
| | 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 59 Persen | 61,46 Persen | 104,17% |

a) **Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP.

Cara menghitungnya sebagai berikut :

Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun **2024 sebagai baseline** (A) dibagi A dikalikan 100%.

Persentase Peningkatan PNBP= $\frac{(B-A)}{A} \times 100\%$

A

Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:

| Indeks | Range Peningkatan PNBP |
|--------|------------------------|
| 1 | $\leq 5\%$ |
| 2 | $5 < x \leq 20\%$ |

| | |
|---|---------------------|
| 3 | $20 < x \leq 50\%$ |
| 4 | $50 < x \leq 100\%$ |
| 5 | >100 |

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari indikator kinerja adalah 3 indeks dari target 3 indeks dengan capaian 100%. Penerimaan Januari – Desember 2025 sebesar Rp 20.483.355.953 dari target Rp. 18.686.000.000,- (109,62 % dari target).

Baseline penerimaan 2024 sebesar Rp.15.500.000.000

Indeks peningkatan PNBP = $\frac{20.483.355.953 - 15.500.000.000}{15.500.000.000} = 32,15\%$ (indeks 3)

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 23. Realisasi Penerimaan PNBP BBSPJPPI TA 2025 Per Jenis Layanan

| No | Jasa Layanan | Jumlah (Rp) |
|----|---|---------------------------|
| 1 | Jasa Pelayanan Teknis Pengujian | 13.763.069.673 |
| 2 | Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi | 1.254.866.852 |
| 3 | Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi | 2.506.060.000 |
| 4 | Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis | 184.587.100 |
| 5 | Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri | 1.096.133.500 |
| 6 | Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Teknis | 1.237.909.000 |
| 7 | Penyelenggara Uji Profisiensi | 121.139.192 |
| 8 | Jasa Sertifikasi Halal | 76.548.000 |
| 9 | Pendapatan sewa gedung | 55.000.000 |
| 10 | Pendapatan sewa ruangan | 1.250.000 |
| 11 | Penerimaan lain-lain/Titipan | 9.870.033 |
| 12 | Jasa Giro BLU | 100.198.014 |
| 13 | Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TA yang lalu | 76.724.589 |
| | JUMLAH | Rp. 20.483.355.953 |

Tabel 24 Perbandingan Antar Satker BSKJI

| Indikator Kinerja Indeks Penerimaan PNBP | Indeks |
|---|---------------|
| BBSPJIKFK | 4 |
| BBSPJIA | 2 |
| BBSPJIKMN | 4 |
| BBSPJIT | 4 |
| BBSPJIBBT | 3 |
| BBSPJIS | 5 |
| BBSPJILM | 5 |
| BBSPJIKKP | 4 |
| BBSPJIKB | 5 |
| BBSPJIPPI | 3 |
| BBSPJIHPMM | 1 |
| BSPJI Aceh | 3 |
| BSPJI Medan | 1 |
| BSPJI Padang | 1 |
| BSPJI Palembang | 4 |
| BSPJI Lampung | 1 |
| BSPJI Surabaya | 4 |
| BSPJI Pontianak | 2 |
| BSPJI Banjarbaru | 5 |
| BSPJI Samarinda | 1 |
| BSPJI Manado | 4 |
| BSPJI Ambon | 5 |
| BSPJI Jakarta | 1 |
| BSPJI Pekanbaru | 5 |

Analisa Keberhasilan :

Capaian indeks penerimaan PNBPN sesuai dengan target yang ditetapkan di 2025. Disisi lain meningkatnya realisasi penerimaan PNBPN mencerminkan keberhasilan BBSPJPPI dalam mengelola dan mengembangkan layanan jasa secara efektif. Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan bertambahnya volume dan nilai layanan, tetapi juga merefleksikan tingginya tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap mutu layanan balai.

Dengan sinergi antara peningkatan mutu layanan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional, realisasi capaian dan indeks peningkatan PNBPN berpotensi terus meningkat secara berkelanjutan dan menjadi salah satu pilar utama kinerja institusional BBSPJPPI ke depan.

c. Kendala

Ada beberapa kendala yang mengakibatkan penerimaan PNBPN BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi masih terbatas.
4. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti uji profisisensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
5. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.
6. Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pelatihan dalam rangka pemenuhan gap kompetensi belum dapat dilakukan secara optimal karena harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia dan calon pelanggan masih memiliki keraguan terhadap kapabilitas BBSPJPI, sehingga pencapaian perolehan pelanggan untuk layanan baru belum optimal. Selain itu, terdapat keterbatasan anggaran persediaan barang, khususnya untuk pengadaan sparepart AiMS yang diperlukan sebagai modal penjualan alat AiMS.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan promosi layanan baru BBSPJPI yang meliputi uji RATA, CGA untuk peralatan CEMS, uji profisiensi, pemeriksaan halal, TKDN, dan LSP melalui penyusunan portofolio layanan yang komprehensif serta perluasan jejaring kerja (*networking*) dengan memanfaatkan media sosial resmi balai dan keikutsertaan dalam kegiatan pameran.
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerimaan PNBPN (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK).
4. Menerapkan skala prioritas penggunaan anggaran pelatihan.
5. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.

b) Indikator Kinerja Sasaran 2.2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa

industri lainnya.

Catatan:

- 1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.
- 2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNPB berbayar.

Cara Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan). Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Sertifikat/ Laporan)
4. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)
5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi/ Kajian)
Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
7. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
8. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan)
9. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Hasil Uji)
10. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: sampel)
11. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi)

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri sebanyak 8.574 Hasil Layanan dari target 7.500 Hasil Layanan dengan capaian 114,32%.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 25. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

| Jasa Layanan | Satuan | Januari-Desember 2025 |
|---|--|-----------------------|
| Layanan Pengujian | LHU | 7078 |
| Layanan Kalibrasi | LHU | 723 |
| Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis | Sertifikat/Laporan | 151 |
| Layanan Sertifikasi | Sertifikat/Hasil surveilen | 284 |
| Layanan Inspeksi Teknik | Laporan Hasil Inspeksi | 0 |
| Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek) | Laporan Hasil Konsultansi/Kajian | 50 |
| Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS) | Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin | 1 |
| Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perencanaan (Design IPAL) | Laporan Hasil RBPI | 1 |
| Layanan Verifikasi (TKDN, GRK) | Laporan Verifikasi | 166 |
| Layanan Pemeriksaan Produk Halal | Lapran Hasil Pemeriksaan | 71 |
| Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi | Laporan Hasil Uji | 49 |
| Layanan Produsen Bahan Acuan | Sampel | 0 |
| Layanan lainnya | Laporan/order/SPK | 0 |
| Total | | 8.574 |

Tabel 26 Perbandingan Capaian Antar Satker

| Indikator Kinerja Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri | Capaian |
|--|---------|
| BBSPJIKFK | 5842 |
| BBSPJIA | 23090 |
| BBSPJIKMN | 2658 |
| BBSPJIT | 4856 |
| BBSPJIBBT | 22542 |
| BBSPJIS | 5694 |
| BBSPJILM | 5417 |
| BBSPJIKKP | 6120 |
| BBSPJIKB | 6219 |

| | |
|------------------|-------------|
| BBSPJIPPI | 8574 |
| BBSPJIHPMM | 10663 |
| BSPJI Aceh | 4362 |
| BSPJI Medan | 5146 |
| BSPJI Padang | 3021 |
| BSPJI Palembang | 3757 |
| BSPJI Lampung | 4041 |
| BSPJI Surabaya | 10553 |
| BSPJI Pontianak | 4325 |
| BSPJI Banjarbaru | 8500 |
| BSPJI Samarinda | 6021 |
| BSPJI Manado | 2222 |
| BSPJI Ambon | 217 |
| BSPJI Jakarta | 1651 |
| BSPJI Pekanbaru | 688 |

Capaian realisasi jumlah hasil layanan jasa industri di tahun 2025 melebihi target. Dibanding dengan capaian satker BSKJI masih dalam kategori baik.

Analisa keberhasilan :

Capaian 8.574 hasil layanan jasa industri menunjukkan bahwa BBSPJPPI telah berhasil secara signifikan dalam menjangkau dan melayani perusahaan industri dibandingkan sebagian besar satker lainnya. Posisi BBSPJPPI yang berada di kelompok atas nasional mencerminkan:

- Tingginya kepercayaan dan loyalitas pelanggan industri,
- Relevansi dan daya saing layanan yang diberikan, serta
- Kapasitas operasional yang kuat untuk mengelola volume layanan besar.

Dengan mempertahankan mutu layanan, memperluas ragam layanan, dan mengoptimalkan kapasitas operasional, BBSPJPPI sangat berpeluang untuk terus meningkatkan jumlah hasil layanan jasa industri dan memperkuat

perannya sebagai pusat layanan jasa industri unggulan di masa mendatang.

c. Kendala

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan indikator jumlah layanan jasa industri masih dirasa belum optimal antara lain :

- Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
- Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
- Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, penjualan produk AiMS dan layanan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
- Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah selama tahun 2025, BBSPJPPI telah mengikuti berbagai kegiatan pameran dengan tema yang selaras dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pameran melalui kegiatan *follow up* kepada pengunjung *booth* pameran. Namun demikian, umpan balik (*feedback*) yang diharapkan dari kegiatan tersebut belum optimal. Di sisi lain, kegiatan promosi melalui kanal resmi BBSPJPPI tetap dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jadwal konten mingguan yang telah ditetapkan.

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah

- *Follow up* secara berkala untuk calon pelanggan dari hasil kegiatan pameran salah satunya dengan blasting promosi jasa layanan BBSPJPPI.
- Finalisasi draft revisi tarif agar tarif jasa layanan lebih kompetitif.

c) **Indikator Kinerja Sasaran 2.3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)**

Nilai *Revenue on Asset* (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke- n (tahun berjalan) dikalikan 100%.

a. **Hasil yang telah dicapai**

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah 15,90 persen dari target 14,50 persen dengan capaian 109,66%.

Perhitungan ROA : $\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset tetap}} \times 100 \%$

Total Aset tetap

: $\frac{\text{Rp } 20.483.355.953}{\text{Rp } 128.805.844.474} \times 100\% = 15,90 \%$

Rp 128.805.844.474

b. **Analisis hasil yang telah dicapai**

Tabel 27. Perbandingan Indikator Nilai ROA Antar Satker di Bawah BSKJI

| Indikator Kinerja Nilai ROA | Capaian |
|-----------------------------|-------------|
| BBSPJIKFK | 3,63 |
| BBSPJIA | 8,85 |
| BBSPJIKMN | 79,34 |
| BBSPJIT | 2,85 |
| BBSPJIBBT | 23,19 |
| BBSPJIS | 4,11 |
| BBSPJILM | 126,95 |
| BBSPJIKKP | 4,04 |
| BBSPJIKB | 91,54 |
| BBSPJIPPI | 15,9 |

| | |
|------------------|-------|
| BBSPJIHPMM | 26,27 |
| BSPJI Aceh | 53,51 |
| BSPJI Medan | 8,15 |
| BSPJI Padang | 12,41 |
| BSPJI Palembang | 21,51 |
| BSPJI Lampung | 13,89 |
| BSPJI Surabaya | 13,8 |
| BSPJI Pontianak | 11,28 |
| BSPJI Banjarbaru | 29,1 |
| BSPJI Samarinda | 17,01 |
| BSPJI Manado | 7,6 |
| BSPJI Ambon | 0,039 |
| BSPJI Jakarta | 19,56 |
| BSPJI Pekanbaru | 16,41 |

Analisa keberhasilan :

Capaian Nilai ROA BBSPJPPI dibanding dengan target sudah tercapai. Nilai ROA sebesar 15,9 mencerminkan keberhasilan yang cukup kuat dalam mengelola dan memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan layanan. Posisi BBSPJPPI berada di kelompok menengah, yang menunjukkan bahwa:

- Aset telah digunakan secara produktif,
- Pertumbuhan pendapatan sejalan dengan kapasitas aset, dan
- Pengelolaan operasional relatif efisien.

c. Kendala

Penerimaan BLU sampai dengan Triwulan III sempat masih di bawah target rata-rata bulanan.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya monitoring atas piutang untuk pekerjaan yang telah selesai serta melakukan update atas aset tetap

sesuai dengan mekanisme pencatatan dan penghapusan aset tetap.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah untuk mendorong sisi realisasi penerimaan kedepannya akan dilakukan monitoring berkala atas piutang khususnya penagihan terhadap pekerjaan yang telah selesai dan segera menyelesaikan pekerjaan atas pendapatan yang diterima di muka sehingga dapat segera dilakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan.

Kedepannya optimalisasi pemanfaatan aset juga akan didorong selain melalui penyewaan aset bangunan/ruangan juga diharapkan dapat diperoleh penerimaan melalui penyewaan mesin peralatan dengan tetap memperhatikan/mengutamakan penggunaan untuk mendukung layanan internal BBSPJPI.

d) Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

$$\text{POBO} = (\text{Pendapatan Operasional} / \text{Biaya Operasional}) \times 100\%$$

Catatan:

1. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".
2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian rasio POBO sebesar 61,46% dari target 59% dengan capaian 104,17.

Pendapatan Operasional : Rp. 19.478.685.554,-

Belanja Operasional (tidak termasuk penyusutan, dan amortisasi) : Rp.
31.695.068.393,-

$$POBO = \frac{19.478.685.554}{31.695.068.393} = 61,46 \%$$

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 28 Capaian POBO Antar Satker BLU di Bawah BSKJI

| Indikator Kinerja POBO | Capaian |
|-------------------------------|----------------|
| BBSPJIKFK | 47,23 |
| BBSPJIA | 81,36 |
| BBSPJIKMN | Satker PNBP |
| BBSPJIT | 45,69 |
| BBSPJIBBT | 134,12 |
| BBSPJIS | 54,09 |
| BBSPJILM | Satker PNBP |
| BBSPJIKKP | 41,62 |
| BBSPJIKB | Satker PNBP |
| BBSPJIPPI | 61,46 |
| BBSPJIHPMM | 75,42 |
| BSPJI Aceh | Satker PNBP |
| BSPJI Medan | 33,33 |
| BSPJI Padang | Satker PNBP |
| BSPJI Palembang | Satker PNBP |
| BSPJI Lampung | 39,01 |
| BSPJI Surabaya | 116,62 |
| BSPJI Pontianak | Satker PNBP |
| BSPJI Banjarbaru | 53,36 |
| BSPJI Samarinda | 47,33 |
| BSPJI Manado | Satker PNBP |

| | |
|-----------------|------------|
| BSPJI Ambon | Satker PNB |
| BSPJI Jakarta | 194,4 |
| BSPJI Pekanbaru | Satker PNB |

Capaian POBO BBSPJPPI 61,46 menunjukkan keberhasilan yang kuat dalam pengelolaan biaya operasional secara efisien. BBSPJPPI berada di urutan menengah, yang menandakan bahwa:

- Pertumbuhan layanan sejalan dengan disiplin pengeluaran,
- Struktur biaya dikelola dengan baik, dan
- Model operasional dalam kondisi yang sehat dan berkelanjutan.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring capaian nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) setiap bulan.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

III. Sasaran Kegiatan III : Terwujudnya SDM Yang Profesional

Tabel 29 Capaian Sasaran Kegiatan III

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terwujudnya SDM yang profesional | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81.30 Indeks | 83,43 Indeks | 102,62 % |

1) Indikator Kinerja Sasaran 3.1 : Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu

instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimana pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa. Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, *Workshop*, Seminar dan sebagainya dapat diakui.

a. Hasil yang telah dicapai

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian indeks IP ASN sebesar 83,43 dari target 81,30 indeks dengan capaian 102,62%. Hal ini berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Organisasi, SDM dan Reformasi Birokrasi Nomor 96/SJ-IND.2/KP/1/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Penyampaian Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

b. Analisa hasil yang telah dicapai

Tabel 30 Capaian Indeks profesionalitas ASN BBSPJPI TA 2022-2025

| Indikator Kinerja | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|----------------------------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Indeks Profesionalitas ASN | 76 | 77,07 | 78 | 81,7 | 80 | 78,01 | 81,3 | 83,43 |

Tabel 31 .Capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Satker di Bawah BSKJI

| Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN | Capaian |
|--|---------|
| BBSPJIKFK | 83,23 |
| BBSPJIA | 78,03 |
| BBSPJIKMN | 87,23 |
| BBSPJIT | 81,91 |
| BBSPJIBBT | 83,30 |
| BBSPJIS | 82,21 |
| BBSPJILM | 79,24 |

| | |
|------------------|--------------|
| BBSPJIKKP | 85,40 |
| BBSPJIKB | 84,63 |
| BBSPJIPPI | 83,43 |
| BBSPJIHPMM | 83,70 |
| BSPJI Aceh | 78,48 |
| BSPJI Medan | 77,10 |
| BSPJI Padang | 83,60 |
| BSPJI Palembang | 86,87 |
| BSPJI Lampung | 83,27 |
| BSPJI Surabaya | 84,92 |
| BSPJI Pontianak | 80,06 |
| BSPJI Banjarbaru | 85,03 |
| BSPJI Samarinda | 80,53 |
| BSPJI Manado | 78,87 |
| BSPJI Ambon | 74,93 |
| BSPJI Jakarta | 83,38 |
| BSPJI Pekanbaru | 83,06 |

Capaian Indeks Profesionalitas Tahun 2025 melebihi target. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022-2025, capaian mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2024 tidak mencapai target sedangkan tahun 2025 dapat mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dibandingkan dengan capaian satker di bawah BSKJI, capaian indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI tergolong baik. Nilai ini menandakan peningkatan kompetensi, disiplin, pendidikan dan kinerja yang semakin meningkat.

Analisa Kegiatan yang menunjang Keberhasilan capaian

Terlaksananya program pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai BBSPJPPI baik secara online maupun offline dimana sertifikat/bukti dukung pelatihan akan diserahkan ke bagian kepegawaian untuk

diinput ke database dan pegawai yang bersangkutan turut berkewajiban menginput di aplikasi my ASN BKN dan Sipegi. Pencapaian indeks IPASN juga turut dipengaruhi oleh budaya kerja yang professional dan disiplin sebagai dasar dalam bekerja. Selain itu sistem informasi juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja.

c. Kendala

Tidak ada kendala, tetapi terdapat beberapa hal yang apabila diatasi dapat berdampak pada peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN seperti :

1. Jenis tingkat pendidikan SDM yang diperlukan organisasi tidak pada tingkatan dengan bobot maksimal.
2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) & Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) belum memperoleh kuota dari Penyelenggara sesuai jadwal kebutuhan.
3. Perubahan kebijakan penerapan Diklat Fungsional di masing-masing unit pembina termasuk penjadwalan yang tidak pasti.

Kendala tahun 2024 yang sudah diselesaikan tahun 2025 adalah menginventaris ASN yang belum mengikuti diklat 20 JPL yang selanjutnya diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah:

- Perubahan regulasi terkait perhitungan IPASN & perpindahan Jabatan dari Pelaksana ke JFT mengakibatkan nilai beberapa personil menurun akibat belum mengikuti Pelatihan Fungsional JFT.
- Beberapa personil dengan tingkat pendidikan D3 yang mengajukan Tugas Belajar Mandiri dan tidak mengajukan penyesuaian Jabatan berpotensi meningkatkan Nilai IPASN.
- Realisasi fasilitasi pelatihan masih belum sesuai dengan rencana usulan karena batasan ketersediaan kuota & anggaran untuk PKN, PKA & Diklat Fungsional.

- Terdapat beberapa realisasi pelatihan teknis diluar rencana, akibat perubahan regulasi, hasil audit & kebutuhan jasa layanan baru.
- Terdapat beberapa personil yang tidak memperoleh layanan pelatihan
Tindak lanjut dari kendala TA 2024 adalah memfasilitasi ASN yang belum mengikuti diklat 20 JPL untuk mengikuti diklat meskipun hanya terbatas diklat internal.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah:

- Melanjutkan proses pemberian izin Tugas belajar tanpa melakukan penyesuaian jabatan eksisting
- Koordinasi dengan Unit Pembina Pelatihan Jabatan untuk pelaksanaan Diklat Fungsional
- Penyesuaian jadwal rencana pelatihan mengacu postur anggaran yang tersedia
- Koordinasi dengan Manajemen & Tim Kerja terkait penugasan Pelatihan Teknis sesuai jabatan seluruh anggota minimal 1 pelatihan per tahun.

IV. Sasaran Kegiatan IV : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 32 Capaian Sasaran Kinerja IV

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|---|--------------|--------------|----------|
| 1 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 Persen | 20 Persen | 100 % |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 77 Persen | 88,81 Persen | 115,34 % |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4..62 indeks | 4,95 indeks | 107,14% |

1) Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.

Sistem informasi pelayanan publik terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker. Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknis, 2029 layanan konsultasi.

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n}}{\text{Total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n}} \times 100\%$

Contoh 1:

Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga

% Jenis layanan yang terintegrasi = $1/5 \times 100\% = 20\%$

Contoh 2:

Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga

% Jenis layanan yang terintegrasi = $2/5 \times 100\% = 40\%$

Contoh 3:

Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga

% Jenis layanan yang terintegrasi = $2/5 \times 100\% = 40\%$

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI sebesar 20% dari target 20% dengan capaian 100%. Realisasi indikator ini sesuai Nota Dinas Sekretaris BSKJI Nomor 5684/BSKJI.1/LP/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 terkait Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Layanan Publik Satker UPT BSKJI Triwulan 3. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru ditahun 2025.

Tabel Realisasi 33 Indikator Kinerja Persentase Jenis Layanan Pengujian Yang Sudah Terintegrasi Dengan Sistem Informasi BSKJI

| Indikator Kinerja Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | Keterangan |
|---|-------------------|
| BBSPJIKFK | API |
| BBSPJIA | API |
| BBSPJIKMN | API |
| BBSPJIT | API |

| | |
|------------------|-------------------|
| BBSPJIBBT | API |
| BBSPJIS | API |
| BBSPJILM | API |
| BBSPJIKKP | API |
| BBSPJIKB | API |
| BBSPJIPPI | API |
| BBSPJIHPMM | API |
| BSPJI Aceh | API |
| BSPJI Medan | API |
| BSPJI Padang | Transaksional |
| BSPJI Palembang | Transaksional |
| BSPJI Lampung | API |
| BSPJI Surabaya | API |
| BSPJI Pontianak | API |
| BSPJI Banjarbaru | API |
| BSPJI Samarinda | API |
| BSPJI Manado | API |
| BSPJI Ambon | API |
| BSPJI Jakarta | TIDAK ADA LAYANAN |
| BSPJI Pekanbaru | Transaksional |

Catatan :

API : Application Programming Interface

Transaksional : sudah menggunakan SIPPT

Dari tabel diatas, ke 24 satker UPT BSKJI sudah memenuhi integrasi data layanan pengujian dan 100% terpenuhi sesuai Perkin.

b. Analisis capaian kinerja

Dibandingkan target tahun 2025, realisasi sudah tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian seluruh satker, semua data layanan pengujian seluruh satker yang memiliki layanan pengujian sudah dapat terintegrasi dengan SIPPT.

Analisa Keberhasilan

Komitmen dari Kepala BBSPJPI dan tim kerja kelompok kerja informasi dan digitalisasi untuk mengintegrasikan data layanan pengujian dengan SIPPT walaupun dengan keterbatasan anggaran. Adanya tambahan personil ASN jabatan fungsional pranata komputer yang turut membantu dari sisi SDM pelaksana untuk mendukung pengembangan sistem informasi balai.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- 1] Pelaksanaan integrasi data layanan pada Triwulan IV menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Triwulan III, ditandai dengan semua data layanan yang berhasil terkirim dengan hasil PNBPN per layanan yang mirip / setara dengan data OM-SPAN Keuangan
- 2] Ditemukan ketergantungan terhadap konsistensi format spreadsheet keuangan, yang berpotensi memengaruhi stabilitas proses ekstraksi data apabila terjadi perubahan format atau keterlambatan pembaruan data.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- Integrasi keseluruhan data internal (Pokja, Tim, Layanan) ke dalam bentuk satu data yang sudah tervalidasi dan bisa digunakan untuk integrasi data SIPPT.
- Menata ulang aplikasi SPBE internal agar mendukung proses integrasi sistem informasi BSKJI (SIPPT).

2) Indikator Kinerja Sasaran 4.2 : Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini

mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator).

Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibuktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lemon Kemenperin yang disediakan oleh Pusdatin.

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 88,81% dari target 77% dengan capaian 115,34%. Hasil nilai sesuai Nota Dinas Nomor 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Hasil Akhir Penilaian SPBE Tahun 2025.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

Tabel 34. Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Penerapan SPBE

| Indikator Kinerja Tingkat Penerapan SPBE | Capaian |
|---|----------------|
| BBSPJIKFK | 87,85 |
| BBSPJIA | 78,30 |
| BBSPJIKMN | 77,58 |
| BBSPJIT | 94,43 |
| BBSPJIBBT | 67,17 |
| BBSPJIS | 99,32 |
| BBSPJILM | 81,58 |
| BBSPJIKKP | 66,20 |
| BBSPJIKB | 91,18 |
| BBSPJIPPI | 88,81 |
| BBSPJIHPMM | 82,26 |

| | |
|------------------|-------|
| BSPJI Aceh | 85,08 |
| BSPJI Medan | 88,22 |
| BSPJI Padang | 86,50 |
| BSPJI Palembang | 92,22 |
| BSPJI Lampung | 82,87 |
| BSPJI Surabaya | 90,81 |
| BSPJI Pontianak | 68,28 |
| BSPJI Banjarbaru | 91,82 |
| BSPJI Samarinda | 87,19 |
| BSPJI Manado | 71,04 |
| BSPJI Ambon | 44,55 |
| BSPJI Jakarta | 40,65 |
| BSPJI Pekanbaru | 84,72 |

b. Analisis capaian kinerja

Capaian realisasi tahun anggaran 2025 melebihi target. Jika dibandingkan dengan capaian tingkat penerapan SPBE antar satker dibawah BSKJI nilai capaian BBSPJPPI dikategorikan baik.

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2025.

Analisa Keberhasilan

Adanya tambahan personil ASN jabatan fungsional pranata komputer yang turut membantu dari sisi SDM pelaksana untuk mendukung pengembangan sistem informasi balai .

c. Kendala

Belum adanya petunjuk teknis terkait dengan penjelasan butir reviu LKE penerapan SPBE.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

1] Ketiadaannya standar acuan yang rinci terkait penilaian reviu SPBE baik dari

sisi penerapan dan kebijakan menyebabkan beberapa hasil akhir reviu menjadi kosong karena ketidaksesuaian konsep dengan LKE yang di-reviu

2] Efisiensi Anggaran menyebabkan pengembangan beberapa modul SINDI tidak bisa

dilaksanakan sehingga pemenuhan dari penilaian penerapan SPBE di aspek tata kelola tidak bisa maksimal.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- Merencanakan teknis maupun administrative terkait pengembangan aplikasi SPBE.
- Penguatan koordinasi internal terkait pembagian tanggungjawab penerapan teknis SPBE
- Konsultasi dan koordinasi ke Pusdatin terkait penerapan SPBE.
- Sosialisasi internal terkait penggunaan aplikasi SPBE.

3) Indikator Kinerja Sasaran 4.3 : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,95 dari target 4,62 dengan capaian 107,14% . Hasil nilai sesuai Nota Dinas Sekretaris BSKJI Nomor 5685/BSKJI.1/LP/XI/2025 tanggal 18 Desember 2025 terkait Penyampaian Nilai Akhir Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2025

di Lingkungan BSKJI.

b. Analisis capaian kinerja

Tabel 35 Target dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Indeks Layanan Publik 2022-2025

| Indikator Kinerja | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Nilai Minimal Indeks Layanan Publik | 4,3 | 4,56 | 4,35 | 4,84 | 4,4 | 4,86 | 4,62 | 4,95 |

Tabel 36 Realisasi Indeks Pelayanan Publik Satker di Bawah BSKJI

| Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik | Capaian |
|---|-------------|
| BBSPJIKFK | 4,55 |
| BBSPJIA | 4,35 |
| BBSPJIKMN | 4,7 |
| BBSPJIT | 4,66 |
| BBSPJIBBT | 4,12 |
| BBSPJIS | 4,22 |
| BBSPJILM | 4,45 |
| BBSPJIKKP | 4,23 |
| BBSPJIKB | 4,23 |
| BBSPJIPPI | 4,95 |
| BBSPJIHPMM | 4,71 |
| BSPJI Aceh | 4,78 |
| BSPJI Medan | 4,38 |
| BSPJI Padang | 4,55 |
| BSPJI Palembang | 4,82 |
| BSPJI Lampung | 4,12 |

| | |
|------------------|------|
| BSPJI Surabaya | 4,57 |
| BSPJI Pontianak | 4,58 |
| BSPJI Banjarbaru | 4,91 |
| BSPJI Samarinda | 4,73 |
| BSPJI Manado | 4,14 |
| BSPJI Ambon | 4,24 |
| BSPJI Jakarta | 3,68 |
| BSPJI Pekanbaru | 4,53 |

Realisasi indikator kinerja Nilai Minimal Indeks Layanan Publik selalu melebihi target. Untuk capaian selalu mengalami peningkatan di setiap tahun.

Jika dibandingkan capaian satker di bawah BSKJI, capaian indeks pelayanan publik BBSPJPPI tertinggi.

Analisa penyebab keberhasilan :

Komitmen dari Kepala BBSPJPPI agar meningkatkan layanan yang berbasis online sehingga lebih memudahkan pelanggan untuk menggunakan jasa BBSPJPPI dan dapat menjangkau pangsa pasar yang luas.

Pengembangan layanan online melalui peningkatan platform SINDi yang selalu diupgrade setiap tahun.

c. Kendala

Kesulitan memutakhirkan data SP4N Lapor dan SIPPN karena adanya kendala akses ke akun yang disediakan.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum ada solusi untuk mengatasi aplikasi akun SP4NLapor dan SIPPN yang sering *error*.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah mengecek berkala terhadap akun SP4NLapor dan SIPPN supaya bisa memutakhirkan data ketika aplikasi sedang tidak *error*.

V. Sasaran Kegiatan V : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tabel 37 Capaian Sasaran Kinerja V

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|---|----------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 4 |
| 1 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 60 Persen | 100 Persen | 166,67 % |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 70,10 nilai | 86,47 nilai | 123,35 % |

1. Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus :

$$A = \frac{(B+C)}{2}$$

2

A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)

C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah 100% dari target 60% dengan capaian 166,67% . Berdasarkan surat dari inspektorat jenderal Nomor R/180/IJ-IND/PW/X/2025 tanggal 31 Oktober terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal pada satker BBSPJPI Tahun anggaran 2024 dapat dinyatakan selesai sesuai dengan saran yang telah ditindaklanjuti.

b. Analisa Hasil

Tabel 38. Target dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker 2022 - 2025

| Indikator Kinerja | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 92 | 100 | 92.5 | 100 | 93 | 100 | 60 | 100 |

Tabel 39 Perbandingan Capaian Antar Satker di Bawah BSKJI

| Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker | Capaian |
|--|---------|
| BBSPJIKFK | 100 |
| BBSPJIA | 100 |

| | |
|------------------|------------|
| BBSPJIKMN | 100 |
| BBSPJIT | 100 |
| BBSPJIBBT | 43,33 |
| BBSPJIS | 100 |
| BBSPJILM | 60 |
| BBSPJIKKP | 100 |
| BBSPJIKB | 100 |
| BBSPJIPPI | 100 |
| BBSPJIHPMM | 100 |
| BSPJI Aceh | 100 |
| BSPJI Medan | 100 |
| BSPJI Padang | 60 |
| BSPJI Palembang | 100 |
| BSPJI Lampung | 100 |
| BSPJI Surabaya | 100 |
| BSPJI Pontianak | 100 |
| BSPJI Banjarbaru | 60 |
| BSPJI Samarinda | 100 |
| BSPJI Manado | 100 |
| BSPJI Ambon | 100 |
| BSPJI Jakarta | 100 |
| BSPJI Pekanbaru | 100 |

Dari Tabel 39, didapat bahwa realisasi Indikator Kinerja” Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker “ dari Tahun 2022-2025 selalu mencapai target dan semua hasil audit terselesaikan dengan tuntas (100 %). Ini merupakan komitmen dari BBSPJPPI setiap tahun untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil rekomendasi pengawasan internal dari Inspektorat Jenderal Kemenperin.

Analisis penyebab keberhasilan

Terkait hasil audit kinerja, menindaklanjuti atas rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal telah dilakukan penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2024 Pada Satker BBSPJPI dimana didalamnya memuat penanggung jawab untuk masing-masing hasil temuan berikut timeline batas waktu penyampaian tindak lanjut atas hasil temuan. Dalam hal ini masing-masing penanggung jawab telah berkomitmen menyampaikan hasil temuan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Selain itu koordinasi intensif dengan bagian tindak lanjut pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin beserta Tim Auditor terkait penyampaian bukti tindak lanjut hasil pengawasan turut berperan dalam penyelesaian hasil temuan.

c. Kendala

Tidak ada kendala

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi hasil pengawasan pada satker BBSPJPI telah ditindaklanjuti dan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa bukti dukung yang disampaikan mendekati batas waktu tindak lanjut serta masih terdapat bukti dukung yang belum sesuai rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- 1] Pengoptimalan waktu klarifikasi draft hasil pengawasan dengan Tim Auditor Itjen untuk memastikan point terkait temuan dan tindak lanjut yang direkomendasikan
- 2] Rapat berkala dengan Pj. Kegiatan/ Ka.Tim Kerja/ Pengelolala Keuangan dan BMN untuk memonitoring penyelesaian tindak lanjut sesuai timeline rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan yang disepakati.

2. Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan).

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Tiap unit kerja dilakukan penilaian sesuai dengan kategori unitnya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.

Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) sebesar 86,47 dari target 70,10 dengan capaian 123,35%. Hasil nilai sesuai Nota Dinas Kepala Biro Umum No. 855 /SJ-IND.6/KR/ XII/2025. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2025.

b. Analisa Hasil

**Tabel 40, Capaian Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal
Unit Kearsipan Antar Satker di Bawah BSKJI**

| Indikator Kinerja nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal unit kearsipan | Capaian |
|---|----------------|
| BBSPJIKFK | 89,40 |
| BBSPJIA | 89,50 |
| BBSPJIKMN | 93,67 |
| BBSPJIT | 91,50 |
| BBSPJIBBT | 93,00 |
| BBSPJIS | 92,90 |
| BBSPJILM | 86,20 |
| BBSPJIKKP | 95,77 |
| BBSPJIKB | 97,00 |
| BBSPJIPPI | 86,47 |
| BBSPJIHPMM | 91,60 |
| BSPJI Aceh | 91,00 |
| BSPJI Medan | 75,67 |
| BSPJI Padang | 86,20 |
| BSPJI Palembang | 93,97 |
| BSPJI Lampung | 84,80 |
| BSPJI Surabaya | 82,83 |
| BSPJI Pontianak | 81,47 |
| BSPJI Banjarbaru | 91,60 |
| BSPJI Samarinda | 100 |
| BSPJI Manado | 97,60 |
| BSPJI Ambon | 72,10 |
| BSPJI Jakarta | 94,27 |
| BSPJI Pekanbaru | 93,97 |

Dari capaian tabel di atas, nilai indikator kinerja BBSPJPI masih dalam kategori baik.

Analisa keberhasilan

Dukungan dari manajemen serta partisipasi pegawai yang bertanggungjawab untuk pengarsipkan dokumen di lingkup kerja masing masing, termasuk pengunggahan ke dalam aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari proses digitalisasi, serta penambahan pesonil pada tim kearsipan, telah membuat kinerja tim lebih solid

c. Kendala

Nilai hasil pengawasan kearsipan mengalami penurunan dibanding tahun lalu, dikarenakan :

- 1). Ada penambahan indikator penilaian seperti tingkat digitalisasi.
- 2). Perbedaan pada indikator cara penilaian kearsipan.
- 3). TTE yang diakui hanya yang melalui aplikasi SRIKANDI.
- 4). Selama ini surat keluar dikelola oleh bagian masing-masing dan tidak disampaikan ke arsiparis sehingga sangat terbatas surat keluar yang diupload & dikirim melalui SRIKANDI

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJPI telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya adalah koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPI.

VI. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 41 Capaian capaian sasaran kegiatan VI

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| 1 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 79,45 nilai | 83,60 | 105,22 |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | 93,40 nilai | 90,92 | 97,34% |
| | | 3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | 75 nilai | 94,75 nilai | 126,33 % |

1. Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capainya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker sebesar 83,60 dari target 79,45

nilai dengan capaian 105,22%. Hasil nilai berdasarkan LHE SAKIP BBSPJPI Nomor 09/IJ-IND.4/LHE/IV/2025 tanggal 9 April 2025. dengan kategori predikat Memuaskan (A) dengan penilaian terhadap komponen manajemen kinerja sbb:

1. Perencanaan Kinerja : 25,20
2. Pengukuran Kinerja : 26,10
3. Pelaporan Kinerja : 12,30
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 20,00

b. Analisa Hasil

Tabel 42. Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja 2022-2025

| Indikator Kinerja | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|-----------------------------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Nilai Minimal Akuntabilitas | 81 | 81,65 | 77 | 77,1 | 80 | 81,95 | 79,45 | 83,60 |

Dari table 43. Capaian Nilai Akuntabilitas kinerja Tahun 2022-2025 selalu melebihi target. Untuk capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 meningkat dibanding Tahun 2024 tetapi untuk capaian nilai minimal akuntabilitas kinerja tertinggi di Tahun 2025.

Tabel 43 , Capaian Nilai SAKIP Satker BSKJI

| Satker | Capaian |
|-----------|---------|
| BBSPJIKFK | 88,25 |
| BBSPJIA | 83,00 |
| BBSPJIKMN | 83,45 |
| BBSPJIT | 82,4 |
| BBSPJIBBT | 87,35 |
| BBSPJIS | 81,5 |
| BBSPJILM | 83 |
| BBSPJIKKP | 85,1 |

| | |
|------------------|--------------|
| BBSPJIKB | 84,20 |
| BBSPJIPPI | 83,60 |
| BBSPJIHPMM | 83,9 |
| BSPJI Aceh | 86 |
| BSPJI Medan | 81,5 |
| BSPJI Padang | 86,6 |
| BSPJI Palembang | 85,4 |
| BSPJI Lampung | 80,30 |
| BSPJI Surabaya | 86,75 |
| BSPJI Pontianak | 84,5 |
| BSPJI Banjarbaru | 86 |
| BSPJI Samarinda | 85,4 |
| BSPJI Manado | 82,7 |
| BSPJI Ambon | 82,10 |
| BSPJI Jakarta | 85,10 |
| BSPJI Pekanbaru | 84,50 |

Analisa penyebab keberhasilan:

- 1) Dokumen rencana kinerja anggaran yang disusun lengkap serta selaras dengan Renstra satker dan Renstra Unit Eselon I.
- 2) Laporan akuntabilitas kinerja yang memuat evaluasi kinerja telah disusun secara akurat dan disampaikan secara tepat waktu.
- 3) Komitmen pimpinan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk mendukung peningkatan kinerja satker.

c. Kendala

Terdapat perbedaan pelaporan capaian data kinerja layanan pada masing-masing Tim Kerja.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah secara umum implementasi SAKIP pada BBSPJPI sudah berjalan diantaranya melalui penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja secara berkala yang disampaikan secara tepat waktu. Namun dalam proses pengukuran kinerja untuk pengumpulan data kinerja belum secara optimal memanfaatkan teknologi informasi yang secara otomatisasi mampu memantau capaian seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- 1] Pemantauan rencana aksi secara periodik setiap bulannya dengan didukung dokumentasi yang memadai.
- 2] Koordinasi lebih lanjut dengan Pokja Informasi dan Digitalisasi untuk pengembangan dashboard kinerja dan otomatisasi pengukuran kinerja untuk seluruh indikator kinerja

2. Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal IKPA

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian nilai IKP sebesar 90,92 dari target 93,40 nilai dengan capaian 97,34% (tidak mencapai target). Data diambil

dari OMSPAN. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada perjanjian kinerja 2025.

b. Analisa Hasil

Tabel 44, Perbandingan Capaian Nilai IKPA Antar Satker BSKJI

| Satker | Capaian |
|------------------|--------------|
| BBSPJIKFK | 94,76 |
| BBSPJIA | 100 |
| BBSPJIKMN | 94,41 |
| BBSPJIT | 97,14 |
| BBSPJIBBT | 92,52 |
| BBSPJIS | 94 |
| BBSPJILM | 95,28 |
| BBSPJIKKP | 94,76 |
| BBSPJIKB | 95,52 |
| BBSPJIPPI | 90,92 |
| BBSPJIHPMM | 98,36 |
| BSPJI Aceh | 97,46 |
| BSPJI Medan | 96,22 |
| BSPJI Padang | 95,89 |
| BSPJI Palembang | 100 |
| BSPJI Lampung | 95,47 |
| BSPJI Surabaya | 98,61 |
| BSPJI Pontianak | 97,8 |
| BSPJI Banjarbaru | 91,3 |
| BSPJI Samarinda | 95,46 |
| BSPJI Manado | 96,32 |
| BSPJI Ambon | 91,19 |
| BSPJI Jakarta | 86,52 |
| BSPJI Pekanbaru | 96,94 |

Analisa Kegagalan

Ketidaktahuan Penanggung Jawab indikator kinerja IKPA dimana untuk mendaftarkan kontrak RM non inaproc maksimal di Triwulan II. Pada Tahun 2025, BBSPJPI mendaftarkan kontrak RM non *inaproc* mendekati akhir tahun sehingga nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak jelek/rendah. Dimana Nilai Belanja Kontraktual, di indikator IKPA hanya 50 dari 100 .

c. Kendala

- 1] Penambahan volume output RO saat revisi pergeseran anggaran dikarenakan penerapan kebijakan SBKK yang menyebabkan terdapat potensi capaian output yang tidak tercapai
- 2] Penolakan usulan revisi dikarenakan pada usulan revisi terdapat penambahan pagu perjalanan dinas untuk operasional layanan yang tidak sesuai dengan kebijakan pembatasan perjalanan dinas dalam masa efisiensi
- 3] Penyusunan rencana penarikan dana Tw IV yang kurang optimal dikarenakan terdapat revisi relaksasi dan revisi optimalisasi setelah proses pengajuan revisi pemutakhiran hal III DIPA Tw IV 2025 sehingga berpotensi masih terdapat penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.
- 4] Nilai Belanja Kontraktual, di indikator IKPA hanya 50 dari 100 .Hal ini dikarenakan BBSPJPI mendaftarkan kontrak RM non *inaproc* mendekati akhir tahun sehingga nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak jelek/rendah.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Untuk mendukung capaian kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan revisi anggaran secara berkala sesuai batas waktu penyampaian revisi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran. Namun demikian, perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana belum disusun secara akurat, dan belum konsisten direalisasikan.

Mendaftarkan kontrak RM sebagai nilai belanja kontraktual di awal tahun berjalan.

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya diantaranya:

- Melakukan reviu pelaksanaan kegiatan serta prognosis penyerapan anggaran secara periodik, setidaknya 1 kali dalam 1 triwulan.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang optimal dengan BSKJI untuk pelaksanaan revisi terpusat yang bersamaan dengan jadwal revisi pemutakhiran hal III DIPA.
- Batas terakhir mendaftarkan kontrak RM sebelum triwulan II tahun berjalan.

3. Indikator Kinerja Sasaran 6.3 : Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.

| Tingkat Satuan Kerja | |
|---|------------------|
| Komponen Penilaian | Bobot (%) |
| 1. Kesesuaian dengan SAP | 24% |
| 2. Kecukupan Informasi | 53,5% |
| 3. Efektivitas Pengendalian Internal | 9% |
| 4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan | 13,5% |
| Jumlah | 100% |

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah hasil penilaian dan analisis laporan keuangan tercapai dengan nilai 94,75 dari target nilai sebesar 75 dengan capaian 126,33. Hal ini sesuai Nota Dinas Sekretaris BSKJI Nomor 3970/BSKJI.1/KU/IX/2025 tanggal 18 September 2025 perihal penyampaian hasil penilaian laporan keuangan tingkat satker Tahun Anggaran 2024.

b. Analisa Hasil

**Tabel 45. Capaian Indikator Kinerja Nilai Minimal Laporan Keuangan
2022-2025**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Indikasi Capaian | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----|------|----|------|------|------|-------|
| | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Penguatan Akuntabilitas Organisasi | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | 91 | 97 | 92 | 98 | 93 | 99,9 | 75 | 94,75 |

Dari Tabel 45. Capaian Penilaian dan Analisis Keuangan setiap tahun selalu memenuhi target. Untuk capaian Nilai Laporan Keuangan Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dimana nilai tertinggi terdapat di tahun 2024.

**Tabel 46, Perbandingan Capaian Capaian Penilaian dan Analisis
Keuangan Antar Satker BSKJI**

| Satker | Capaian |
|------------------|--------------|
| BBSPJIKFK | 93,25 |
| BBSPJIA | 93,00 |
| BBSPJIKMN | 90,25 |
| BBSPJIT | 92,00 |
| BBSPJIBBT | 91,00 |
| BBSPJIS | 95,00 |
| BBSPJILM | 92,50 |
| BBSPJIKKP | 94,00 |
| BBSPJIKB | 95,00 |
| BBSPJIPPI | 94,75 |

| | |
|------------------|-------|
| BBSPJIHPMM | 96,00 |
| BSPJI Aceh | 96,50 |
| BSPJI Medan | 95,90 |
| BSPJI Padang | 88,25 |
| BSPJI Palembang | 95,00 |
| BSPJI Lampung | 93,40 |
| BSPJI Surabaya | 96,75 |
| BSPJI Pontianak | 95,75 |
| BSPJI Banjarbaru | 97,00 |
| BSPJI Samarinda | 92,00 |
| BSPJI Manado | 88,55 |
| BSPJI Ambon | 94,25 |
| BSPJI Jakarta | 87,00 |
| BSPJI Pekanbaru | 92,25 |

Dibandingkan capaian BBSPJPI dengan satker lain masih tergolong baik.

Analisa penyebab keberhasilan

Keberhasilan nilai laporan keuangan ini dikarenakan laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan dengan memperhatikan rekomendasi perbaikan laporan keuangan yang disampaikan Itjen pada saat pelaksanaan review laporan keuangan

c. Kendala

Ketidaksiapan dokumen arsip dan data keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan audit PIPK maupun BPK tahun berjalan.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen arsip dan data keuangan harus sudah lengkap dikarenakan pemeriksaan terkadang waktu pemberitahuannya singkat.

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya diantaranya:

- Menempatkan salah satu atau beberapa pegawai untuk merapikan, melengkapi dan melakukan scan dokumen arsip keuangan dengan rutin dengan mempertimbangan jumlah berkas keuangan yang dihasilkan dalam setahun.
- Menyiapkan data keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit dengan mempertimbangkan data keuangan yang dibutuhkan pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya.

VII. Sasaran Kegiatan VII : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Tabel 47 Capaian Sasaran Kinerja VII

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|---|--------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | 81 % | 89,79 % | 110,85% |

1. Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementrian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama ada 14 akun

meliputi akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 5251112, 5251113, dan 5251153.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (RP3DN) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$$

Ket

RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin

RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN

TotRA: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun terpilih.

a. Capaian Kinerja

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah capaian persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah sebesar 89,79 % dari target 81 persen dengan capaian 110,85 %. Hal ini berdasarkan Nota Dinas nomor 4/SJ-IND.8/PR/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kementerian Perindustrian.

b. Analisa Hasil

Tabel 48. Perhitungan TKDN sesuai Aplikasi LKPP

| Total Perencanaan | Jumlah Paket | Total Perencanaan PDN | Komitmen PDN terhadap Perencanaan Belanja |
|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| Rp.16.563.844.305 | 113 | Rp. 14.872.505.108 | 89,79 % |

**Tabel 49. Target dan Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2022-2025**

| Indikator Kinerja | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|
| | T | R | T | R | T | R | T | R |
| Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa | 58 | 88,11 | 62 | 94,49 | 65 | 37,5 | 81 | 89,79 |

Tabel 50, Perbandingan Capaian Dengan Satker di Bawah BSKJI

| Satker | Capaian |
|------------------|--------------|
| BBSPJIKFK | 66,15 |
| BBSPJIA | 71,84 |
| BBSPJIKMN | 96,80 |
| BBSPJIT | 94,08 |
| BBSPJIBBT | 94,97 |
| BBSPJIS | 89,00 |
| BBSPJILM | 97,20 |
| BBSPJIKKP | 73,37 |
| BBSPJIKB | 93,03 |
| BBSPJIPPI | 89,79 |
| BBSPJIHPMM | 92,83 |
| BSPJI Aceh | 96,88 |
| BSPJI Medan | 76,87 |
| BSPJI Padang | 100 |
| BSPJI Palembang | 95,03 |
| BSPJI Lampung | 79,15 |
| BSPJI Surabaya | 69,22 |
| BSPJI Pontianak | 97,89 |

| | |
|------------------|-------|
| BSPJI Banjarbaru | 70,30 |
| BSPJI Samarinda | 80,65 |
| BSPJI Manado | 98,57 |
| BSPJI Ambon | 89,52 |
| BSPJI Jakarta | 94,88 |
| BSPJI Pekanbaru | 98,62 |

Analisa Keberhasilan Capaian

Komitmen dari Kepala Balai dan tim pengadaan untuk mengutamakan pembelian barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN

c. Kendala

- Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri.
- Kebutuhan langganan aplikasi berbayar dari luar negeri (zoom).
- Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi nilai TKDN.

d. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah saat ini masih terkendala dengan adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi anggaran TA 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN.
- Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

3.1.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA BALAI TA 2025-2029

Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Strategis TA 2025-2029 yang dilaksanakan TA 2025.

Capaian kinerja yang dapat terrealisasi dapat dilihat tabel 51 sebagai berikut :

Tabel 51 Realisasi Kinerja Renstra Satker BBSPJPI TA. 2025-2029

| Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja | Satuan | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL 2025-2029 | | |
|--|---|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Targe t Renst ra | Realis asi | % | Targe t Renst ra | Targe t Renst ra | Targe t Renst ra | Targe t Renst ra | Total Targe t Renst ra | Realis asi sd 2025 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TJ Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | | | | | | | | | | | |
| TJ 1 <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i> | indeks | 3,68 | 3,70 | 100,5 4% | 3,68 | 3,69 | 3,69 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 100,0 0% |
| TJ 2 <i>Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri</i> | Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 960 | 1063 | 110,7 3% | <i>990</i> | <i>1020</i> | <i>1060</i> | <i>1080</i> | 1080 | 1063 | 98,43 % |
| SK1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 <i>Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)</i> | Persen | <i>88,00</i> | <i>94,23</i> | 107,0 8% | <i>88,5</i> | <i>89,0</i> | <i>89,5</i> | <i>90,0</i> | 90 | 94,23 | 104,7 0% |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| IKK 2 | Nilai Net Promoter Score (NPS) | Nilai | 40 | 63 | 157,5 0% | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 63 | 143,1 8% |
| SK2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | indeks | 3 | 3 | 100,0 0% | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75,00 % |
| IKK 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | Hasil Layanan | 7500 | 8574 | 114,3 2% | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 41700 | 8574 | 20,56 % |
| IKK 3 | Nilai Revenue on Asset (RoA) | Persen | 14,50 | 15,90 | 109,6 6% | 14,60 | 14,70 | 14,75 | 14,80 | 14,8 | 15,9 | 107,4 3% |
| IKK 4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | Persen | 59,00 | 61,46 | 104,1 7% | 60 | 61 | 63 | 65 | 65 | 61,46 | 94,55 % |
| SK3 Terwujudnya SDM yang profesional | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | indeks | 81,30 | 83,43 | 102,6 2% | 81,40 | 81,50 | 81,60 | 81,70 | 81,7 | 83,43 | 102,1 2% |
| SK4 Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | Persen | 20,00 | 20,00 | 100,0 0% | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 20 | 20,00 % |
| IKK 2 | Tingkat Penerapan (SPBE) | Persen | 77,00 | 88,81 | 115,3 4% | 78 | 80 | 83 | 85 | 85 | 88,81 | 104,4 8% |
| IKK 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 4,62 | 4,95 | 107,1 4% | 4,64 | 4,66 | 4,68 | 4,70 | 4,7 | 4,95 | 105,3 2% |
| SK5 Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|--------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------------------|
| IKK 1 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | Persen | 60,00 | 100,00 | 166,6 7% | 62 | 65 | 67 | 70 | 70 | 100 | 142,8 6% |
| IKK 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | Nilai | 70,10 | 86,47 | 123,3 5% | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | 86,47 | 105,4 5% |
| SK6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | Nilai | 79,45 | 83,60 | 105,2 2% | 79,45 | 79,70 | 79,70 | 80,00 | 80 | 83,6 | 104,5 0% |
| IKK 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | Nilai | 93,40 | 90,92 | 97,34 % | 93,40 | 94,00 | 94,00 | 94,50 | 94,5 | 90,92 | 96,21 % |
| IKK 3 | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | Nilai | 75,00 | 94,75 | 126,3 3% | 75,25 | 75,50 | 75,75 | 76,00 | 76 | 94,75 | 124,6 7% |
| SK7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | Persen | 81,00 | 89,79 | 110,8 5% | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 89,79 | 109,5 0% |
| | | | | | | | | | | | | |

1. Hasil yang telah dicapai

Secara umum realisasi tahun berjalan telah tercapai sesuai dengan target yang ada pada Renstra. Selama kurun waktu satu tahun ini bila dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target pada TA 2025 yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai SLA
- Nilai *Net Promotor Score* (NPS)
- Nilai *Revenue on Asset* (RoA)
- Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
- Tingkat Penerapan (SPBE)
- Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
- Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
- Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan
- Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker.
- Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Sedangkan indikator kinerja yang tidak mencapai sasaran adalah

- Nilai minimal indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Pada umumnya semua realisasi indikator kinerja sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan setiap tim kerja berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam menjalankan target yang sudah diberikan kepada masing-masing tim kerja. Koordinasi yang baik dari semua pegawai dalam mendukung dan menjalankan pekerjaannya dengan profesional dan efektif.

Monitoring setiap 3 bulan dari pimpinan sebagai pemegang manajemen puncak menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap capaian kinerja. Dalam hal ini dapat memberikan alternatif solusi dan pemecahan masalah dalam pencapaian kinerja tersebut.

3. Kendala

Pada umumnya total realisasi 2025-2029 berjalan sesuai dengan target yang ada pada Renstra sehingga tidak ada kendala dalam pencapaiannya. Dimana indikator dengan satuan persen, indeks dan nilai tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah

4. Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan realisasi target jangka menengah semua target diperkirakan dapat tercapai pada akhir periode Renstra TA 2025-2029.

Dengan memperhatikan realisasi tersebut agar realisasi pada periode Renstra 2025-2029 dapat lebih baik. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar semua target dapat terealisasi adalah

- Komitmen dan perhatian dari pimpinan puncak serta manajemen dalam memastikan capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala.
- Menjaga komitmen dan tanggungjawab BBSPJPI dengan pelanggan sesuai dengan SPK/Kontrak/Penawaran yang disepakati.
- Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan dalam menangani keluhan dan pertanyaan dari pelanggan.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi melalui aplikasi SINDII dalam proses pemberian layanan dan monitoring kinerja sehingga kinerja layanan dan perkantoran dapat berjalan efektif dan efisien.
- Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang kemudahan informasi baik kepada pelanggan maupun secara internal.

- Mengupdate dan mengarsip data dari masing-masing tim kerja dengan baik dan terdokumentasi.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan

1. Hasil yang telah dicapai

Adapun kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2025, realisasi anggaran BBSPJPI mencapai sebesar Rp 35.173.183.417, atau 99,014% dari total pagu efektif anggaran DIPA TA 2025 revisi terakhir. Realisasi tersebut terdiri atas penyerapan anggaran dari sumber Rupiah Murni sebesar Rp17.335.122.831 atau 99,45%, serta dari sumber PNBPN sebesar Rp17.838.060.586 atau 98,59%.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai (51) sebesar Rp. 16.410.353.467,- ; belanja barang (52) sebesar Rp. 16.569.981.938,- dan belanja modal sebesar Rp. 2.192.848.012,- . Pada tahun 2025 terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 4.942.674.000,- pada belanja barang Rp. 2.191.209.000,- dan belanja modal Rp. 2.751.465.000,-. Adapun realisasi anggaran BBSPJPI per komponen/subkomponen dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 52. Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2025

| Kegiatan/Komponen/ Subkomponen | | Pagu Total | Realisasi | %Dari Pagu Total | Pagu Blokir | Pagu Efektif | Realisasi Dari Pagu Efektif (%) |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | | | | | | | |
| 1 | AEF Sosialisasi dan Diseminasi | Rp 662.447.000 | Rp 413.063.328 | 62,35% | Rp 227.537.000 | Rp 434.910.000 | 94,98% |
| 2 | BAD Pelayanan Publik kepada industri | Rp 11.171.188.000 | Rp 10.803.165.707 | 96,71% | Rp 214.882.000 | Rp 10.956.306.000 | 98,60% |
| 3 | CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | Rp 3.614.415.000 | Rp 2.017.886.616 | 55,83% | Rp 1.593.525.000 | Rp 2.020.890.000 | 99,85% |
| 4 | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | Rp 22.582.166.000 | Rp 21.158.036.182 | 93,69% | Rp 1.290.876.000 | Rp 21.291.290.000 | 99,37% |
| 5 | EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Rp 1.474.826.000 | Rp 201.501.496 | 13,66% | Rp 1.273.091.000 | Rp 201.735.000 | 99,88% |
| 6 | EBC Layanan Manajemen SDM Internal | Rp 712.284.000 | Rp 412.159.753 | 57,86% | Rp 294.006.000 | Rp 418.278.000 | 98,54% |
| 7 | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | Rp 248.637.000 | Rp 167.370.335 | 67,32% | Rp 48.757.000 | Rp 199.880.000 | 83,74% |
| Total | | Rp 40.465.963.000 | Rp 35.173.183.417 | 86,92% | Rp 4.942.674.000 | Rp35.523.289.000 | 99,01% |

Pada awal TA 2025 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk realisasi anggaran kegiatan per Triwulan, seperti tampak pada tabel 53 di bawah

Tabel 53
Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan
Tahun 2025

| Kegiatan/Komponen/ Subkomponen | | Anggaran Pagu Efektif (Rp) | Output | Triwulan I (%) | | Triwulan II (%) | | Triwulan III (%) | | Triwulan IV (%) | | % Realisasi Ouput |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------|----------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|-----------------|--------|-----------------------|
| | | | | Keuangan | | Keuangan | | Keuangan | | Keuangan | | |
| | | | | T | R | T | R | T | R | T | R | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | | | | | | | | | | | |
| 1 | AEF Sosialisasi dan Diseminasi | Rp 434.910.000 | 200 Orang | 25 | 0 | 50 | 0 | 75 | 11,73 | 100 | 94,98% | 143% (286 orang) |
| 2 | BAD Pelayanan Publik kepada industri | Rp 10.956.306.000 | 799 Industri | 25 | 16,62 | 50 | 24,77 | 75 | 34,94 | 100 | 98,60% | 122,9% (982 industri) |
| 3 | CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan | Rp 2.020.890.000 | 45 Unit | 25 | 0 | 50 | 80,31 | 75 | 81,93 | 100 | 99,85% | 62,2% (28 unit) |
| WA | Program Dukungan Manajemen | | | | | | | | | | | |
| 1 | EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | Rp 21.291.290.000 | 3 Layanan | 25 | 9,6 | 50 | 25,2 | 75 | 39,68 | 100 | 99,37% | 100% (3 Layanan) |
| 2 | EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Rp 201.735.000 | 91 Unit | 25 | 0 | 50 | 64,45 | 75 | 97,61 | 100 | 99,88% | 45,05 % (41 unit) |
| 3 | EBC Layanan Manajemen SDM Internal | Rp 418.278.000 | 162 Orang | 25 | 0 | 50 | 6,93 | 75 | 25,15 | 100 | 98,54% | 151,9 % (246 orang) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|-------------|--|----|---|----|------|----|-------|-----|--------|---------------------|
| 4 | EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | Rp | 199.880.000 | 8 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi | 25 | 0 | 50 | 19,3 | 75 | 23,97 | 100 | 83,74% | 100% (8 dokumen) |
|---|--|----|-------------|--|----|---|----|------|----|-------|-----|--------|---------------------|

Tabel 54 Realisasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja

| Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|---|-----------|---------|-----------------------|---|-----------|---------|-----------|
| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Komponen/ Subkomponen | Anggaran | | | |
| | | | | | | | | Pagu Efektif | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| TJ | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 3,68 | 3,7 | 100,54 | -Sosialisasi Layanan Jasa Teknis -Pengelolaan Data dan Informasi | Rp - | Rp - | 0,00 % |
| | | 2 | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri | Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 960 | 1063 | 110,73 | Publikasi Layanan Jasa Teknis | Rp - | Rp - | 0,00 % |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|--------|----|-------|--------|--|---------------------|---------------------|------------|
| SK. 1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1 | Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | Persen | 88 | 94,23 | 107,08 | Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan | Rp 2.020.890.000 | Rp 2.017.886.616 | 99,85 % |
| | | 2 | Nilai Net Promoter Score (NPS) | Nilai | 40 | 63 | 157,50 | Sosialisasi Layanan Jasa Teknis | Rp 186.209.000 | Rp 174.143.783 | 93,52 % |
| SK. 2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1 | Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Indeks | 3 | 3 | 100,00 | a. Publikasi layanan jasa teknis b. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium pengujian. c. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium kalibrasi. d. Akreditasi/surveilance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan lembaga sertifikasi e. Pengembangan kelembagaan jaminan produk halal f. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan lembaga verifikasi. g. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan uji profesiensi h. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan produsen bahan acuan. | Rp 379.244.000 | Rp 369.462.545 | 97,42 % |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|-------|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | Hasil Layanan | 7.500 | 8574 | 114,32 | a. Jasa pelayanan teknis pengujian. b. Jasa pelayanan teknis kalibrasi c. Jasa pelayanan teknis sertifikasi d. Jasa pelayanan Bimtek e. Jasa Optek f. Penyelenggaraan lembaga pemeriksa halal g. Jasa pelayanan verifikasi h. Jasa pelayanan teknis uji profisiensi i. Jasa pelayanan prdusen bahan acuan j. Gaji dan tunjangan | Rp 27.326.883.000,00 | Rp 27.082.976.174,00 | 99,11 % |
| | | 3 | Nilai Revenue on Asset (RoA) | Persen | 14,5 | 15,9 | 109,66 | a. Pengadaan kendaraan bermotor b. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan c. Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan* d. Pengadaan perangkat TIK* e. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga* f. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran* | | | 0% |
| | | 4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | Persen | 59 | 61,46 | 104,17 | a. Jasa pelayanan teknis pengujian* b. Jasa pelayanan teknis kalibrasi* c. Jasa pelayanan teknis sertifikasi* d. Jasa pelayanan Bimtek* e. Jasa Optek* f. Penyelenggaraan lembaga pemeriksa halal* g. Jasa pelayanan verifikasi* h. Jasa pelayanan teknis uji profisiensi* i. Jasa pelayanan prdusen bahan acuan* | | | |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--------|------|-------|--------|--|---------------------|---------------------|------------|
| SK. 3 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1 | Indeks Profesional itas ASN (IPASN) | Indeks | 81,3 | 83,43 | 102,62 | a. Pengelolaan/manajemen SDM b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM | Rp 418.278.000 | Rp 412.159.753 | 98,54 % |
| SK. 4 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik | 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | Persen | 20 | 20 | 100,00 | Pengelolaan data dan informasi* | | | |
| | | 2 | Tingkat Penerapan (SPBE) | Persen | 77 | 88,81 | 115,34 | a. Pengelolaan data dan informasi b. Pengadaan perangkat TIK | Rp 103.528.000 | Rp 98.097.414 | 94,75 % |
| | | 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 4,62 | 4,95 | 107,14 | a. Operasional perkantoran dan pemeliharaan b. pelaksanaan reformasi birokrasi/Zona Integritas/SPIP | Rp 4.627.465.000 | Rp 4.597.936.784 | 99,36 % |
| SK. 5 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | Persen | 60 | 100 | 166,67 | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi * | | | |
| | | 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal | Nilai | 70,1 | 86,47 | 123,35 | Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga | Rp 65.292.000 | Rp 56.087.916 | 85,90 % |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--------|-------|-------|--------|---|----------------|----------------|---------|
| | | | (Unit Kearsipan) | | | | | | | | |
| SK. 6 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | Nilai | 79,45 | 83,6 | 105,22 | a. Penyusunan program dan kegiatan satker. b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi | Rp 89.967.000 | Rp 59.788.126 | 66,46 % |
| | | 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | Nilai | 93,4 | 90,92 | 97,34 | a. Pengelolaan keuangan b. Penyusunan program dan kegiatan satker | Rp 103.798.000 | Rp 103.142.810 | 99,37 % |
| | | 3 | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | Nilai | 75 | 94,75 | 126,33 | 'Pengelolaan keuangan * | | | |
| SK. 7 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah | Persen | 81 | 89,79 | 120,38 | a. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran. b. Pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan* c. Operasional perkantoran* d. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi*. e. Pengadaan perangkat TIK* f. Pengadaan kendaraan bermotor* g. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan*. h. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga*. | Rp 201.735.000 | Rp 201.501.496 | 99,88 % |

Realisasi keuangan dari tiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
 - 1) Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 0 %
 - 2) Indikator Kinerja Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri 0 %
2. Sasaran Kegiatan (SK1) : Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
 - 1) Indikator Kinerja Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) sebesar 99,85%
 - 2) Indikator Kinerja Nilai Net Promoter Score (NPS) sebesar 93,52%
3. Sasaran Kegiatan (SK2) : Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
 - 1) Indikator Kinerja Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 97,42.
 - 2) Indikator Kinerja Jumlah hasil layanan jasa industri sebesar 99,11 %.
 - 3) Indikator Kinerja Nilai Revenue on Asset (RoA) sebesar 0%
 - 4) Indikator Kinerja Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) sebesar 0%.
4. Sasaran kegiatan (SK3) : Terwujudnya SDM yang profesional
 - 1) Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) sebesar 98,54%.
5. Sasaran Kegiatan (SK4) : Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik
 - 1) Indikator Kinerja Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI sebesar 0%.
 - 2) Indikator Kinerja Tingkat Penerapan (SPBE) sebesar 94,75%.
 - 3) Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 99,36%.
6. Sasaran Kegiatan (SK5) : Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien

- 1) Indikator Kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sebesar 0%.
- 2) Indikator Kinerja Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) sebesar 85,90%.
7. Sasaran Kegiatan (SK6) : Penguatan akuntabilitas organisasi
 - 1) Indikator Kinerja Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker sebesar 66,46%.
 - 2) Indikator Kinerja Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA sebesar 99,37%.
 - 3) Indikator Kinerja Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan sebesar 0%.
8. Sasaran Kegiatan (SK7) : Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri
 - 1) Indikator Kinerja Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebesar 99,88%.

Realisasi keuangan tertinggi pada indikator kinerja Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebesar 99,88%. Sedangkan realisasi keuangan terendah berada pada indikator kinerja Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker sebesar 66,46%.

2. Analisis hasil yang telah dicapai

Adapun kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2025 realisasi anggaran BBSPJPPI mencapai sebesar Rp 35.173.183.417, atau 99,01% dari total pagu efektif anggaran DIPA revisi terakhir. Realisasi tersebut terdiri atas penyerapan anggaran dari sumber Rupiah Murni sebesar Rp17.335.122.831 atau 99,45%, serta dari sumber PNBPNP sebesar Rp17.838.060.586 atau 98,59%. Capaian penyerapan anggaran tersebut belum tercapai apabila dibandingkan dengan usulan realisasi anggaran satker BBSPJPPI yang disampaikan kepada BSKJI, namun telah tercapai apabila dibandingkan dengan target realisasi anggaran BSKJI secara keseluruhan

Realisasi berdasarkan Renstra BBSPJPPI sesuai tabel 55 di bawah ini

Tabel 55 Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra Satker BBSPJPI TA. 2025-2029

| Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja | 2025 | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL 2025-2029 | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | Target Renstra (Rp) (000) | Pagu Efektif (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | Target Renstra (Rp) (000) | Target Renstra (Rp) (000) | Target Renstra (Rp) (000) | Target Renstra (Rp) (000) | Target Renstra (Rp) (000) | Pagu Efektif (Rp) (000) | Realisasi (Rp) (000) | Realisasi (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total | 36.159.131 | 35.523.289.000 | 35.173.183.417 | 99,01% | 40.185.000 | 42.690.000 | 44.686.000 | 46.526.000 | 210.246.131 | 35.523.289 | 35.173.183 | 1 |
| TJ 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | | | | | | | | | |
| TJ 2 | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri | | | | | | | | | | | |
| SK1 | Terwujudnya layanan jasa | 2.207.099.000 | 2.192.030.399 | 99,32% | | | | | | | | |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| industri yang profesional | | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | | 2.020.890.000 | 2.017.886.616 | 99,85% | 3.571.977 | 4.772.350 | 3.982.478 | 5.750.000 | | | | |
| IKK 2 | Nilai Net Promoter Score (NPS) | | 186.209.000 | 174.143.783 | 93,52% | 229.250 | 300.750 | 285.484 | 310.484 | | | | |
| SK2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | | | 27.706.127.000 | 27.452.438.719 | 99,08% | | | | | | | | |
| IKK 1 | Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | | 379.244.000 | 369.462.545 | 97,42% | 839.754 | 760.578 | 966.220 | 966.220 | | | | |
| IKK 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | | 27.326.883.000 | 27.082.976.174 | 99,11% | 28.389.357 | 28.586.768 | 32.059.690 | 32.053.882 | | | | |
| IKK 3 | Nilai Revenue on Asset (RoA) | | - | - | | 29.120 | 434.066 | 406.066 | 0 | | | | |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| IKK 4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | | - | - | | | | | | | | | |
| SK3 Terwujudnya SDM yang profesional | | | 418.278.000 | 412.159.753 | 98,54% | | | | | | | | |
| IKK 1 | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | | 418.278.000 | 412.159.753 | 98,54% | 606.123 | 691.898 | 496.462 | 577.406 | | | | |
| SK4 Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik | | | 4.730.993.000 | 4.696.034.198 | 99,26% | | | | | | | | |
| IKK 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | | - | - | 0,00% | | | | | | | | |
| IKK 2 | Tingkat Penerapan (SPBE) | | 103.528.000 | 98.097.414 | 94,75% | 538.128 | 689.259 | 424.496 | 470.996 | | | | |

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| IKK 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | | 4.627.465.000 | 4.597.936.784 | 99,36% | 5.002.102 | 5.299.193 | 5.216.162 | 5.416.270 | | | | |
| SK5 Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | | | 65.292.000 | 56.087.916 | 85,90% | | | | | | | | |
| IKK 1 | Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | | - | - | | | | | | | | | |
| IKK 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | | 65.292.000 | 56.087.916 | 85,90% | 353.624 | 358.096 | 374.824 | 374.824 | | | | |
| SK6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi | | | 193.765.000 | 162.930.936 | 84,09% | | | | | | | | |
| IKK 1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah | | 89.967.000 | 59.788.126 | 66,46% | 54.364 | 54.364 | 54.364 | 54.364 | | | | |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025

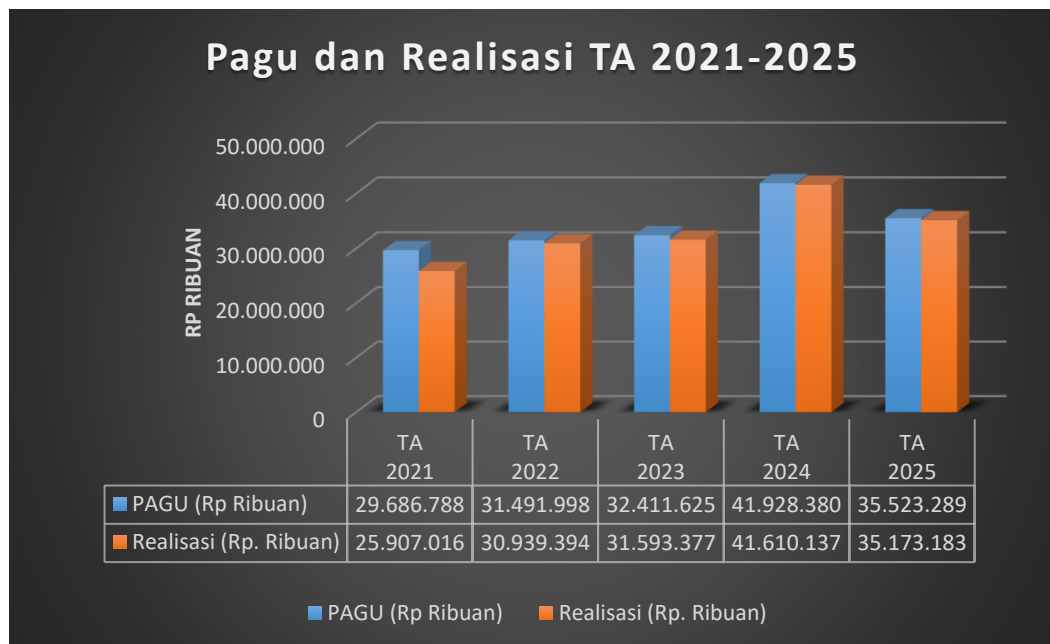


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | (SAKIP) Satker | | | | | | | | | | | | |
| IKK 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | | 103.798.000 | 103.142.810 | 99,37% | 158.048 | 148.048 | 153.048 | 158.048 | | | | |
| IKK 3 | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | | - | - | | | | | | | | | |
| <i>SK7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri</i> | | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah</i> | | 201.735.000 | 201.501.496 | 99,88% | 413.153 | 594.630 | 266.706 | 393.506 | | | | |

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 56. Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2021-2025

| | TA.2021 | TA.2022 | TA.2023 | TA. 2024 | TA. 2025 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PAGU | Rp29.686.788.000 | Rp31.491.998.000 | Rp32.411.625.000 | Rp41.928.380.000 | Rp35.523.289.000 |
| Realisasi | Rp25.907.016.415 | Rp30.939.394.417 | Rp31.593.377.867 | Rp41.610.137.000 | Rp35.173.183.417 |
| % Realisasi | 87,27 | 98,25 | 97,48 | 99,24 | 99,01 |



Grafik 3. Perkembangan Realisasi dan Pagu Anggaran TA. 2021– 2025

Berdasarkan data pada tabel dan gambar di atas, realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2025 secara nominal mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi anggaran mencapai Rp41.610.137.000 (99,24%), sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp35.173.183.417 (99,01).

Secara umum kondisi penyerapan anggaran tahun 2025 dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang telah diterapkan sejak awal Tahun Anggaran 2025. Efisiensi dilakukan melalui pengendalian belanja operasional, penyesuaian pelaksanaan kegiatan, serta

optimalisasi pemanfaatan sumber daya tanpa mengurangi pencapaian output dan outcome yang telah ditetapkan.

Meskipun secara nominal realisasi anggaran mengalami penurunan, tingkat penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2025 tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik, yaitu sebesar 99,01%. Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

3. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam realisasi keuangan TA 2025 adalah

- Masih adanya blokir terkait efisiensi belanja pada DIPA BBSPJPI TA 2025 utamanya terkait belanja modal (belanja mesin peralatan dan renovasi gedung), belanja perjalanan terkait kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa terkait operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- Perencanaan dan pemanfaatan anggaran penggunaan saldo awal kas yang kurang maksimal. Adanya perubahan penunjukan laboratorium subkontrak dan penyesuaian tarif biaya subkontrak pengujian yang berdampak pada berkurangnya kebutuhan anggaran pengujian subkontrak dibandingkan dengan perencanaan awal.
- Berkaitan dengan perjalanan dinas yang belum terserap optimal dikarenakan sebagian besar pelaksanaan kegiatan utamanya kegiatan layanan manajemen kinerja internal diselenggarakan secara online/daring.

Kendala TA 2024 yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2025 seperti tunggakan sewa kendaraan untuk biaya angkut peralatan dan limbah sudah terbayarkan melalui DIPA TA 2025.

4. Tindak Lanjut

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan kinerja kegiatan TA 2025 sebagai berikut :

- Masing-masing koordinator kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran
- Apabila diproyeksikan terdapat anggaran yang tidak terealisasi maka dilakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang membutuhkan tambahan alokasi anggaran.

- Terkait subkontrak pengujian, dilakukan perbandingan biaya dengan laboratorium pengujian lain. Selain itu, dilakukan pengembangan parameter yang selama ini disubkontrakkan agar pengujian dapat dilaksanakan secara mandiri di Laboratorium BBSPJPPI.

3.2.2 Realisasi Penerimaan PNBP

1) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2025, realisasi penerimaan PNBP periode 31 Desember 2025 memperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp. 20.483.355.953,- atau 109,62% dari target penerimaan PNBP yang sebesar Rp. 18.686.000.000,-.

Tabel 57. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2025

| Pagu | 2025 |
|-----------------------------|----------------|
| Target Penerimaan (Rp) | 18.686.000.000 |
| Realisasi Penerimaan (Rp) | 20.483.355.953 |
| Realisasi Penerimaan (%) | 109,62 |
| | |
| Pagu Penggunaan (Rp) | 18.092.346.000 |
| Realisasi Penggunaan (Rp) | 17.838.060.586 |
| Realisasi Penggunaan (%) | 98,59 |

Adapun tabel realisasi penerimaan per jenis layanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 58 Realisasi Penerimaan Per Jenis Layanan

| No | Jasa Layanan | Jumlah (Rp) | % dari total |
|----|---|----------------|--------------|
| 1 | Jasa Pelayanan Teknis Pengujian | 13.763.069.673 | 67,19 |
| 2 | Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi | 1.254.866.852 | 6,13 |
| 3 | Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi | 2.506.060.000 | 12,23 |
| 4 | Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis | 184.587.100 | 0,90 |
| 5 | Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri | 1.096.133.500 | 5,35 |

| | | | |
|----|---|---------------------------|------|
| 6 | Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Teknis | 1.237.909.000 | 6,04 |
| 7 | Penyelenggara Uji Profisiensi | 121.139.192 | 0,59 |
| 8 | Jasa Pemeriksaan Halal | 76.548.000 | 0,37 |
| 9 | Pendapatan sewa gedung & ruangan | 56.250.000 | 0,27 |
| 10 | Penerimaan lain-lain/Titipan | 96.594.622 | 0,47 |
| 11 | Jasa Giro BLU | 100.198.014 | 0,49 |
| | JUMLAH | Rp. 20.483.355.953 | |
| | TARGET | Rp. 18.686.000.000 | |
| | % REALISASI | 109,62 % | |

Berdasarkan data realisasi penerimaan jasa layanan tahun 2025, kontribusi atas capaian realisasi penerimaan tertinggi untuk lingkup jasa pelayanan teknis pengujian. sedangkan kontribusi penerimaan layanan terendah yaitu jasa pelayanan pemeriksaan halal. Dibandingkan penerimaan Tahun 2024, untuk capaian jasa pelayanan teknis kalibrasi dan jasa penyelenggara uji profisiensi mengalami peningkatan. Tetapi untuk jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis mengalami penurunan. Sementara ditinjau dari realisasi penggunaan, belanja yang bersumber dari sumber anggaran PNBPN tercatat sebesar 17.838.060.586,- (98,59%) dari pagu anggaran PNBPN tahun berjalan. Realisasi belanja PNBPN dipengaruhi oleh tingkat realisasi penerimaan PNBPN yang berasal dari realisasi pemberian jasa layanan pada tahun berjalan.

2) Analisis hasil yang telah dicapai

Rincian pagu dan realisasi keuangan PNBPN tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 59. Realisasi PNBPN 2021 - 2025

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Target Penerimaan (Rp.000) | 14.292.000 | 15.005.000 | 14.900.000 | 15.500.000 | 18.686.000 |
| Realisasi Penerimaan (Rp.000) | 10.475.231 | 14.809.403 | 16.283.712 | 18.418.270 | 20.483.355 |
| Realisasi Penerimaan (%) | 73,29 | 98,69 | 109,29 | 118,83 | 109,62 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pagu Penggunaan PNBP (Rp.000) | 13.773.243 | 15.005.000 | 14.900.000 | 19.656.347 | 18.092.346 |
| Realisasi Penggunaan (Rp.000) | 10.300.884 | 14.502.474 | 14.148.520 | 19.380.057 | 17.838.060 |
| Realisasi Penggunaan (%) | 98,33 | 97,92 | 94,96 | 98,59 | 98,59 |



Grafik 4. Target dan Penerimaan PNBP 2021 – 2025



Grafik 5. Pagu dan Penggunaan PNBP 2021-2025

Berdasarkan data diatas, selama periode 2021–2025 kinerja penerimaan PNBP menunjukkan tren yang meningkat dan semakin optimal. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan baru mencapai 73,29% dari target, namun pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan signifikan. Sejak tahun 2023 hingga 2025, realisasi penerimaan secara konsisten melampaui target, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 118,83%. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi sumber PNBP.

Dari sisi penggunaan PNBP, tingkat penyerapan anggaran selama periode tersebut tergolong sangat baik, dengan realisasi berada pada kisaran 94,96%–98,59%. Tingginya tingkat realisasi menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan penggunaan PNBP telah dilakukan secara efisien dan sesuai dengan pagu yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan PNBP menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, baik dari aspek penerimaan maupun penggunaan anggaran, serta mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Perbandingan realisasi penerimaan dan realisasi anggaran BBSPJPPI dengan realisasi penerimaan dan realisasi anggaran nasional dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 60. Perbandingan capaian BBSPJPPI dengan capaian Nasional

| | BBSPJPPI | Nasional |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Realisasi Penerimaan PNBP | 109,62 % | 104 % |
| Realisasi Anggaran | 99,01 % | 95,30 % |

Sumber data :

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Realisasi-Sementara-APBN-2025>

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja BBSPJPPI menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Realisasi penerimaan PNBP BBSPJPPI mencapai 109,62%, melampaui target yang ditetapkan dan lebih tinggi dibandingkan realisasi

nasional sebesar 104%. Hal ini mengindikasikan bahwa BBSPJPPI mampu mengoptimalkan potensi layanan jasa dan meningkatkan pendapatan di atas ekspektasi.

Sementara itu, realisasi anggaran BBSPJPPI sebesar 99,01% juga berada di atas capaian nasional yang tercatat sebesar 95,30%. Tingginya tingkat serapan anggaran ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan, sehingga hampir seluruh alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan BBSPJPPI, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, berada di atas rata-rata nasional dan mencerminkan tata kelola yang relatif lebih baik.

Tabel 61. Penerimaan PNBPN Sesuai Jasa Pelayanan Teknis TA 2021-2025

| No | Uraian | Penerimaan PNBPN (Rp. 000) | | | | |
|---------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pengujian | 6.304.103 | 9.510.799 | 12.934.153 | 11.900.678 | 13.763.069 |
| 2 | Kalibrasi | 19.113 | 64.420 | 107.234 | 735.456 | 1.254.866 |
| 3 | Sertifikasi | 1.728.717 | 1.829.718 | 2.157.010 | 2.380.000 | 2.582.608 |
| 4 | Bimbingan dan Pendampingan Teknis | 103.552 | 211.470 | 315.230 | 1.990.754 | 184.587 |
| 5 | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri | 2.258.221 | 3.108.689 | 453.849 | 638.527 | 1.096.133 |
| 6 | Inspeksi dan Verifikasi Teknis | - | - | - | 609.443 | 1.237.909 |
| 7 | Penyelenggara Uji Profisiensi | - | - | 129.244 | 77.494 | 121.139 |
| 8 | Penerimaan lainnya | 45.666 | 12.294 | 109.878 | 21.105 | 152.844 |
| 9 | Jasa GIRO BLU | 15.857 | 72.009 | 69.117 | 64.810 | 100.198 |
| JUMLAH | | 10.475.231 | 14.809.403 | 16.283.712 | 18.418.270 | 20.483.355 |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025, penerimaan PNBPN menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp10.475.231.000 pada tahun 2021 menjadi Rp20.483.355.953 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama

didukung oleh layanan pengujian sebagai kontributor utama penerimaan, diikuti oleh sertifikasi yang meningkat secara stabil setiap tahun. Selain itu, layanan kalibrasi mengalami pertumbuhan signifikan pada dua tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya permintaan dan pengembangan kapasitas layanan. Sejak tahun 2024, munculnya jenis layanan baru seperti inspeksi dan verifikasi teknis serta penyelenggaraan uji profisiensi turut memperkuat diversifikasi sumber PNBPN. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan PNBPN menunjukkan pengelolaan yang semakin optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Meningkatnya pelanggan jasa layanan RATA,CGA dan RCA
2. Meningkatnya layanan uji profisiensi
3. Meningkatnya layanan inspeksi dan verifikasi TKDN.
4. Optimalisasi aset yang menghasilkan pendapatan dari sewa gedung dan ruangan.

Secara umum, sebagian besar penerimaan jasa layanan tahun 2025 mengalami kenaikan tetapi untuk layanan bimbingan dan pendampingan teknis mengalami penurunan dikarenakan BBSPJPI pada tahun 2025 tidak memperoleh alokasi untuk pelaksanaan kerjasama terkait kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non fisik (pada tahun 2025 BBSPJPI memperoleh alokasi pelaksanaan untuk program DAK Fisik sesuai wilayah kerja untuk lingkup industri berbasis logam, proses batik serta kerajinan. Dikarenakan bukan merupakan kompetensi inti BBSPJPI maka untuk pelaksanaan DAK Non Fisik tidak diambil/dikerjasamakan).

Jumlah pelanggan baik industri dan non industri untuk semua jenis layanan dengan rincian per jenis layanan teknis disajikan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 62 .Jumlah Pelanggan JPT 2021-2025

| No | Jenis JPT | Jumlah Pelanggan | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| | | Indus tri | Non Industr i | Indus tri | Non Indus tri | Indus tri | Non Indust ri | Indust ri | Non Indust ri | Indust ri | Non Indust ri |
| 1 | Optimalisasi Pemanfaatan teknologi | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 2 | RBPI/Rancang Bangun Perekayaan Industri (Jumlah RBPI) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - |
| 3 | Pelatihan | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 12 | 5 | 19 | 4 |
| 4 | Pengujian | 440 | 123 | 475 | 172 | 481 | 169 | 566 | 149 | 387 | 119 |
| 6 | Konsultasi/Supervisi (Jumlah Konsultasi/Supervisi) jasa alih teknologi penelitian dan pengembangan | 2 | - | 3 | 1 | 5 | - | 7 | - | 50 | - |
| 7 | Kalibrasi (Sertifikat /Alat) | 23 | 1 | 21 | 3 | 37 | 7 | 62 | 17 | 53 | 20 |
| 8 | Sertifikasi | 207 | - | 217 | - | 245 | - | 338 | - | 323 | - |
| 9 | Audit Energi | | | | | 1 | - | 17 | - | 37 | - |
| 10 | PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) | - | - | - | - | 14 | 29 | 9 | 36 | 10 | 39 |

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelanggan periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang positif dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan. Secara umum, jumlah pelanggan didominasi oleh sektor industri, yang menunjukkan bahwa layanan JPT telah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan daya saing dan pemenuhan standar teknis industri nasional.

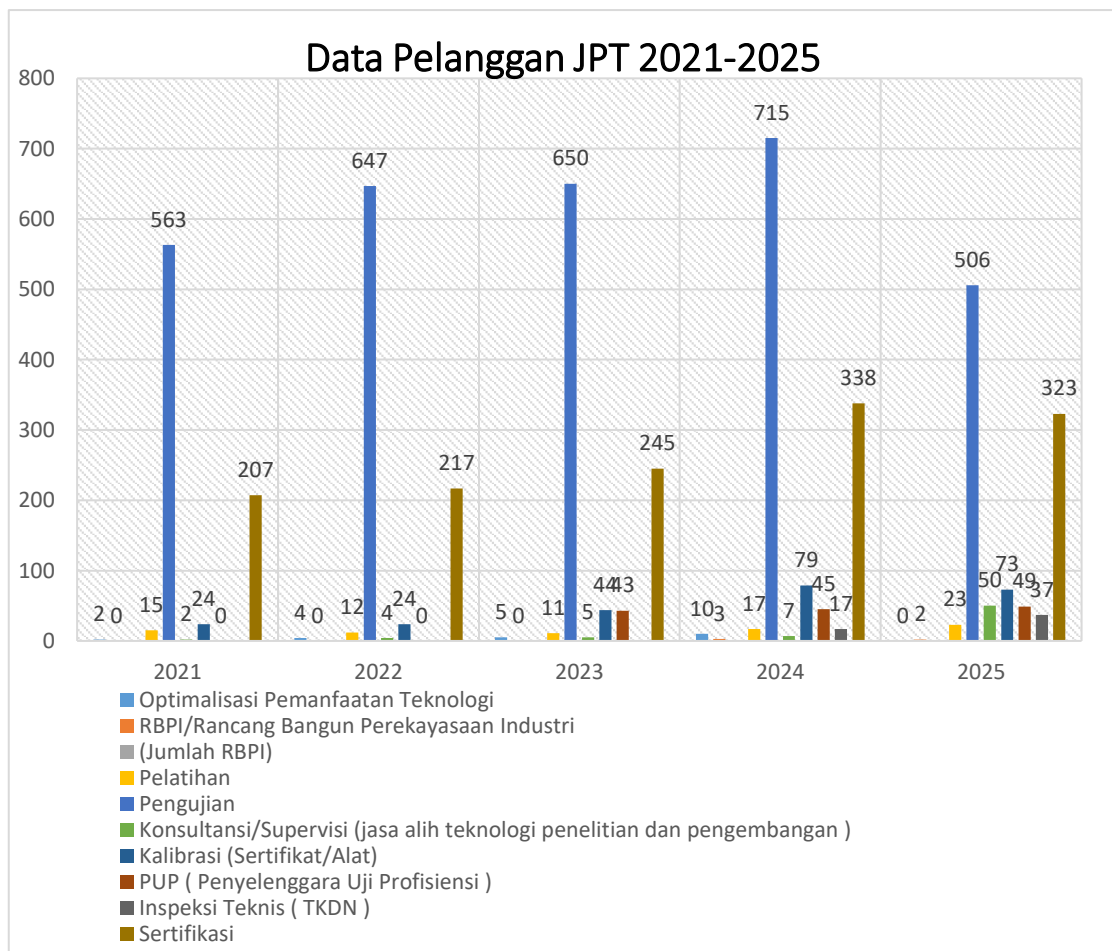
Hal ini selaras dengan jumlah sampel/alat/sertifikat/pendampingan/konsultasi/kerja sama pada tahun 2021-2025 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 63. Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi
Tahun 2021-2025**

| No | Jenis JPT | Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Ko nsultasi | | | | |
|----|---|---|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi | 2 | 4 | 5 | 10 | - |
| 2 | RBPI/Rancang Bangun Perencanaan Industri (Jumlah RBPI) | - | - | - | 3 | 2 |
| 3 | Pelatihan | | | | | |
| | a. Jumlah pelatihan | 15 | 12 | 11 | 17 | 23 |
| | b. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan | 152 | 193 | 223 | 710 | 151 |
| 4 | Pengujian | | | | | |
| | a. Jumlah Pelanggan | 563 | 647 | 650 | 715 | 506 |
| | b. Jumlah sampel uji | 6986 | 7323 | 7131 | 7414 | 7078 |
| 5 | Konsultasi/Supervisi (jasa alih teknologi penelitian dan pengembangan) | 2 | 4 | 5 | 7 | 50 |
| 6 | Kalibrasi (Sertifikat/Alat) | | | | | |
| | a. Jumlah pelanggan | 24 | 24 | 44 | 79 | 73 |
| | b. Jumlah alat | 134 | 147 | 359 | 520 | 723 |

| No | Jenis JPT | Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi | | | | |
|----|---------------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 | PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) | - | - | 43 | 45 | 49 |
| 8 | Inspeksi Teknis (TKDN) | | | | | |
| | a.Jumlah pelanggan | - | - | - | 17 | 37 |
| | b.Jumlah LHI | - | - | - | 26 | 166 |
| 9 | Sertifikasi | | | | | |
| | a. Jumlah pelanggan | 207 | 217 | 245 | 338 | 323 |
| | b. Jumlah sertifikat | 167 | 167 | 229 | 244 | 355 |

Grafik 6. Jumlah Pelanggan per Jenis Layanan Teknis 2021-2025



Dari grafik diatas, Selama periode 2021–2025 jumlah pelanggan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) pengujian menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2024 dan mencapai puncak sebanyak 715 pelanggan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 506 pelanggan. Layanan Pengujian dan Sertifikasi menjadi kontributor utama jumlah pelanggan setiap tahunnya, yang mencerminkan tingginya kebutuhan industri terhadap layanan pemenuhan standar dan mutu. Selain itu, layanan Pelatihan, Kalibrasi, Konsultasi, PUP, dan Inspeksi Teknis (TKDN) menunjukkan perkembangan positif sebagai layanan pendukung bernilai tambah. Penurunan capaian pada tahun 2025 menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan dan penguatan strategi pencapaian kinerja pada periode berikutnya.

Analisis

Tabel 64 Perbedaan sampel dan penerimaan layanan pengujian

| Jasa Layanan | 2024 | 2025 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Jumlah Sampel Pengujian | 7414 | 7078 |
| Penerimaan pengujian | Rp. 11.900.678.580 | Rp. 13.763.069.673 |

Dilihat dari Tabel 64, jumlah sampel pengujian pada tahun 2025 mengalami penurunan, namun penerimaan justru meningkat. Penurunan jumlah sampel tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemberlakuan tarif baru pada bulan Juni 2024, tidak adanya keharusan pengujian sampel LSPro di laboratorium milik BBSPJPPI karena diperbolehkan menggunakan laboratorium lain yang telah terakreditasi dan memenuhi penunjukan P4SI, serta ketidakikutsertaan BBSPJPPI dalam program DAK pada tahun 2025 khususnya pada proyek pengujian. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 terdapat program DAK yang menyumbang sampel pengujian dari DAK Purworejo dan DAK Salatiga sebanyak 70 sampel. Di sisi lain, peningkatan penerimaan didukung oleh banyaknya pengujian sampel pestisida, mengingat biaya uji untuk parameter tersebut relatif tinggi.

3) Kendala

- Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
- Masih terdapat piutang yang belum tertagih di tahun 2025 dikarenakan belum selesainya administrasi untuk proses penagihan pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun.
- Penyelesaian pengembangan platform sistem jasa layanan membutuhkan waktu cukup lama (Masih tergantung pada eksternal). Hal ini membuat belum semua fitur pada sistem layanan mengakomodir kebutuhan pelanggan balai.

Kendala TA 2024 yang telah ditindaklanjuti pada TA 2025 adalah penyelesaian piutang tahun 2024 yang sudah terselesaikan.

Evaluasi terhadap capaian kedepannya meningkatkan peluang layanan yang masih minim kompetitor seperti uji RATA, CEMS, RCA dan CGA serta layanan LVV GRK dan LSP.

4) Tindak Lanjut

Rencana perbaikan pada tahun selanjutnya dalam mendorong peningkatan realisasi penerimaan PNBPN sebagai berikut:

- Melakukan monitoring piutang dan penyelesaian tagihan pembayaran piutang atas jasa layanan untuk memperlancar cash flow dan memberi kelonggaran operasional kegiatan yang bersumber dari sumber anggaran PNBPN. Kedepannya perlu dilakukan koordinasi intensif antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan ke pelanggan
- Meningkatkan promosi dan peningkatan kapasitas layanan melalui pengembangan jasa layanan sertifikasi halal, uji profisiensi, verifikasi GRK, TKDN dan komersialisasi produk inovasi teknologi.
- Promosi potensi pemberian jasa layanan baru kepada pelanggan.
- Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.

3.3. Analisis Efisiensi

a. Analisis Efisiensi Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja

Berdasarkan target dan capaian Klasifikasi Rincian Output serta pagu dan realisasi anggaran TA 2025, maka dapat dihitung efisiensi sebagai berikut :

Tabel 65 Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran TA.2025

| Sasaran Kegiatan (output)/Indikator | Satuan | Kinerja Perkin | | | | Anggaran Perkin | | | | Efisiensi Renstra | | Efisiensi IKU | | |
|---|---|----------------|-----------|-------|-----------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------|
| | | Target | Realisasi | % | Efektivas | Pagu Efektif (000) | Realisasi (000) | % | Efisiensi | % | Rasio | % | Rasio | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) | % | 88,00 | 94,23 | 107,08 % | Efektif | Rp 2.020.890.000 | Rp 2.017.886.616 | 99,85 % | Efisien | 107,08 % | 6,75 % | 107,08 % | 6,75 % |
| 2 | Nilai NPS | Nilai | 40 | 63 | 157,50 % | Efektif | Rp 186.209.000 | Rp 174.143.783 | 93,52 % | Efisien | 157,50 % | 40,62 % | 157,50 % | 40,62 % |
| Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks peningkatan Penerimaan | Indeks | 3 | 3 | 100,00 % | Efektif | Rp 379.244.000 | Rp 369.462.545 | 97,42 % | Efisien | 100,00 % | 2,58 % | 100,00 % | 2,58 % |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------|-------|----------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | n Negara Bukan Pajak (PNBP) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | Hasil Layanan | 7.500 | 8.574 | 114,32 % | Efektif | Rp 27.326.883.000 | Rp 27.082.976.174 | 99,11 % | Efisien | 114,32 % | 13,31 % | 114,32 % | 13,31 % |
| 3 | Nilai Revenue on Asset (RoA) | % | 14,50 | 15,90 | 109,66 % | Efektif | Rp - | Rp - | 0,00 % | Efisien | 109,66 % | 0,00 % | 109,66 % | 0,00 % |
| 4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | % | 59,00 | 61,46 | 104,17 % | Efektif | Rp - | Rp - | 0,00 % | Efisien | 104,17 % | 0,00 % | 104,17 % | 0,00 % |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya SDM yang profesional | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | Indeks | 81,30 | 83,43 | 102,62 % | Efektif | Rp 418.278.000 | Rp 412.159.753 | 98,54 % | Efisien | 102,62 % | 3,98 % | 102,62 % | 3,98 % |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-------|----------|---------|------------------|------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | % | 20 | 20 | 100,00 % | Efektif | Rp - | Rp - | 0,00 % | Efisien | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| 2 | Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | % | 77,00 | 88,81 | 115,34 % | Efektif | Rp 103.528.000 | Rp 98.097.414 | 94,75 % | Efisien | 115,34 % | 17,85 % | 115,34 % | 17,85 % |
| 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 4,62 | 4,95 | 107,14 % | Efektif | Rp 4.627.465.000 | Rp 4.597.936.784 | 99,36 % | Efisien | 107,14 % | 7,26 % | 107,14 % | 7,26 % |
| Tercapainya Pengawasan Internal yang | | | | | | | | | | | | | | |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|----------|---------|---------------|---------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | % | 60 | 100 | 166,67 % | Efektif | Rp - | Rp - | 0,00 % | Efisien | 166,67 % | 0,00 % | 166,67 % | 0,00 % |
| 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan) | Nilai | 70,10 | 86,47 | 123,35 % | Efektif | Rp 65.292.000 | Rp 56.087.916 | 85,90 % | Efisien | 123,35 % | 30,36 % | 123,35 % | 30,36 % |
| Terwujudnya akuntabilitas organisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | Nilai | 79,45 | 83,60 | 105,22 % | Efektif | Rp 89.967.000 | Rp 59.788.126 | 66,46 % | Efisien | 105,22 % | 36,84 % | 105,22 % | 36,84 % |

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|----------|---------------|----------------|----------------|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 93,40 | 90,92 | 97,34 % | Tidak Efektif | Rp 103.798.000 | Rp 103.142.810 | 99,37 % | Tidak Efisien | 97,34 % | - 2,08 % | 97,34 % | - 2,08 % |
| 3 | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | Nilai | 75,00 | 94,75 | 126,33 % | Efektif | Rp - | Rp - | 0,00 % | Efisien | 126,33 % | 0,00 % | 126,33 % | 0,00 % |
| Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau | Perse n | 81,00 | 89,79 | 110,85 % | Efektif | Rp 201.735.000 | Rp 201.501.496 | 99,88 % | Efisien | 110,85 % | 9,89 % | 110,85 % | 9,89 % |

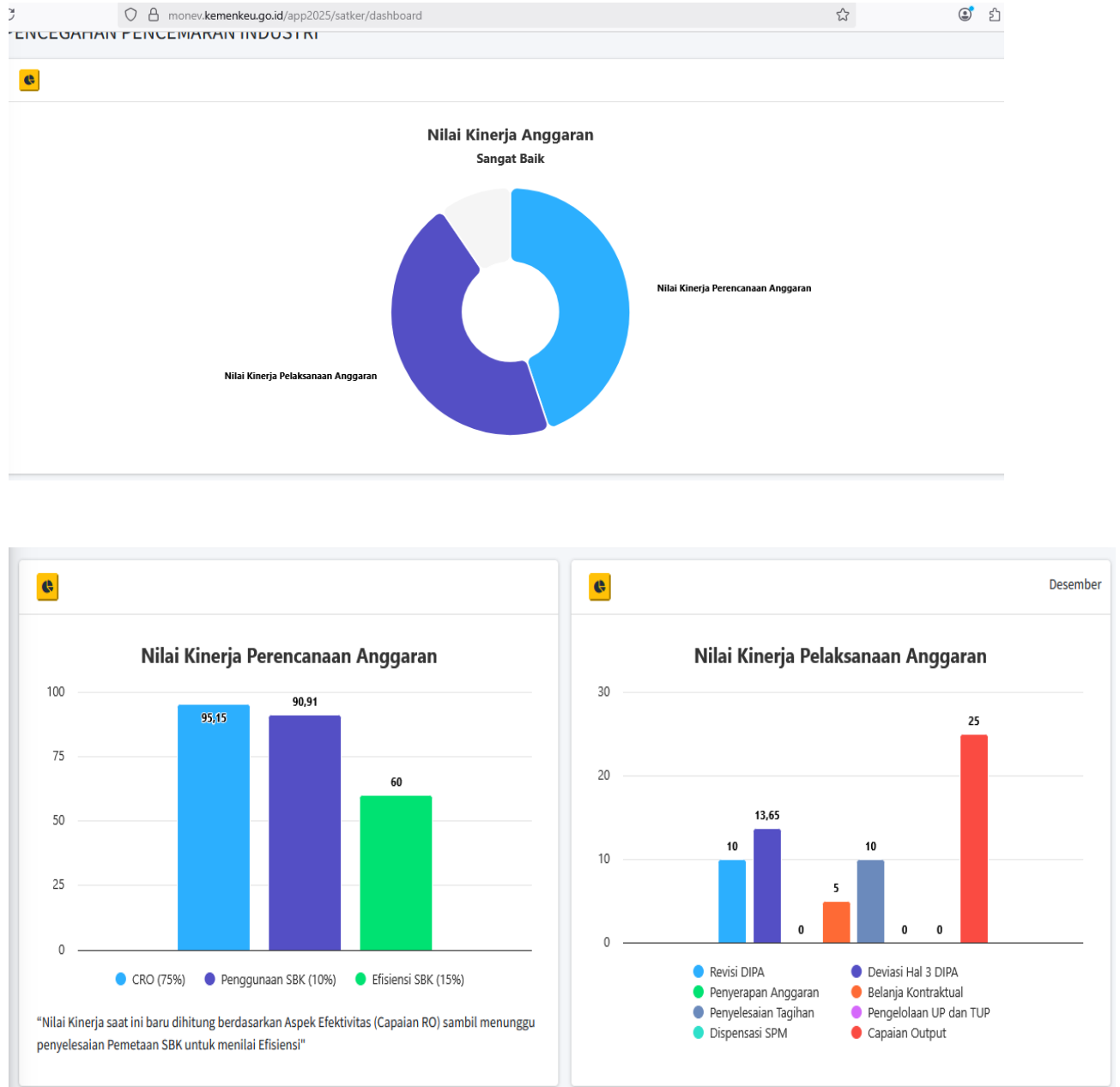
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| jasa pemerintah | | | | | | | | | | | | | |
| | | %Rata-rata Capaian Kinerja | 115,47 % | Efektif | 35.523.289.000 | 35.173.183.417 | 99,01 % | Efisien | 115,47 % | 10,46 % | 115,47 % | 10,46 % | |
| | | | | | | | | | | Efisien | | Efisien | |

Tabel 66 Ringkasan Efisiensi Kinerja

| Sasaran Kinerja | %Rata-rata capaian Output | Efektivitas | % Serapan Anggaran | Efisiensi |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri Satker BBSPJPPI | 115,47 % | Capaian Kinerja Output > 100% Efektif | 99,01 % | Capaian kinerja output > Serapan anggaran Efisien |

Kesimpulan dari tabel 66 , BBSPJPPI capaian kinerjanya efektif dan efisien.

b. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART



Gambar 3 Capaian Aplikasi SMART

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pada tahun 2025 nilai kinerja Satker BBSPJPI adalah sangat baik. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 45,47%. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran sebesar 44,73%.

Nilai Kinerja Anggaran BBSPJPI berada pada kategori **Sangat Baik**, yang mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan anggaran secara efektif dan

akuntabel. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar **44,73** menunjukkan bahwa proses perencanaan telah disusun secara matang, realistis, dan selaras dengan kebutuhan riil kegiatan serta target kinerja yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tingkat penyerapan yang baik, serta minimnya deviasi dalam realisasi kegiatan, sehingga secara keseluruhan mendukung pencapaian output dan outcome BBSPJPI serta memperkuat tata kelola keuangan yang efisien dan bertanggung jawab.

3.4. Penghargaan dari Luar instansi

a) Penghargaan Internal

1. Arsiparis teladan Kementerian Perindustrian kategori keterampilan peringkat I



b) Penghargaan Eksternal

1. BBSPJPPI sebagai unit dengan kinerja terbaik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2025



2. BBSPJPPI sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan kinerja sangat baik pada Penilaian Kinerja LPK Tahun 2025 yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan.



BAB. IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan jasa industri dan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan Rencana Kinerja yang disusun.

Pada tahun 2025, dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja BBSPJPI telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 7 (tujuh) Sasaran kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) BBSPJPI TA 2025. Target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagian besar sudah tercapai. Namun demikian, terdapat satu indikator kinerja yang belum tercapai, yaitu Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan oleh rendahnya penilaian pada aspek belanja kontraktual, yang hanya mencapai 50 dari nilai maksimal 100. Kondisi ini terjadi karena terdapat pendaftaran kontrak dari sumber anggaran RM *non-Inaproc* oleh BBSPJPI dilakukan mendekati akhir tahun anggaran, sehingga berdampak pada rendahnya nilai komponen distribusi akselerasi kontrak.

Sementara itu dari sisi pelaksanaan anggaran, pada tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran pada DIPA BBSPJPI sebanyak 15 kali dengan jumlah pagu pada DIPA sesuai hasil revisi terakhir sebesar Rp 40.465.963.000, terdiri dari anggaran Rupiah Murni senilai Rp 18.991.891.000 dan anggaran PNPB tahun berjalan sebesar Rp. 21.474.144.000,. Pada DIPA BBSPJPI TA 2025 samapi dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pagu blokir sebesar Rp. 4.942.674.000,-.sehingga pagu efektif BBSPJPI secara keseluruhan sebesar Rp. 35.523.289.000,-.

Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi penerimaan PNBP tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 20.483.355.953, atau tercapai 109,62% melebihi target penerimaan PNBP tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 18.686.000.000.

Adapun kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2025 realisasi anggaran BBSPJPPI mencapai sebesar Rp 35.173.183.417, atau 99,01% dari total pagu efektif anggaran DIPA revisi terakhir. Realisasi tersebut terdiri atas penyerapan anggaran dari sumber Rupiah Murni sebesar Rp17.335.122.831 atau 99,45%, serta dari sumber anggaran PNBP sebesar Rp17.838.060.586 atau 98,59%. Capaian penyerapan anggaran BBSPJPPI TA 2025 belum tercapai apabila dibandingkan dengan usulan realisasi anggaran satker BBSPJPPI yang disampaikan kepada BSKJI yang ditetapkan sebesar 99,81%.

Sebagian besar target dalam DIPA melampaui target yang ditetapkan. Tetapi terdapat target pada KRO sarana bidang industri dan perdagangan serta layanan sarana dan prasarana yang tidak tercapai karena terkena blokir anggaran pada belanja modal sarpras layanan dan belanja modal sarpras perkantoran .

4.2. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah kendala pada beberapa indikator kinerja kegiatan. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan juga Nilai *Net Promoter Score (NPS)*, kendala utama yang dihadapi adalah tingkat pengembalian kuesioner yang rendah dibandingkan dengan jumlah kuesioner yang disebar. Selain itu, penyajian data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi secara terpusat dan masih tersebar di masing-masing bagian teknis, sehingga tidak seluruh populasi pelanggan dapat dijangkau untuk diberikan survei. Pada indikator jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, terdapat tantangan berupa meningkatnya persaingan dengan kompetitor yang menawarkan layanan sejenis dengan harga lebih rendah, serta adanya sebagian pelanggan yang beralih ke laboratorium lain khususnya pada layanan pengujian. Di sisi lain, meskipun telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti layanan uji profisiensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, serta penjualan produk AiMS, capaian jumlah pelanggan masih

belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kompetensi dan ruang lingkup layanan BBSPJPI, meskipun berbagai upaya promosi telah dilakukan. Selanjutnya, pada indikator persentase pelayanan tepat waktu sesuai *Service Level Agreement (SLA)*, khususnya pada layanan pengujian, kendala yang dihadapi antara lain adanya permintaan khusus dari pelanggan untuk penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) yang menunggu data rata-rata debit pada awal bulan berikutnya, adanya parameter uji yang harus disubkontraskan ke laboratorium lain dengan standar waktu pelayanan lebih dari 14 hari, serta kendala teknis berupa kerusakan peralatan dan keterlambatan pengadaan bahan kimia. Pada layanan kalibrasi, khususnya pada bulan November, terdapat pengulangan data kalibrasi pada beberapa pekerjaan yang diindikasikan adanya data menyimpang sehingga memerlukan waktu tambahan. Sementara itu, pada layanan sertifikasi, kendala terjadi akibat adanya perubahan dokumen legalitas perusahaan yang harus disesuaikan sehingga memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan. Selain itu, pada pekerjaan *one stop service* yang menggabungkan audit SNI dan ISO, perbedaan SLA masing-masing skema serta permintaan perusahaan agar audit dilakukan secara bersamaan untuk menyelaraskan siklus audit turut mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian layanan.

Selain indikator-indikator tersebut, hambatan juga dihadapi pada Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Kendala yang muncul antara lain jenis dan tingkat pendidikan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi belum sepenuhnya berada pada jenjang dengan bobot penilaian maksimal sesuai ketentuan IP ASN. Di samping itu, pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) belum dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan karena keterbatasan kuota dari penyelenggara. Perubahan kebijakan terkait penerapan diklat fungsional pada masing-masing unit pembina, termasuk penjadwalan yang belum pasti, turut mempengaruhi optimalisasi pengembangan kompetensi ASN.

Pada indikator tingkat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), belum adanya petunjuk teknis terkait dengan penjelasan butir revidi LKE penerapan SPBE. Selanjutnya, pada indikator indeks pelayanan publik terdapat kesulitan dalam

memutakhirkan data SP4N Lapor dan SIPPN akibat kendala akses terhadap akun yang disediakan. Pada indikator nilai minimal pengawasan kearsipan internal (unit kearsipan) terdapat penambahan indikator penilaian yaitu digitalisasi dan TTE yang penilaiannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi SRIKANDI.

Pada indikator nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), kendala yang dihadapi antara lain adanya penambahan volume output Rincian Output (RO) pada saat revisi pergeseran anggaran sebagai dampak penerapan kebijakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), yang berpotensi menyebabkan sebagian target output tidak tercapai. Selain itu, terdapat penolakan atas usulan revisi anggaran karena adanya penambahan pagu perjalanan dinas untuk mendukung operasional layanan yang tidak sejalan dengan kebijakan pembatasan perjalanan dinas dalam masa efisiensi. Kendala lainnya adalah penyusunan rencana penarikan dana pada Triwulan IV yang belum optimal, seiring adanya revisi relaksasi dan revisi optimalisasi setelah pengajuan revisi pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2025, sehingga masih berpotensi menimbulkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana yang telah dimutakhirkan. Selain hal tersebut, nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak yang termasuk dalam Nilai Belanja Kontraktual pada indikator IKPA tergolong rendah yaitu 50 dari nilai maksimal 100. Hal ini disebabkan BBSPJPPi mendaftarkan kontrak RM non *inaproc* mendekati akhir tahun.

Dari sisi aspek kinerja anggaran, realisasi anggaran BBSPJPPi belum memenuhi target realisasi keuangan sesuai prognosa realisasi yang diusulkan satker kepada sekjen. Realisasi keuangan tercapai 99,014%, sedangkan target 99,81%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih adanya blokir terkait efisiensi belanja pada DIPA BBSPJPPi TA 2025 utamanya terkait belanja modal (belanja mesin peralatan dan renovasi gedung), belanja perjalanan terkait kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa terkait operasional dan pemeliharaan perkantoran, perencanaan dan pemanfaatan anggaran penggunaan saldo awal kas yang kurang maksimal serta anggaran perjalanan dinas yang belum terserap optimal dikarenakan sebagian besar pelaksanaan kegiatan utamanya kegiatan layanan manajemen kinerja internal diselenggarakan secara online/daring.

4.3. Saran dan Rekomendasi

Terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan juga Nilai *Net Promoter Score* (NPS), tindak lanjut yang dilakukan difokuskan pada peningkatan tingkat respons pelanggan melalui berbagai strategi, antara lain mendorong pengisian kuesioner secara langsung oleh pelanggan yang datang ke BBSPJPPI, melakukan *blasting* WhatsApp dan email secara lebih intensif dan terjadwal, serta memperkuat komunikasi dan sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Selain itu, platform SINDIi direncanakan sebagai sarana pengisian kuesioner sebelum pelanggan mengunduh laporan hasil uji, serta pemberian kuesioner kepada pelanggan layanan sertifikasi, dan verifikasi TKDN setelah pelaksanaan audit atau verifikasi. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa tingkat respons pelanggan masih relatif rendah, platform SINDIi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian kuesioner, sosialisasi melalui media sosial belum optimal, serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi secara terpusat. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan diarahkan pada penyusunan tampilan kuesioner yang lebih menarik, optimalisasi pemanfaatan platform SINDIi, penjadwalan sosialisasi kuesioner secara rutin setiap awal bulan, serta penyusunan basis data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu, termasuk pengembangan database berbasis nomor order layanan.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk indikator jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, diarahkan pada peningkatan daya tarik dan jangkauan layanan melalui penguatan promosi dengan berpartisipasi dalam berbagai pameran, optimalisasi promosi melalui kanal media BBSPJPPI, perluasan ruang lingkup pengujian terakreditasi, serta penguatan kapasitas layanan melalui kerja sama subkontrak dan kolaborasi dengan balai lain. Upaya lain dilakukan dengan memperkuat hubungan dengan calon pelanggan layanan baru, termasuk konsultan independen pada layanan verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal, serta mendorong seluruh pegawai berperan sebagai agen promosi dalam pelaksanaan layanan. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa meskipun BBSPJPPI telah mengikuti berbagai pameran dan melakukan tindak lanjut kepada pengunjung stan serta menjalankan promosi media sesuai jadwal, hasil yang

diperoleh belum optimal. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan difokuskan pada tindak lanjut calon pelanggan secara berkala, antara lain melalui blasting promosi layanan, serta finalisasi revisi tarif agar jasa layanan BBSPJPI lebih kompetitif dan mampu meningkatkan jumlah pelanggan.

Terkait indikator persentase pelayanan tepat waktu sesuai *Service Level Agreement (SLA)*. Tindak lanjut difokuskan pada penguatan pengelolaan proses layanan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi. Pada layanan pengujian, dilakukan koordinasi dengan tim SINDIi untuk penambahan kode khusus atas permintaan pelanggan agar tidak dikategorikan melebihi SPM, peningkatan kompetensi laboratorium melalui pelatihan dan inventarisasi kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan subkontrak, serta mitigasi risiko terhadap peralatan uji berusia lebih dari 10 tahun dan keterlambatan pengadaan bahan kimia. Pada layanan kalibrasi, dilakukan monitoring peralatan standar dan pendukung guna memastikan kinerja peralatan dan kepatuhan petugas terhadap SOP. Sementara itu, pada layanan sertifikasi, tindak lanjut diarahkan pada pengecekan dan pemastian kelengkapan dokumen sejak tahap permohonan serta pemisahan evaluasi teknis pada kegiatan sertifikasi SNI dan ISO 9001:2015 agar sesuai dengan SLA masing-masing. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa koordinasi penambahan kode contoh khusus di SINDIi telah dilakukan, laboratorium mulai mempersiapkan perluasan parameter pengujian, serta penerapan prioritas peremajaan peralatan uji. Untuk layanan sertifikasi, kelengkapan dokumen permohonan terus diperkuat dan evaluasi teknis terpisah mulai diterapkan. Rencana perbaikan ke depan mencakup penambahan kode contoh "4" pada aplikasi SINDIi untuk permintaan khusus pelanggan, pengadaan bahan dan peralatan guna memperluas parameter pengujian dengan prioritas pengadaan peralatan uji AAS Flame-GF pada tahun 2026, serta penguatan koordinasi melalui aplikasi SIINAS agar kelengkapan dokumen dan pelaksanaan rapat teknis sertifikasi dapat berjalan sesuai SLA masing-masing kegiatan.

Tindak lanjut indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) difokuskan pada penguatan pengembangan kompetensi ASN melalui koordinasi dengan manajemen dan penyelenggara pelatihan, monitoring ketersediaan anggaran, serta optimalisasi *inhouse*

training dan pelatihan daring. Selain itu, dilakukan evaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai dan simulasi progres perhitungan IP ASN. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya dampak perubahan regulasi perhitungan IP ASN dan perpindahan jabatan ke JFT, keterbatasan kuota dan anggaran pelatihan PKN, PKA, dan diklat fungsional, serta penyesuaian jadwal pelatihan akibat relaksasi anggaran. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan diarahkan pada keberlanjutan pemberian izin tugas belajar mandiri, penguatan koordinasi dengan unit pembina jabatan fungsional, penyesuaian jadwal pelatihan sesuai postur anggaran, serta pemastian setiap pegawai memperoleh minimal satu pelatihan teknis setiap tahun.

Terkait tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah evaluasi teknis penerapan SPBE di lingkungan BBSPJPI serta koordinasi lebih lanjut dengan Pusdatin terkait pedoman teknis penerapan SPBE. Pada Indeks Pelayanan Publik, diperlukan pengecekan akun SP4NLapor dan SIPPN secara berkala agar pemutakhiran data dapat dilakukan ketika aplikasi tidak mengalami gangguan.

Sementara itu, pada indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan yang fokus pada pengoperasian aplikasi SRIKANDI. Selain itu, seluruh surat yang telah ditandatangani, baik dengan tanda tangan basah maupun TTE, wajib disampaikan ke arsiparis untuk diunggah ke dalam aplikasi SRIKANDI.

Sedangkan untuk indikator nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), tindak lanjut strategis dilakukan melalui koordinasi dengan BSKJI, Biro Perencanaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran terkait kebijakan penetapan Rincian Output SBKK dan pengelolaan blokir anggaran, khususnya untuk kegiatan layanan jasa teknis serta mendaftarkan kontrak RM sebagai nilai belanja kontraktual di awal tahun berjalan. Sebagai rencana perbaikan, akan dilakukan reviu pelaksanaan kegiatan dan prognosis penyerapan anggaran secara periodik minimal setiap triwulan, serta penguatan koordinasi dengan BSKJI agar pelaksanaan revisi terpusat selaras dengan jadwal pemutakhiran Halaman III

DIPA. Selain itu, akan diupayakan untuk pendaftaran kontrak pekerjaan yang menggunakan sumber anggaran RM maksimal dilakukan di Triwulan II tahun berjalan.

Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja dan rencana penyerapan anggaran, serta melakukan identifikasi dini terhadap potensi anggaran yang tidak terserap. Selain itu, perlu dilakukan rapat evaluasi secara periodik guna memantau realisasi dan sisa anggaran setiap kegiatan. Selanjutnya, pada periode awal Triwulan IV, tim pengelola keuangan BBSPJPPI dapat melakukan identifikasi atas potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada masing-masing kegiatan untuk kemudian dilakukan realokasi anggaran sekaligus rencana penarikan dana, dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja penyerapan anggaran.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apit Pria Nugraha
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa
Pencegahan Pencemaran Industri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Emmy Suryandari
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri

Plt. Kepala Balai Besar Standardisasi
dan Pelayanan Jasa Pencegahan
Pencemaran Industri,



Emmy Suryandari



Apit Pria Nugraha

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Satuan | Target |
|------|--|----------------------------------|---|---|--------|
| TJ | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | Indeks | 3,68 |
| | | 2 | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi | 960 |
| SK.1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1 | Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) | Persen | 88,00 |
| | | 2 | Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS) | Nilai | 40 |
| SK.2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1 | Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Indeks | 3 |
| | | 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | Hasil Layanan | 7.500 |
| | | 3 | Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA) | Persen | 14,50 |
| | | 4 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | Persen | 59,00 |
| SK.3 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1 | Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | Indeks | 81,30 |
| SK.4 | Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1 | Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | Persen | 20,00 |
| | | 2 | Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Persen | 77,00 |
| | | 3 | Indeks Pelayanan Publik (IPP) | Indeks | 4,62 |

| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Satuan | Target |
|------|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| SK.5 | Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien | 1 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | Persen | 60,00 |
| | | 2 | Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan) | Nilai | 70,10 |
| SK.6 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1 | Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | Nilai | 79,45 |
| | | 2 | Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | Nilai | 93,40 |
| | | 3 | Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | Nilai | 75,00 |
| SK.7 | Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah | Persen | 81,00 |

*) Indikator Kinerja Utama

| Kode | Program | Anggaran (Rp) |
|-------|-------------------------------------|----------------------|
| EC | Program Nilai Tambah dan Daya Saing | Rp. 15.448.050.000,- |
| WA | Program Dukungan Manajemen | Rp. 25.017.913.000,- |
| TOTAL | | Rp. 40.465.963.000,- |

Jakarta, Desember 2025

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Plt. Kepala Balai Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri



Emmy Suryandari



Apit Pria Nugraha

Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Kode | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Komponen/ Subkomponen | Anggaran | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|---|--------|-----------|---------|--|--------------|-------------------|----|-------------------|--------|
| | | | | | | | | | Pagu Efektif | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| TJ | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | indeks | 3,68 | 3,7 | 100,54 | -Sosialisasi Layanan Jasa Teknis -Pengelolaan Data dan Informasi | Rp | - | Rp | - | - |
| | | 2 | Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri | Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 960 | 1063 | 110,73 | Publikasi Layanan Jasa Teknis | Rp | - | Rp | - | - |
| SK.1 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1 | Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) | Persen | 88 | 94,23 | 107,08 | Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan | Rp | 2.020.890.000 | Rp | 2.017.886.616 | 99,85% |
| | | 2 | Nilai Net Promoter Score (NPS) | Nilai | 40 | 63 | 157,50 | Sosialisasi Layanan Jasa Teknis | Rp | 186.209.000 | Rp | 174.143.783 | 93,52% |
| SK.2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1 | Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | Indeks | 3 | 3 | 100,00 | a. Publikasi layanan jasa teknis b. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium pengujian. c. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan laboratorium kalibrasi. d. Akreditasi/surveilance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan lembaga sertifikasi e. Pengembangan kelembagaan jaminan produk halal f. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan lembaga verifikasi. g. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan uji profesiensi h. Akreditasi/surveilen/reakreditasi dan pengembangan produsen bahan acuan. | Rp | 379.244.000 | Rp | 369.462.545 | 97,42% |
| | | 2 | Jumlah hasil layanan jasa industri | Hasil Layanan | 7.500 | 8574 | 114,32 | a. Jasa pelayanan teknis pengujian. b. Jasa pelayanan teknis kalibrasi c. Jasa pelayanan teknis sertifikasi d. Jasa pelayanan Bimtek e. Jasa Optek f. Penyelenggaraan lembaga pemeriksa halal g. Jasa pelayanan verifikasi h. Jasa pelayanan teknis uji profesiensi i. Jasa pelayanan prdusen bahan acuan j. Gaji dan tunjangan | Rp | 27.326.883.000,00 | Rp | 27.082.976.174,00 | 99,11% |
| | | 3 | Nilai Revenue on Asset (RoA) | Persen | 14,5 | 15,9 | 109,66 | a. Pengadaan kendaraan bermotor b. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan c. Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan* d. Pengadaan perangkat Tik * e. Pelayanan tata usaha dan rumah tangga* f. Pengadaan peralatan inventaris perkantoran* | | | | | |

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline |
|-----|--|--|---------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|---|--|----------|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 3,68 indeks | 25% | 1) Penanganan dan pemantauan complain/keluhan pelanggan TW I 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I. 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW I | 50% | 1) Penanganan dan pemantauan complain/keluhan pelanggan TW II 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW II | 75% | 1) Penanganan dan pemantauan complain/keluhan pelanggan TW III 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW III | 100% | 1) Penanganan dan pemantauan complain/keluhan pelanggan TW IV 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4) Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan. 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW IV | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Des-25 |
| 2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) | 88 Persen | 25% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan | 50% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan | 75% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan | 100% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan | Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho) | Des-25 |
| | | 2. Nilai Net Promoter Score (NPS) | 40 Nilai | 25% | 1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan | 50% | 1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan | 75% | 1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan | 100% | 1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Des-25 |
| 3 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 3 Indeks | 25% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan | 50% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan | 75% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan | 100% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Des-25 |
| | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7.500 Hasil Layanan | 25% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I. | 50% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II. | 75% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III. | 100% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | Des-25 |
| | | 3. Nilai Revenue on Asset (RoA) | 14,50 Persen | 25% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan in | 50% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan in | 75% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | 100% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbahul Anam) | Des-25 |
| | | 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 59 Persen | 25% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan up | 50% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan u | 75% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 100% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbahul Anam) | Des-25 |
| 4 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81,30 indeks | 25% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I. | 50% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II. | 75% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III. | 100% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW IV. | Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B) | Des-25 |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 Persen | 25% | 1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan y | 50% | 1) Mendesain atur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKJI. 2) Pengembangan Sistem Informasi 3) Penyusunan SOP Penggunaan Sistem | 75% | 1) Uji Coba Integrasi Sistem 2) Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3) Evaluasi dan Perbaikan Sistem | 100% | 1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2) Penyempurna | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) | Des-25 |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Rencana Aksi | | | | | | | | Penanggung Jawab | Timeline | |
|-----|--|---|-------------|---------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|--|--|----------|--|
| | | | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | | | |
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 77 Persen | 25% | 1) Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi | 50% | 1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | 75% | 1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | 100% | 1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | | | |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,62 indeks | 30% | 1) Mengevaluasi/mereview nilai IPP Tahun sebelumnya. 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDII. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5) Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6) Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenerin | 50% | 1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI | 75% | 1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI | 100% | 1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan | | | |
| 6 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 60 Persen | 15% | 1) Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2) Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan inspektorat III | 40% | 1) Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja | 85% | 1) Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3) Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4) Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan | 100% | 1) Koordinasi dengan Setitjen untuk monitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan | Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW) | Des-25 | |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) | 70.10 Nilai | 25% | 1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal. | 50% | 1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan | 75% | 1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. | 100% | 1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3) Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian | Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) | Des-25 | |
| 7 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 79,45 Nilai | 30% | 1) Penyusunan dokumen Tapkin 2) Penyusunan dokumen Renkin 3) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4) Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5) Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKII dan Tim Itje | 60% | 1) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2) Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP | 80% | 1) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III) | 100% | 1) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP) | Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) | Des-25 | |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | 93,40 Nilai | 25% | 1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4) Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5) Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu. | 50% | 1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA | 75% | 1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | 100% | 1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbahul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) | | |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | | Penanggung Jawab | Timeline |
|-----|---|--|-----------|---------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|---|----------|
| | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target Antara | Rencana Kegiatan | | |
| 1 | | 3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | 75 Nilai | 25% | 1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Desember tahun sebelumnya 5) Mendukung pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahunan | 50% | 1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Audited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan April dan Mei tahun berjalan | 75% | 1) Menyusun laporan keuangan semester I (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Juni, Juli dan Agustus tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan penilaian laporan keuangan tahunan (Audited) oleh Biro Keuangan | 100% | 1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan 6) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan | Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbahul Anam) | Des-25 |
| 8 | Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah | 81 Persen | 30% | 1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri | 50% | 1) Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging | 75% | 1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging | 100% | 1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging | Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) | Des-25 |



Sepuluh Desember 2025

Pt Kepala BBSR/PP

Adit Priatno

Rencana AKSI triwulan IV

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi dari Target | Capaian | Triwulan IV | | % Fisik | | Realisasi | | | Kendala | Tindak lanjut yg bersifat strategis | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|---|---|----------|---------------|---|---------|-----------|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target | Realisasi | Bulan Oktober | Bulan November | Bulan Desember | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* | 3,68 indeks | 3,70 Indeks | 100,54% | 100% | 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan. | 100% | 100% | 1] Penyebaran kuesioner kepada 125 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 20 responden. 2] Hasil analisa IKM bulan Oktober berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,76 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Oktober sebesar 3,70. | 1] Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 24 responden. 2] Hasil analisa IKM bulan November berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,73 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan November sebesar 3,70. | 1] Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 60 responden. 2] Hasil analisa IKM bulan Desember berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,70 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Desember sebesar 3,70. 3] Jumlah responden total Januari-Desember 2025 : 308 Responden. | 1. Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey IKM. 2. Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis), sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey IKM. | Melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan <i>feedback</i> yang kembali ke BBSPJPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan <i>blasting</i> wa dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPI. Platform SINDII bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana pelanggan untuk mengisi kuesioner sebelum mengunggah laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, kuesioner dapat diberikan setelah pelaksanaan audit audit maupun verifikasi. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) |
| | | 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri* | 960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 976 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi | 101,67 % | 100% | 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW IV. | 100% | 100% | Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPI sampai dengan bulan Oktober 2025: a) Pengujian = 448 b) Kalibrasi = 56 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 14 d) Sertifikasi = 207 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 3 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 37 j) LPH = 10 | Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPI sampai dengan bulan November 2025: a) Pengujian = 485 b) Kalibrasi = 67 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 14 d) Sertifikasi = 243 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 8 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 37 j) LPH = 55 | Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPI sampai dengan bulan Desember 2025: a) Pengujian = 506 b) Kalibrasi = 73 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 23 d) Sertifikasi = 261 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 50 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 37 j) LPH = 62 | 1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil | 1. Meningkatkan promosi dengan ikut serta di berbagai pameran 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Memperkuat kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPI 5. Melakukan kerjasama dengan balai lain 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia 7. Seluruh pegawai bisa menjadi agen pemasaran dan promosi bersamaan saat melakukan jasa layanan | |
| 2 | Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | 1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) | 88 Persen | 94,23 % | 107,080 | 100% | 1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV. | 100% | 100% | Pengujian: 97,37% Kalibrasi : 100% | Pengujian: 93,3% Kalibrasi: 99,7% | Pengujian: 99,3% kalibrasi : 100 % | Pengujian : 1. Ada permintaan dari pelanggan untuk penerbitan LHU menunggu data rata-rata debit di awal bulan berikutnya. 2. Ada parameter uji yang disubkontrak ke laboratorium lain, dimana SPM laboratorium tersebut lebih dari 14 hari. 3. Ada kendala kerusakan peralatan dan keterlambatan bahan kimia. kendala Kalibrasi: 1. Pelanggan | Pengujian : 1. Kendala 1 : Karena permintaan pelanggan, maka di sistem Sindi perlu diberikan kode khusus, sehingga tidak dianggap melebihi SPM. 2. Kendala 2 : Laboratorium BBSPJPI mulai mempelajari parameter uji yang disubkontrak agar tidak perlu disubkontrak ke laboratorium lain. 3. Kendala 3 : Melakukan mitigasi resiko dari peralatan-peralatan yang sudah lebih dari 10 tahun, dan pengadaan bahan kimia yang perlu indent lebih dari 30 hari. Kalibrasi ; 1. penambahan pada sistem disindi terkait revisi, sehingga saat dilakukan revisi karena permintaan pelanggan sistem tidak akan melihat sebagai proses yg keluar dari SLA | Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho J), Ketua Tim Kerja Kalibrasi Instrumen dan Lingkungan |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi dari Target | Capaian | Triwulan IV | | % Fisik | | Realisasi | | | Kendala | Tindak lanjut yg bersifat strategis | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---|---------|-----------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target | Realisasi | Bulan Oktober | Bulan November | Bulan Desember | | | |
| | | 2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS) | 40 Nilai | 63 Nilai | 157,5 % | 100% | 1) Penyebaran kuesioner kepada 125 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 20 responden, sehingga secara akumulatif sudah 224 responden dengan rincian promoters sebanyak 153 pelanggan, passives 63 pelanggan dan detractors 8 pelanggan. 2) Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Oktober 2025 adalah sebesar 65. | 100% | 100% | 1) Penyebaran kuesioner kepada 125 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 24 responden, sehingga secara akumulatif sudah 248 responden dengan rincian promoters sebanyak 168 pelanggan, passives 72 pelanggan dan detractors 8 pelanggan. 2) Hasil analisa NPS sampai dengan bulan November 2025 adalah sebesar 65. | 1) Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPI sejumlah 60 responden, sehingga secara akumulatif sudah 308 responden dengan rincian promoters sebanyak 204 pelanggan, passives 94 pelanggan dan detractors 10 pelanggan. 2) Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar 63. | 1. Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey NPS. 2. Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis), sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS. | Melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi survey NPS sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan feedback yang kembali ke BBSPJPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPI. Platform SINDII bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana pelanggan untuk mengisi survey NPS sebelum mengunggah laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, survey NPS diberikan setelah pelaksanaan audit audit maupun verifikasi. | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) | |
| 3 | Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | 1. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 3 Indeks | 3 indeks | 100% | 100% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV. | 100% | 100% | 1) Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik (layanan stasioner dan layanan dinamis) 2) Pada bulan Oktober 2025, telah tercapai 172 dokumen (dokumen penawaran dan surat layanan lainnya) yang tersampaikan kepada pelanggan 3) Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telepon dan WA (pelayanan prima) | 1) Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik (layanan stasioner dan layanan dinamis) 2) Pada bulan November 2025, telah tercapai 155 dokumen (dokumen penawaran dan surat layanan lainnya) yang tersampaikan kepada pelanggan 3) Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telepon dan WA (pelayanan prima) | 1) Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik (layanan stasioner dan layanan dinamis) 2) Pada bulan Desember 2025, telah tercapai 158 dokumen (dokumen penawaran dan surat layanan lainnya) yang tersampaikan kepada pelanggan 3) Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telepon dan WA (pelayanan prima) | 1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil | 1. Melakukan pemenuhan gap kompetensi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar 2. Promosi lebih gencar lagi melalui media sosial, konsultasi gratis via zoom, dan pertemuan offline. 3. Promosi gencar terhadap layanan baru agar mendapatkan klien lebih banyak | Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF) |
| | | 2. Jumlah hasil layanan jasa industri | 7.500 Hasil Layanan | 8574 Hasil Layanan Perhitungan di G46 | 114,32% | 100% | 1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV. | 100% | 100% | Jumlah hasil layanan BBSPJPI sampai dengan bulan Oktober 2025: a) Pengujian = 5640 LHU b) Kalibrasi = 534 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 121 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 232 sertifikat/ hasil surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 3 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 104 j) LPH = 13 | Jumlah hasil layanan BBSPJPI sampai dengan bulan November 2025: a) Pengujian = 6504 LHU b) Kalibrasi = 661 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 134 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 264 sertifikat/ hasil surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 50 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 134 j) LPH = 13 | Jumlah hasil layanan BBSPJPI sampai dengan bulan Desember 2025: a) Pengujian = 7078 LHU b) Kalibrasi = 723 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 151 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 284 sertifikat/ hasil surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 50 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 166 j) LPH = 71 | 1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil | 1. Meningkatkan promosi dengan ikut serta di berbagai pameran 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPI 5. Melakukan kerjasama dengan balai lain 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia 7. Seluruh pegawai bisa menjadi agen pemasaran dan promosi bersamaan saat melakukan jasa layanan | Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF) |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi dari Target | Capaian | Triwulan IV | | % Fisik | | Realisasi | | | Kendala | Tindak lanjut yg bersifat strategis | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|--------------|-----------------------|----------|---------------|--|---------|-----------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target | Realisasi | Bulan Oktober | Bulan November | Bulan Desember | | | |
| | | 3. Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA) | 14,50 Persen | 15,90% | 109,66% | 100% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan | 100% | 100% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 3) melakukan penghitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 3) melakukan penghitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 3) melakukan penghitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku | Sampai dengan Triwulan III penerimaan BLU masih dibawah target rata-rata bulanan | 1. melakukan penagihan piutang 2. segera melakukan penagihan terhadap pekerjaan yang sudah selesai 3. segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM | Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam) |
| | | 4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) | 59 Persen | 61,46 Persen | 104,17 % | 100% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 100% | 100% | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional | 1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional" | Pada tahun 2025 terjadi penurunan Pendapatan Jasa Layanan Teknis satu K/L | | Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam) |
| 4 | Terwujudnya SDM yang profesional | 1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) | 81,30 indeks | 82,1 Indeks | 100,98 % | 100% | 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM IV. | 100% | 100% | 1) Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran 2) Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai 3) Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (1. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 1; 2. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 5) 4) Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (1. Sosialisasi Aspek Riset dan Inovasi Pada Perhitungan TKDN dan BMP 2025; 2. Training on GHG Emissions and Removal Calculation for Industrial Sector; 3. | 1) Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran 2) Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai 3) Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (1. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 1; 2. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 5) 4) Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (1. Sosialisasi Aspek Riset dan Inovasi Pada Perhitungan TKDN dan BMP 2025; 2. Training on GHG Emissions and Removal Calculation for Industrial Sector; 3. | 1) Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran 2) Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai 3) Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (1. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 1; 2. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 5) 4) Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (1. Sosialisasi Aspek Riset dan Inovasi Pada Perhitungan TKDN dan BMP 2025; 2. Training on GHG Emissions and Removal Calculation for Industrial Sector; 3. | 1) Jenis tingkat pendidikan SDM yang diperlukan organisasi tidak pada tingkatan dengan bobot maksimal 2) Pelatihan PKN & PKA belum memperoleh Kuota dari Penyelenggara sesuai Jadwal kebutuhan 3) Perubahan Kebijakan Penerapan Diklat Fungsional di masing-masing unit pembina termasuk penjadwalan yang tidak pasti | 1) Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025 2) Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar 3) Koordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara PKN & PKA 4) Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi 5) Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat 6) Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai | Ketua Kelompok kerja Kepegawaian (Agung B) |
| 5 | Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik | 1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI | 20 Persen | 20 Persen | 100 % | 100% | 1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2) Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3) Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4) Monitoring dan evaluasi | 100% | 100% | 1) Melakukan perbaikan dalam sistem integrasi internal menyesuaikan dengan manual API SIPPT 5.0 2) Melakukan evaluasi sistem informasi terintegrasi dengan memverifikasi data yang dikirim ke SIPPT dengan data internal sesuai dengan petunjuk manual API SIPPT versi 5.0 | 1) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak BSKJI terkait hasil integrasi data layanan ke SIPPT untuk data terkirim per Triwulan III dengan hasil akurasi keseluruhan data terkirim dengan data transaksi penerimaan BLU OM-SPAN sebesar 71,36% 2) Melakukan verifikasi serta crosscheck data yang terintegrasi SIPPT dengan data penerimaan BLU | 1) mengevaluasi Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Layanan Publik Satker UPT BSKJI Triwulan 3 Tahun 2025 2) Melakukan verifikasi serta crosscheck data yang terintegrasi SIPPT dengan data penerimaan BLU | | 1) Melakukan optimalisasi arsitektur integrasi | Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen) |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi dari Target | Capaian | Triwulan IV | | % Fisik | | Realisasi | | | Kendala | Tindak lanjut yg bersifat strategis | Penanggung Jawab |
|-----|--|---|-------------|-----------------------|----------|---------------|---|---------|-----------|---|---|--|--|---|------------------|
| | | | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target | Realisasi | Bulan Oktober | Bulan November | Bulan Desember | | | |
| | | 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 77 Persen | 88,81 Persen | 115,34 % | 100% | 1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas | 100% | 100% | 1) Melakukan pengumpulan bukti dukung penilaian LKE SPBE dari 3 aspek (tata kelola, manajemen dan layanan) 2) Melakukan penyusunan bukti dukung penilaian LKE SPBE | 1) Melakukan pembahasan internal bukti dukung penilaian LKE SPBE 2) Melakukan pengisian LKE SPBE 3) Konsultasi dengan Pusdatin terkait bukti dukung LKE SPBE 4) Melakukan perbaikan dan melengkapi bukti dukung hasil konsultasi dengan pusdatin 5) Mengunggah bukti dukung dan LKE SPBE ke akun lemon | 1) Mengikuti pembahasan penilaian sementara perjakin SPBE dengan Pusdatin 2) Melakukan klarifikasi hasil penilaian sementara dan konsultasi perbaikan bukti dukung LKE SPBE dengan Pusdatin 3) Memperbaiki dokumen bukti dukung LKE SPBE 4) Mengunggah revisi bukti dukung dan LKE SPBE ke akun lemon | 1) Belum adanya petunjuk teknis terkait dengan penjelasan butir reviu LKE penerapan SPBE | 1) Evaluasi teknis terkait penerapan SPBE di | |
| | | 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) | 4,62 indeks | 4,95 indeks | 107,14 | 100% | 1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakana | 100% | 100% | 1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar 3) Memutakhirkan konten SIPP dan website 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada | 1) Meninjau dan memperbaiki bukti dukung IPP dari saran perbaikan dari pihak BSKJI 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar 3) Memutakhirkan konten SIPP dan website 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan | Kesulitan memutakhirkan data SP4NLapor dan SIPPN karena adanya kendala akses ke akun yang disediakan | Menyampaikan kembali kendala akses ke BSKJI untuk akun SP4NLapor dan SIPPN | | |
| 6 | Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | 1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker | 60 Persen | 100 Persen | 166,67 | 100% | 1) Koordinasi dengan Setditjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan | 100% | 100% | 1) Monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan penyampaian bukti dukung tindak lanjut oleh masing-masing Penanggung Jawab tindak lanjut 2) Penyampaian kelengkapan bukti tindak lanjut hasil pengawasan TA 2024 pada satker BBSPJPPI kepada Inspektorat Jenderal sesuai surat Kepala BBSPJPPI Nomor R/165 /BBSPJPPI/PR/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 3) Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja dengan Tim auditor Inspektorat III | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada satker BBSPJPPI TA 2024 sesuai surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/180/U-IND/PW/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 | tidak ada kendala | | Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW) | |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi dari Target | Capaian | Triwulan IV | | % Fisik | | Realisasi | | | Kendala | Tindak lanjut yg bersifat strategis | Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------------------|--|--------|-----------------------|---------|---------------|---|---------|-----------|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target | Realisasi | Bulan Oktober | Bulan November | Bulan Desember | | | |
| | | 2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan | 70,10 | 86,47 | 123,35 | 100% | 1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3) Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan Kearsipan TA 2024 4) Peningkatan kompetensi Arsiparis (Diklat/Bimteks/Workshop/S emnas, dll) | 100% | 100% | 1) Pengelolaan arsip meliputi: 1.1) Pengendalian Naskah Dinas: • Registrasi Arsip Masuk = 140 • Registrasi Arsip Keluar = 486 1.2) Penggunaan Arsip (aktif & inaktif) = 2 pelayanan 1.3) Pemeliharaan Arsip • Daftar Arsip Aktif = 43 berkas (479 arsip) • Daftar Arsip In Aktif = 8 berkas (101 arsip) • Alih media Arsip Dinamis = 10 berkas (96 arsip) 1.4) Penyusutan Arsip: | 1) Pengelolaan arsip meliputi: 1.1) Pengendalian Naskah Dinas: • Registrasi Arsip Masuk = 126 • Registrasi Arsip Keluar = 509 1.2) Penggunaan Arsip (aktif & inaktif) = 2 pelayanan 1.3) Pemeliharaan Arsip • Daftar Arsip Aktif = 30 berkas (471 arsip) • Daftar Arsip In Aktif = 25 berkas (401 arsip) • Alih media Arsip Dinamis = 9berkas (102 arsip) 1.4) Penyusutan Arsip: | 1) Pengelolaan arsip meliputi: 1.1) Pengendalian Naskah Dinas: • Registrasi Arsip Masuk = 110 • Registrasi Arsip Keluar = 433 1.2) Penggunaan Arsip (aktif & inaktif) = 2 pelayanan 1.3) Pemeliharaan Arsip • Daftar Arsip Aktif = 45 berkas (480 arsip) • Daftar Arsip In Aktif = 56 berkas (467 arsip) • Alih media Arsip Dinamis = 8 berkas (107 arsip) 1.4) Penyusutan Arsip: | Nilai hasil pengawasan Kearsipan turun dibanding tahun lalu, diperkirakan karena: 1). Ada penambahan indikator penilaian seperti tingkat digitalisasi. 2). TTE yang diakui hanya yang melalui aplikasi SRIKANDI. 3). Selama ini surat keluar dikelola oleh bagian masing2 dan tidak disampaikan ke arsiparis sehingga sangat terbatas surat keluar yang diupload | 1). Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan khususnya pengelola SRIKANDI terkait Diklat Fungsional Kearsipan & diklat Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik 2) Menempatkan 1 orang arsiparis/ pengelola kearsipan yg fokus mengoperasikan SRIKANDI 3) Seluruh draft surat keluar harus disampaikan & diverifikasi arsiparis, surat yg sudah dittd (baik ttd basah maupun TTE)" juga wajib disampaikan ke arsiparis untuk dupload di SRIKANDI. | Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) ibu rahayu |
| 7 | Terwujudnya akuntabilitas organisasi | 1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker | 79,45 | 83,6 | 105,22 | 100% | 1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP) | 100% | 100% | 1) Penyusunan dan penyampaian dokumen Laporan PP 39 Triwulan III 2025 sesuai Nota Dinas Kepala BBSPJPPJ Nomor 151/BBSPJPPJ/PR/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 2) Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd Oktober 2025 3) Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan Oktober 2025 4) Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan Oktober 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas 4) Penyusunan matriks tindak lanjut LHE SAKIP pada satker BBSPJPPJ | 1) Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd November 2025 2) Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan November 2025 3) Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan November 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas 4) Penyusunan matriks tindak lanjut LHE SAKIP pada satker BBSPJPPJ | 1) Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd Desember 2025 2) Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan Desember 2025 3) Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan Desember 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas 4) Penyusunan draft Laporan PP 39 Tw IV 2025 5) Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP | Terdapat perbedaan pelaporan capaian data kinerja layanan pada masing-masing Tim Kerja | 1) Review dan penyesuaian SOP Pengumpulan Data (SOP Matriks Data Kinerja Layanan) 2) Pelaporan data capaian kinerja aspek layanan secara terpusat/satu pintu melalui Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri 3) Koordinasi dengan Pokja Informasi dan Digitalisasi untuk pengembangan dashboard kinerja | Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) |
| | | 2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA | 93,40 | 90,92 | 97,34 % | 100% | 1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan | 100% | 100% | 1) Penyampaian usulan Rencana Penarikan Dana Periode Tw IV 2025 oleh Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPJ 2) Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw IV 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sesuai surat KPA BBSPJPPJ Nomor S-147/BBSPJPPJ/PR/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 3 Oktober 2025 | 1) Pengajuan usulan revisi kewenangan Kanwil dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran sesuai surat KPA BBSPJPPJ Nomor S-216/BBSPJPPJ/PR/XI/2025 tanggal 14 November 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 17 November 2025 | 1) Pengajuan usulan revisi kewenangan KPA dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran sesuai surat KPA BBSPJPPJ Nomor B-230/BBSPJPPJ/PR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 12 Desember 2025 | 1) Penambahan volume output RO saat revisi pergeseran anggaran dikarenakan penerapan kebijakan SBKK yang menyebabkan terdapat potensi capaian output yang tidak tercapai 2) Penolakan usulan revisi dikarenakan pada usulan revisi terdapat penambahan pagu perjalanan dinas untuk operasional layanan yang tidak | Koordinasi dengan BSKJI, Birocana dan DJA terkait kebijakan penetapan RO SBKK dan penetapan blokir anggaran khususnya untuk RO yang bersifat/ untuk kegiatan layanan jasa teknis | Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W) |

| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi dari Target | Capaian | Triwulan IV | | % Fisik | | Realisasi | | | Kendala | Tindak lanjut yg bersifat strategis | Penanggung Jawab |
|-----|---|--|-----------|-----------------------|----------|---------------|---|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Target Antara | Rencana Kegiatan | Target | Realisasi | Bulan Oktober | Bulan November | Bulan Desember | | | |
| | | 3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan | 75 Nilai | 94,75 Nilai | 126,33 % | 100% | 1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan 6) Mendukung pelaksanaan | 100% | 100% | 1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan | 1) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 2) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 3) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Oktober tahun berjalan 4) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan | 1) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 2) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 3) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan November tahun berjalan 4) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan | 1) Ketidaksiapan dokumen arsip dan data keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan audit dan penyusunan LK tahun berjalan 2) Selisih Waktu Tanggal Buku dengan Tanggal Approve untuk lebih dari 4 Transaksi Persediaan melebihi batas waktu 60 hari sehingga mengurangi nilai LK | 1) Menyiapkan arsip keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan audit dan penyusunan LK 2) Melakukan koordinasi antara penyusun LK, operator persediaan dan approver persediaan untuk menghindari adanya selisih waktu yang lebih dari 60 hari antara tanggal buku dan tanggal approve | Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam) |
| 8 | Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri | 1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah | 81 Persen | 97,51 persen | 110,81 % | 100% | 1) Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam | 100% | 100% | 1) Melakukan Pengadaan yang merupakan PDN, seperti : Belanja barang, konsumsi rapat, Pembayaran Listrik, Pengujian ke Pihak Lain, Kalibrasi, dan Perjalanan Dinas 2) Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN. 3) Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri. 4) Pembayaran kontrak bulan Oktober 2025 tenaga | 1) Melakukan Pengadaan yang merupakan PDN, seperti : Belanja barang, konsumsi rapat, Pembayaran Listrik, Pengujian ke Pihak Lain, Kalibrasi, dan Perjalanan Dinas 2) Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN. 3) Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri. 4) Pembayaran kontrak bulan November 2025 | 1) Melakukan Pengadaan yang merupakan PDN, seperti : Belanja barang, konsumsi rapat, Pembayaran Listrik, Pengujian ke Pihak Lain, Kalibrasi, dan Perjalanan Dinas 2) Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN. 3) Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri. 4) Pembayaran kontrak bulan Desember 2025 | 1) Kebutuhan langganan aplikasi berbayar yang dibutuhkan dan berasal dari dalam negeri (zoom) 2) Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend. | 1) Mencari referensi aplikasi berbayar yang dibutuhkan dan berasal dari dalam negeri. 2) Mengajukan relaxasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend. | Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto), Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam) |

Semarang, Januari 2026

Pjt Kepala BBSJPPI

Apit Pria Nugraha



Realisasi Kinerja Renstra Satker BBSPJPI TA. 2025-2029

| Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja | Satuan | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | TOTAL 2025-2029 | | | |
|---|--|---|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------|---------|
| | | Target Renstra | Realisasi | % | Target Renstra | Target Renstra | Target Renstra | Target Renstra | Total Target Renstra | Realisasi sd 2025 | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| TJ Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri | | | | | | | | | | | | |
| TJ 1 | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i> | indeks | 3,68 | 3,70 | 100,54% | 3,68 | 3,69 | 3,69 | 3,7 | 3,7 | 100,00% | |
| TJ 2 | <i>Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri</i> | Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi | 960 | 1063 | 110,73% | 990 | 1020 | 1060 | 1080 | 5110 | 1063 | 20,80% |
| SK1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)</i> | Persen | 88,00 | 94,23 | 107,08% | 88,5 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90 | 94,23 | 104,70% |
| IKK 2 | <i>Nilai Net Promoter Score (NPS)</i> | Nilai | 40 | 63 | 157,50% | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 63 | 143,18% |
| SK2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</i> | indeks | 3 | 3 | 100,00% | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 75,00% |
| IKK 2 | <i>Jumlah hasil layanan jasa industri</i> | Hasil Layanan | 7500 | 8574 | 114,32% | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 41700 | 8574 | 20,56% |
| IKK 3 | <i>Nilai Revenue on Asset (RoA)</i> | Persen | 14,50 | 15,90 | 109,66% | 14,60 | 14,70 | 14,75 | 14,80 | 14,8 | 15,9 | 107,43% |
| IKK 4 | <i>Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)</i> | Persen | 59,00 | 61,46 | 104,17% | 60 | 61 | 63 | 65 | 65 | 61,46 | 94,55% |
| SK3 Terwujudnya SDM yang profesional | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)</i> | indeks | 81,30 | 83,43 | 102,62% | 81,40 | 81,50 | 81,60 | 81,70 | 81,7 | 83,432 | 102,12% |
| SK4 Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI</i> | Persen | 20,00 | 20,00 | 100,00% | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 20 | 20,00% |
| IKK 2 | <i>Tingkat Penerapan (SPBE)</i> | Persen | 77,00 | 88,81 | 115,34% | 78 | 80 | 83 | 85 | 85 | 88,81 | 104,48% |
| IKK 3 | <i>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</i> | Indeks | 4,62 | 4,95 | 107,14% | 4,64 | 4,66 | 4,68 | 4,70 | 4,7 | 4,95 | 105,32% |
| SK5 Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</i> | Persen | 60,00 | 100,00 | 166,67% | 62 | 65 | 67 | 70 | 70 | 100 | 142,86% |
| IKK2 | <i>Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)</i> | Nilai | 70,10 | 86,47 | 123,35% | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | 86,47 | 105,45% |
| SK6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker</i> | Nilai | 79,45 | 83,60 | 105,22% | 79,45 | 79,70 | 79,70 | 80,00 | 80 | 83,6 | 104,50% |
| IKK2 | <i>Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA</i> | Nilai | 93,40 | 90,92 | 97,34% | 93,40 | 94,00 | 94,00 | 94,50 | 94,5 | 90,92 | 96,21% |
| IKK 3 | <i>Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan</i> | Nilai | 75,00 | 94,75 | 126,33% | 75,25 | 75,50 | 75,75 | 76,00 | 76 | 94,75 | 124,67% |
| SK7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1 | <i>Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah</i> | Persen | 81,00 | 89,79 | 110,85% | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 89,79 | 109,50% |

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah melaksanakan mereviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBSPJPPi untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan akuntabilitas kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BBSPJPPi.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Semarang, 22 Januari 2026
Ketua Tim Reviu



Any Kurnia, S.Si, M.Si
NIP 197403062002122002

**BERITA ACARA DIREVIU
LAPORAN KINERJA TAHUNAN BBSPJPPi
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR Nomor 2/BBSPJPPi1.1/PR/I/2026**

Pada hari ini Senin tanggal 22 Januari 2026 bertempat di BBSPJPPi telah dilakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BBSPJPPi untuk tahun anggaran 2025 dengan ringkasan hasil sebagai berikut :

1. Format, mekanisme penyusunan, dan substansi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Data yang disampaikan handal dan akurat, didukung oleh data resmi dan terkonfirmasi dari tiap-tiap bagian/tim kerja
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) disajikan dan dianalisis secara memadai, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan laporan akuntabilitas kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Formulir checklist Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BBSPJPPi sebagaimana terlampir .



Any Kurnia



Dyah Anshina Fahriyati



Kukuh Aryo Wicaksono



Lisa Indah Pratiwi

Formulir Checklist Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja TA 2025

| No. | Aspek | Indikator | Checklist | Keterangan/Masukan |
|-----|----------------------|---|---|--------------------|
| 1. | Format | 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) telah menampilkan data penting Satuan Kerja | - LAK mencakup semua informasi yang diperlukan untuk analisis kinerja Satuan Kerja. - Data yang disajikan lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. - Format penyajian data mengikuti standar yang ditetapkan oleh pedoman laporan. | |
| | | 2 LAK telah menyajikan informasi target kinerja | - Target kinerja ditetapkan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai dalam periode yang ditentukan. - Setiap target kinerja memiliki indikator yang mendukung untuk memudahkan pemantauan capaian. | |
| | | 3 LAK telah menyajikan capaian kinerja Satuan Kerja yang memadai | - Capaian kinerja disajikan dengan data yang cukup dan relevan untuk membandingkan antara target dan realisasi. - Penyajian capaian dilakukan dengan cara yang mudah dipahami dan dapat diakses. | |
| | | 4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan | - Setiap laporan dilengkapi dengan lampiran yang memperjelas data yang disajikan, seperti tabel rinci, grafik, dan dokumen pendukung lainnya. - Lampiran yang disertakan relevan dan memperkuat informasi yang ada dalam laporan utama. | |
| | | 5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan | - Upaya perbaikan disertakan dalam laporan untuk menunjukkan bagaimana Satuan Kerja akan mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja di masa depan. - Upaya perbaikan didasarkan pada analisis mendalam terhadap pencapaian dan hambatan yang ada. | |
| | | 6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan | - LAK juga mencakup laporan akuntabilitas keuangan yang lengkap dan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku. - Setiap pengeluaran dan pendapatan yang tercatat dijelaskan dengan rinci, termasuk sumber dana dan alokasi anggaran. | |
| | | 7 Telah sesuai dengan sistematika LAK | - LAK disusun dengan sistematika yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, termasuk bagian-bagian yang telah ditetapkan (pendahuluan, analisis, pencapaian, rencana perbaikan, dll). - Sistematis dalam penyajian memastikan bahwa pembaca dapat memahami laporan secara keseluruhan tanpa kesulitan. | |
| 2. | Mekanisme Penyusunan | 1 LAK Satuan Kerja disusun oleh Satuan Kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu | LAK BBSPJPPI disusun oleh personel di dalam kelompok kerja Program dan Pelaporan yang mempunyai rincian tugas menyusun evaluasi dan pelaporan yang tercantum di dalam SK Kepala BBSPJPPI no 52 tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025 SK Penempatan Personel dan Penugasan pada Bagian/tim Kerja di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun 2025 | |
| | | 2 Informasi yang disampaikan dalam LAK telah didukung dengan data yang memadai | Setiap data sasaran yang disajikan di dalam laporan didukung oleh data resmi dari masing-masing tim kerja/bagian yaitu data pada aplikasi monev keuangan, aplikasi kinerja internal, dashboard kinerja layanan pada sistem informasi balai, rekaman internal pada masing-masing tim kerja/Bagian. Data di dalam laporan direview oleh masing-masing 2 tim kerja | |
| | | 3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari Satuan Kerja ke unit penyusun LAK | Mekanisme penyampaian data dan informasi dari Satuan Kinerja ke unit penyusun LAK diatur melalui SOP terkait pengumpulan data dan informasi dari tiap bagian/tim kerja kepada tim penyusun LAKIP BBSPJPPI | |
| | | 4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap Satuan Kerja | Penanggung jawab pengumpulan data dan informasi di BBSPJPPI telah ditetapkan melalui SK Kepala BBSPJPPI no 52 tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025 SK Penempatan Personel dan Penugasan pada Bagian/tim Kerja di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun 2025 | |
| | | 5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LAK telah diyakini keandalannya | Data dan informasi kinerja yang disampaikan di dalam LAK didukung oleh data resmi dari tim/bagian terkait serta telah dilakukan review oleh bagian terkait untuk memastikan validitasnya | |
| | | 6 Analisis/ penjelasan dalam LAK telah diketahui oleh Tim kerja terkait | Analisis/ penjelasan dalam LAK telah diketahui oleh Tim kerja terkait, dibahas di dalam rapat monev kinerja. Setiap anggota tim yang berperan dalam penyusunan laporan telah memberikan masukan dan persetujuan terhadap analisis yang dilakukan | |
| | | 7 LAK Satuan Kerja bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya | LAK Satuan Kinerja Bulanan bersumber pada data yang diperoleh dari laporan tiap-tiap tim kerja/bagian. Tiap tim kerja memberikan kontribusi data sesuai tugas dan tanggung jawabnya, yang kemudian diintegrasikan oleh Satker utama menjadi laporan keseluruhan. | |
| 3. | Substansi | 1 Tujuan/ sasaran dalam LAK telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja | Sasaran Kinerja telah disampaikan dalam LAK dan telah sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025 | |
| | | 2 Tujuan/ sasaran dalam LAK telah selaras dengan rencana strategis | Sasaran Kinerja telah disampaikan dalam LAK telah sesuai dan selaras dengan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis BBSPJPPI Tahun 2025-2029 serta sudah selaras dengan Renstra BSKJI tahun 2025-2029 | |
| | | 3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | - | |

| | | | | |
|---|----|--|--|--|
| | 4 | Tujuan/ sasaran dalam LAK telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja | Sasaran Kinerja dalam LAK telah ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan. Juga sudah sesuai dengan sasaran dalam Indikator Kinerja BBSPJPPI yang diturunkan dari Indikator Kinerja Kementerian Perindustrian serta indikator Kinerja BSKJI | |
| | 5 | Tujuan/ sasaran dalam LAK telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam IKU | Sasaran Kinerja dalam LAK telah ditetapkan dan telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2025-2029 | |
| | 6 | Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai | - | |
| Per indikator Kinerja dalam Perkin dan akuntabilitas Keuangan | 7 | Perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja tahun berjalan | LAK telah menyajikan data target kinerja dan realisasi tahun berjalan yang dilengkapi dengan pencapaian per triwulan pada masing-masing indikator serta analisis dan evaluasi apabila ada target kinerja yang belum tercapai | |
| | 8 | Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir | LAK telah menyajikan data realisasi tahun berjalan dengan pencapaian selama 4 tahun terakhir (2022-2025) pada tabel pencapaian masing-masing Indikator Kinerja (untuk indikator Indikator IKM pada tabel 11, SLA pada tabel 18) yang dilengkapi dengan pencapaian per triwulan pada Tabel 15 serta analisis dan evaluasi apabila ada target kinerja yang belum tercapai. | |
| | 9 | Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis | LAK telah menyajikan Capaian Kinerja Renstra Satker BBSPJPPI TA. 2025 dan dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Renstra 2025-2029 (Tabel 52) beserta uraian hasil dan analisis yang telah dicapai, kendala, dan tindak lanjutnya | |
| | 10 | Terdapat perbandingan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) | LAK telah menyajikan Capaian Kinerja Renstra Satker BBSPJPPI TA. 2025 dan dibandingkan dengan pencapaian sesama Satker dibawah BSKJI sebagai pembanding | |
| | 11 | Terdapat analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan | LAK telah menguraikan secara mendetil analisis capaian kinerja, penyebab kegagalan pencapaian indikator, kendala, dan tindak lanjutnya serta masukan untuk ke depan dan rencana perbaikan. | |
| | 12 | Terdapat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | LAK telah menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dijabarkan pada Efisiensi Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dan anggaran | |
| | 13 | Terdapat analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | - Laporan ini menguraikan capaian kinerja yang berhasil dicapai tahun 2025 serta membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya - Analisis kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan | |
| | 14 | IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran | IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran | |
| | 15 | Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai | | |
| | 16 | IKU dan IK telah SMART | IKU dan IK telah memenuhi prinsip "SMART" | |

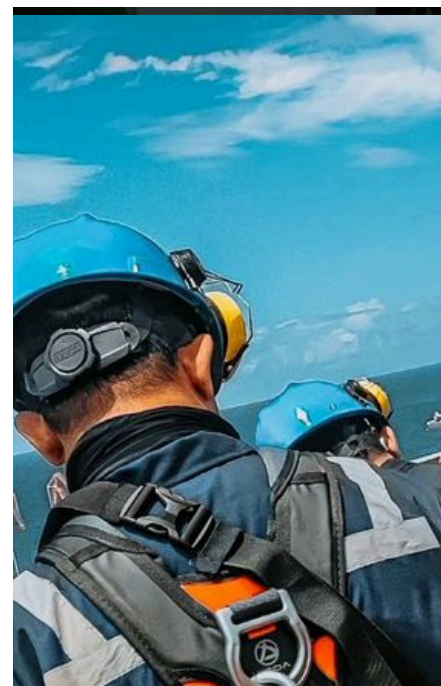
REKAPITULASI BERITA 2025



BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

PODCAST OASIS#7: “MEWUJUDKAN INDUSTRI BERKELANJUTAN MELALUI JASA INDUSTRI DARI KEMENPERIN”

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), berkomitmen mewujudkan swasembada energi dan industri berkelanjutan dengan mendorong transformasi menuju ekosistem industri hijau yang mandiri dan inovatif. Langkah strategis ini diakselerasi oleh unit pelaksana teknis seperti BBSPJPI Semarang yang berperan sebagai mitra strategis industri dalam menyediakan jasa teknis terintegrasi—mulai dari pengujian, sertifikasi industri hijau, hingga pemanfaatan teknologi berbasis IoT—guna meningkatkan daya saing nasional serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di tengah tantangan global.



BERITA PODCAST OASIS #7

kemenperin.go.id

<https://kemenperin.go.id/artikel/25878/Cegah-Pencemaran,-Kemenperin-Akselerasi-Ekosistem-Industri-Berkelanjutan>

[antaranews.com](https://www.antaranews.com)

[https://www.antaranews.com/berita/4801217/kemenperin-perkuat-penerapan-ekosistem-industri-berkelanjutan?
utm_source=antaranews&utm_medium=mobile
&utm_campaign=latest_category](https://www.antaranews.com/berita/4801217/kemenperin-perkuat-penerapan-ekosistem-industri-berkelanjutan?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category)

disway.id

<https://disway.id/read/871200/dorong-pemulihan-ekonomi-kemenperin-dukung-penerapan-ekosistem-industri-berkelanjutan>

[trade.cgisi.co.id](https://itrade.cgisi.co.id)

<https://itrade.cgisi.co.id/kemenperin-perkuat-penerapan-ekosistem-industri-berkelanjutan>

indonesiainside.id

https://indonesiainside.id/ekonomi/2025/04/29/kemenperin-dorong-penguatan-ekosistem-industri-keberlanjutan#google_vignette

planet.merdeka.com

<https://planet.merdeka.com/hot-news/kemenperin-perkuat-ekosistem-industri-berkelanjutan-lewat-transformasi-hijau-390468-mvk.html?page=3>

www.agrofarm.co.id

<https://www.agrofarm.co.id/2025/04/cegah-pencemaran-kemenperin-akselerasi-ekosistem-industri-berkelanjutan/>

harianrakyatbengkulu.bacakoran.co

<https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/35922/cegah-pencemaran-akselerasi-ekosistem-industri-berkelanjutan>

BERITA PODCAST OASIS #7

allrelease.id

<https://allrelease.id/tag/ekosistem-industri-berkelanjutan/>

www.agrofarm.co.id

<https://www.agrofarm.co.id/2025/04/cegah-pencemaran-kemenperin-akselerasi-ekosistem-industri-berkelanjutan/>

esgnow.republika.co.id

<https://esgnow.republika.co.id/berita/svgu9r416/kemenperin-pacu-transformasi-industri-hijau>

beritaja.com

<https://beritaja.com/kemenperin-perkuat-penerapan-ekosistem-industri-berkelanjutan-beritaja-320721.html>

tubasmedia.com

<https://tubasmedia.com/cegah-pencemaran-kemenperin-akselerasi-ekosistem-industri-berkelanjutan/>

zonawarta.com

<https://zonawarta.com/ekonomi-bisnis/mendorong-swasembada-energi-dan-industri-berkelanjutan-ala-kemenperin>

www.pantau.com

<https://www.pantau.com/nasional/265254/bs-kji-fokus-dorong-teknologi-bersih-dan-efisiensi-sumber-daya-di-sektor-industri>

KEIKUTSERTAAN BBSPJPI PADA PAMERAN AIGIS 2025



Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) mempercepat transisi industri hijau berkelanjutan dengan menyelenggarakan Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2025 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk menekan emisi karbon dan memperkuat daya saing nasional. Dalam ajang tersebut, BBSPJPI Semarang berperan aktif mengenalkan berbagai layanan unggulan seperti audit CEMS, sertifikasi industri hijau, dan verifikasi TKDN, serta meluncurkan inovasi AiMS Water Quality Monitoring (AiMS WQM) untuk pemantauan kualitas air limbah secara real-time. Langkah proaktif ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan seperti Permen LHK No. P.80/2019, tetapi juga untuk membangun ekosistem industri yang efisien, inovatif, dan ramah lingkungan melalui kemitraan strategis yang lebih luas.



BERITA KEIKUTSERTAAN BBSPJPI DALAM AIGIS

kemenperin.go.id

<https://kemenperin.go.id/artikel/72482178/Dukung-Industri-Hijau,-Kemenperin-Kenalkan-Inovasi-Pemantauan-Kualitas-Air-di-AIGIS-2025>

money.kompas.com

<https://money.kompas.com/read/2025/08/22/184812426/industri-hijau-jadi-senjata-baru-ri-hadapi-iklim-dan-persaingan-global>

wartaekonomi.co.id

<https://wartaekonomi.co.id/amp/read579970/kemenperin-bangun-ekosistem-industri-hijau-lebih-tangguh-dan-berdaya-saing>

validnews.id

<https://validnews.id/ekonomi/kemenperin-industri-hijau-jadi-pilar-penting-hadapi-tantangan-global>

sokoguru.id

<https://sokoguru.id/sokobisnis/di-aigis-2025-kemenperin-kenalkan-inovasi-pemantauan-kualitas-air-dukung-industri-hijau>

monitor.co.id

<https://monitor.co.id/2025/08/22/menuju-industri-hijau-kemenperin-kenalkan-inovasi-pemantauan-kualitas-air-di-aigis-2025/>

swa.co.id

<https://swa.co.id/read/463025/kemenperin-berinovasi-aims-water-quality-monitoring-untuk-menyokong-transisi-energi-hijau>

BERITA KEIKUTSERTAAN BBSPJPI DALAM AIGIS

industri.kontan.co.id

<https://industri.kontan.co.id/news/dukung-industri-hijau-kemenperin-kenalkan-inovasi-pantau-kualitas-air-di-aigis-2025>

pesanjabar.com

<https://pesanjabar.com/aigis-2025-kemenperin-tegaskan-komitmen-bangun-industri-hijau-nasional/>

www.pantau.com

<https://www.pantau.com/nasional/288070/kemenperin-perkenalkan-sistem-pemantauan-air-limbah-aims-wqm-untuk-dorong-industri-hijau>

wahananews.co

<https://wahananews.co/ekuin/kemenperin-kenalkan-inovasi-pemantauan-kualitas-air-di-aigis-2025-A5VmOKiq2K/2>

lokapanews.id

<https://lokapanews.id/2025/08/22/dukung-industri-hijau-kemenperin-kenalkan-inovasi-pemantauan-air-limbah/>

bcasekuritas.co.id

<https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/kemenperin-kenalkan-inovasi-pemantauan-kualitas-air-di-aigis-2025>

www.bridanareksasekuritas.co.id

<https://www.bridanareksasekuritas.co.id/en/news-update-detail/berita-terkini/21977>

BERITA > KEIKUTSERTAAN BBSPJPI DALAM AIGIS

[m.antaranews.com](https://m.antaranews.com/berita/5057369/kemenperin-perkenalkan-teknologi-pemantauan-kondisi-air-limbah?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category)

https://m.antaranews.com/berita/5057369/kemenperin-perkenalkan-teknologi-pemantauan-kondisi-air-limbah?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category

[klikwartaku.com](https://klikwartaku.com/teknologi-aims-jadi-andalan-baru-industri-hijau-di-indonesia/)

<https://klikwartaku.com/teknologi-aims-jadi-andalan-baru-industri-hijau-di-indonesia/>

[sorotanindonesiaterupdate.blogspot.com](https://sorotanindonesiaterupdate.blogspot.com/2025/08/kemenperin-perkenalkan-teknologi.html?m=1)

<https://sorotanindonesiaterupdate.blogspot.com/2025/08/kemenperin-perkenalkan-teknologi.html?m=1>

[www.msn.com](https://www.msn.com/id-id/berita/other/dukung-industri-hijau-kemenperin-kenalkan-inovasi-pantau-kualitas-air-di-aigis-2025/ar-AA1L3lai)

<https://www.msn.com/id-id/berita/other/dukung-industri-hijau-kemenperin-kenalkan-inovasi-pantau-kualitas-air-di-aigis-2025/ar-AA1L3lai>

[www.sindikatpost.com](https://www.sindikatpost.com/nasional/781517016/kemenperin-komitmen-percepat-transisi-menuju-industri-hijau-yang-berkelanjutan)

<https://www.sindikatpost.com/nasional/781517016/kemenperin-komitmen-percepat-transisi-menuju-industri-hijau-yang-berkelanjutan>

[www.beritateknologi.co.id](https://www.beritateknologi.co.id/kemenperin-perkenalkan-teknologi-pemantauan-kondisi-air-limbah/)

<https://www.beritateknologi.co.id/kemenperin-perkenalkan-teknologi-pemantauan-kondisi-air-limbah/>

[www.agrofarm.co.id](https://www.agrofarm.co.id/2025/08/dukung-industri-hijau-kemenperin-kenalkan-inovasi-pemantauan-kualitas-air-di-aigis-2025/)

<https://www.agrofarm.co.id/2025/08/dukung-industri-hijau-kemenperin-kenalkan-inovasi-pemantauan-kualitas-air-di-aigis-2025/>

Business Gathering BBSPJPPI 2025

Kementerian Perindustrian memperkuat transisi industri hijau melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi dan kedaulatan industri. Sebagai langkah nyata, BSKJI melalui BBSPJPPI Semarang menyelenggarakan Business Gathering 2025 guna mendorong penggunaan produk dalam negeri lewat penguatan kebijakan TKDN serta penyediaan jasa industri strategis seperti sertifikasi industri hijau, audit CEMS, dan produk AiMS. Sinergi ini dipertegas dengan pemberian apresiasi kepada mitra industri dan penandatanganan kerja sama teknis, yang membuktikan komitmen pemerintah dalam mendampingi pelaku usaha bertransformasi menjadi lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan di pasar domestik maupun global.





BERITA BG BBSPJPI

monitor.co.id

<https://monitor.co.id/2025/12/11/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri-hijau-dan-penguatan-produk-lokal/>

beritamoneter.com

<https://beritamoneter.com/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri-hijau/>

www.neraca.co.id

<https://www.neraca.co.id/article/229909/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri-hijau>

kemenperin.go.id

<https://kemenperin.go.id/artikel/72482452/SBIN-Jadi-Katalis-Daya-Saing-Industri-Hijau-dan-Penguatan-Produk-Lokal>

[antaranews.com](https://m.antaranews.com)

[https://m.antaranews.com/berita/5299417/kemenperin-tekankan-sbin-katalis-percepat-transisi-industri-hijau?
utm_source=antaranews&utm_medium=mobile
&utm_campaign=latest_category](https://m.antaranews.com/berita/5299417/kemenperin-tekankan-sbin-katalis-percepat-transisi-industri-hijau?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category)

nasional.tvrinews.com

<https://nasional.tvrinews.com/berita/to1a0xr-kemenperin-perkuat-transformasi-industri-hijau-lewat-strategi-baru-industrialisasi-nasional>

www.tribunnews.com

<https://www.tribunnews.com/bisnis/7766123/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri-hijau-dan-penguatan-produk-lokal>

tubasmedia.com

<https://tubasmedia.com/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri-hijau-dan-penguatan-produk-lokal>

bcasekuritas.co.id

<https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/kemenperin-tekankan-sbin-katalis-percepat-transisi-industri-hijau>

BERITA BG BBSPP

www.warawiri.net

<https://www.warawiri.net/2025/12/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri.html>

dialeksis.com

<https://dialeksis.com/ekonomi/kemenperin-pacu-industri-hijau-lewat-sbin-tkdn-jadi-fokus-utama/>

m.industry.co.id

<https://m.industry.co.id/read/146813/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri-hijau-dan-penguatan-produk-lokal>

agroindonesia.co.id

<https://agroindonesia.co.id/sbin-jadi-katalis-daya-saing-industri-hijau-dan-penguatan-produk-lokal/>

m.batamtoday.com

<https://m.batamtoday.com/berita224010-Kemenperin-Percepat-Transisi-Industri-Hijau-Lewat-SBIN-Fokus-Perkuat-TKDN-dan-Daya-Saing-Nasional.html>

prpolitik.com

<https://prpolitik.com/kemenperin-perkuat-industri-hijau-melalui-sbin-tkdn-menjadi-prioritas-utama-penguatan-pasar-domestik/>

bandung.beritakini.co.id

<https://bandung.beritakini.co.id/amp/541909/kemenperin-tegaskan-industri-hijau-jadi-pilar-kemandirian-ekonomi-ri>

bandung.beritakini.co.id

<https://bandung.beritakini.co.id/detail/541909/kemenperin-tegaskan-industri-hijau-jadi-pilar-kemandirian-ekonomi-ri>

Neraca Koran

Berita Cetak

Serah Terima IPAL Saprotan-Semarang

Kementerian Perindustrian melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) menetapkan praktik industri hijau dan ekonomi sirkular sebagai agenda strategis untuk mewujudkan kemandirian industri serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi nyata dari kebijakan ini ditunjukkan oleh BSKJI melalui BBSPJPI Semarang yang berhasil membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik berkonsep ekonomi sirkular di PT Saprotan Utama Nusantara, di mana air hasil olahan mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan air proses produksi. Kolaborasi yang mencakup desain, pendampingan operasional, hingga pengujian ini membuktikan peran penting unit pelayanan teknis dalam membantu industri mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menciptakan ekosistem industri yang ramah lingkungan serta berdaya saing global.



BERITA SERAH TERIMA IPAL

m.antaranews.com

[https://m.antaranews.com/berita/5300791/ke-menperin-industri-hijau-ekonomi-sirkular-wujudkan-kemandirian-ri?
utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category](https://m.antaranews.com/berita/5300791/ke-menperin-industri-hijau-ekonomi-sirkular-wujudkan-kemandirian-ri?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category)

koran-jakarta.com

<https://koran-jakarta.com/2025-12-12/ekonomi-sirkular-diakselerasi-indonesia-siap-lepas-ketergantungan-bahan-baku-asing>

www.pantau.com

<https://www.pantau.com/nasional/310342/ke-menperin-perkuat-ekonomi-sirkular-lewat-pengembangan-industri-hijau-dan-pembangunan-ipal-ramah-lingkungan>

money.kompas.com

[https://money.kompas.com/read/2025/12/12/173044926/menperin-industri-hijau-dan-ekonomi-sirkular-tentukan-masa-depan-industri-ri?
utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile](https://money.kompas.com/read/2025/12/12/173044926/menperin-industri-hijau-dan-ekonomi-sirkular-tentukan-masa-depan-industri-ri?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile)

bcasekuritas.co.id

<https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/kemenperin-industri-hijau-ekonomi-sirkular-wujudkan-kemandirian-ri>

www.sigijateng.id

<https://www.sigijateng.id/jawa-tengah/1502042163/kunker-di-demak-kemenperin-dorong-industri-hijau-lewat-penguatan-ipal-domestik-ramah-lingkungan>

m.tribunnews.com

<https://m.tribunnews.com/bisnis/7766292/ke-menperin-penerapan-ipal-ramah-lingkungan-dukung-praktik-industri-hijau>

koran-jakarta.com

<https://koran-jakarta.com/2025-12-12/ekonomi-sirkular-diakselerasi-indonesia-siap-lepas-ketergantungan-bahan-baku-asing?page=1>

radarpostnasionalnews.com

<https://radarpostnasionalnews.com/10190/ke-menperin-sinergikan-upaya-praktik-industri-hijau-dengan-penerapan-ipal-domestik-ramah-lingkungan/>

BERITA SERAH TERIMA IPAL

www.mk-info.co.id

<https://www.mk-info.co.id/kemenperin-sinergikan-upaya-praktik-industri-hijau-dengan-penerapan-ipal-domestik-ramah-lingkungan-di-pt-saprotan-utama-nusantara/>

id.headtopics.com

<https://id.headtopics.com/news/kemenperin-industri-hijau-ekonomi-sirkular-wujudkan-77070499>

jatengupdate.net

<https://jatengupdate.net/kemenperin-sinergikan-upaya-praktik-industri-hijau-dengan-penerapan-ipal-domestik-ramah-lingkungan>

kemenperin.go.id

<https://kemenperin.go.id/artikel/72482455/Kemenperin:-Penerapan-IPAL-Ramah-Lingkungan-Dukung-Praktik-Industri-Hijau>

validnews.id

<https://validnews.id/ekonomi/kemenperin-ipal-ramah-lingkungan-langkah-wujudkan-industri-hijau>

okutimurpos.bacakoran.co

<https://okutimurpos.bacakoran.co/read/19269/penerapan-ipal-ramah-lingkungan-dukung-praktik-industri-hijau>

www.agrofarm.co.id

<https://www.agrofarm.co.id/2025/12/kemenperin-penerapan-ipal-ramah-lingkungan-dukung-praktik-industri-hijau/>

id.headtopics.com

<https://id.headtopics.com/news/kemenperin-industri-hijau-ekonomi-sirkular-wujudkan-77070499>

REKAPITULASI MEDIA BBSPJPI 2025



Februari 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|------------------|--|---|
| 1 | 18 Februari 2025 | Pelantikan Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Pranata Humas) & Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI) oleh Kepala BBSPJPPI | https://www.instagram.com/p/DGMdGfYyci6/?img_index=3 |
| 2 | 27 Februari 2025 | Pelatihan SNI ISO 9001:2015 Kerjasama dengan PDAM Tirtamarta | https://www.instagram.com/p/DGkh6TayVIN/?img_index=2 |



Maret 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|---------------|---|---|
| 1 | 18 Maret 2025 | Supervisi Konstruksi IPAL Saprotan Kalitengah | https://www.instagram.com/p/DHUt6SCynwM/?img_index=1 |



April 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|---------------|--|---|
| 1 | 23 April 2025 | Monitoring dan Evaluasi Kerjsama dengan BP Batam | https://www.instagram.com/p/DlxfhTmP8tz/?img_index=2 |
| 2 | 24 April 2025 | Bimbingan Teknis ISO 14001:2025 PT Abadi Kimia | https://www.instagram.com/p/Dl0iCeQvaX8/?img_index=2 |
| 3 | 25 April 2025 | Bimbingan Teknis ISO 9001:2015 PT Abadi Kimia | https://www.instagram.com/p/Dl3LXG1PU-O/?img_index=2 |
| 4 | 29 April 2025 | Podcast OASIS: "Mewujudkan Industri Berkelanjutan Melalui Jasa Industri dari Kementerian Perindustrian." | https://www.instagram.com/p/DJAgDPTzWee/ |
| 5 | 30 April 2025 | Webinar "Sosialisasi Tata Cara Penggunaan SIINAS untuk Proses Sertifikasi & Kebijakan Pengaturan Permen Wajib AMDK sesuai Permenperin No. 62 Tahun 2024" | https://www.instagram.com/p/DJEa4Bcv2rN/ |





Mei 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|-------------|--|---|
| 1 | 23 Mei 2025 | Bimbingan Teknis Pemahaman Audit Internal ISO 19011:2018 untuk PDAM Tirtamarta Yogyakarta | https://www.instagram.com/p/DJ_vhJOv2_B/?img_index=3 |
| 2 | 23 Mei 2025 | Bimbingan Teknis Pemahaman CPOOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) bagi PDAM Tirtamarta Yogyakarta | https://www.instagram.com/p/DJ_50B3vkN5/?img_index=3 |



Juni 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|--------------|--|---|
| 1 | 02 Juni 2025 | Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila | https://www.instagram.com/p/DKY0LKMvN1a/ |
| 2 | 03 Juni 2025 | Perolehana Akreditasi KAN sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi | https://www.instagram.com/p/DKa1DKWSgKq/?img_index=6 |
| 3 | 04 Juni 2025 | Kunjungan dan sesi knowledge sharing dari mahasiswa Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. | https://www.instagram.com/p/DKeKF1PyS2/?img_index=6 |
| 4 | 10 Juni 2025 | Penyambutan CPNS 2024 | https://www.instagram.com/p/DKtq_uKveJs/?img_index=6 |
| 5 | 17 Juni 2025 | Kunjungan Kerja Anggora DPR Samuel Wattimena | https://www.instagram.com/p/DK_jSPOPDND/?img_index=6 |
| 6 | 18 Juni 2025 | Pelantikan Pejabat Fungsional Penata Laksana Barang dan Analisis SDM Aparatur | https://www.instagram.com/p/DLCWa_PP_EU/?img_index=1 |

Juli 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|--------------|---|---|
| 1 | 02 Juli 2025 | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Terintegrasi Periode 2025 | https://www.instagram.com/p/DLlhCxmSOHP/?img_index=1 |
| 2 | 03 Juli 2025 | Rapat Komite Ketidakberpihakan serta Monitoring & Evaluasi Standar Pelayanan Publik | https://www.instagram.com/p/DLpCBZxSLKH/?img_index=1 |
| 3 | 04 Juli 2025 | Pengarahan CPNS dari Kepala BSKJI Kemenperin | https://www.instagram.com/p/DLrd_5XR7kK/ |
| 4 | 09 Juli 2025 | Kunjungan sekaligus sesi knowledge sharing bersama mahasiswa Teknokimia Nuklir dari Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia | https://www.instagram.com/p/DL32g_lPIRO/?img_index=1 |
| 5 | 22 Juli 2025 | Audit Internal Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) | https://www.instagram.com/p/DMZkV4WP1CJ/?img_index=3 |



Agustus 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|-----------------|--|---|
| 1 | 17 Agustus 2025 | Perolehan Peringkat 1 Lomba Arsiparis Teladan 2025 tingkat Kementerian Perindustrian | https://www.instagram.com/p/DNcY_89vkFM/ |
| 2 | 17 Agustus 2025 | Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 80 | https://www.instagram.com/p/DNc27BRv1U2/ |
| 3 | 26 Agustus 2025 | Partisipasi BBSPJPPI dalam Pameran AIGIS 2nd – Annual Indonesia Green Industry Summit 2025 | https://www.instagram.com/p/DNzdtEcYn8r/?img_index=9 |



September 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|----------------------|--|---|
| 1 | 10 September 2025 | Penjajakan kerja sama dengan PT Petrokimia Gresik | https://www.instagram.com/p/DOpkdg-EjF0/?img_index=9 |
| 2 | 17-18 September 2025 | Bimbingan Teknis (BIMTEK) AAS untuk Pengujian Air Bersih | https://www.instagram.com/p/DOvArl_kXA9/?img_index=9 |
| 3 | 18-22 September 2025 | Partisipasi BBSPJPPI dalam Indonesian 4.0 Conference & Expo 2025 | https://www.instagram.com/p/DO5WIh9kZcc/?img_index=9 |
| 4 | 25 September 2025 | Penghargaan sebagai unit dengan kinerja terbaik dalam capaian indikator kinerja dalam ajang IKPA Awards 2025. | https://www.instagram.com/p/DPBLRhGkRtK/ |
| 5 | 26 September 2025 | Bimbingan Teknis Analisa Mikrobiologi Produk AMDK | https://www.instagram.com/p/DP CzGbrkvJf/?img_index=9 |
| 6 | 26 September 2025 | Penandatanganan Kerjasama Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi industri kecil | https://www.instagram.com/p/DP DHNN5kkfl/?img_index=9 |
| 7 | 26 September 2025 | Penjajakan kerja sama dengan Korea Conformity Laboratories (KCL) untuk proyek "Capacity Building for Air Pollution Monitoring in Indonesia." | https://www.instagram.com/p/DP DtwvkEXPT/?img_index=9 |
| 8 | 27 September 2025 | Partisipasi BBSPJPPI dalam Halal Indonesia International Industry Expo 2025 | https://www.instagram.com/p/DPFWLy6Ehk5/ |

Oktober 2025



| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|-----------------|--|---|
| 1 | 02 Oktober 2025 | Pelantikan Pejabat Fungsional Pembina Industri dan Analis SDM Aparatur | https://www.instagram.com/p/DPdIxZ-EeaZ/?img_index=9 |
| 2 | 10 Oktober 2025 | Forum Penguatan Efektivitas Lisensi Penggunaan Tanda SNI | https://www.instagram.com/p/DPoTzf4kiM_/?img_index=9 |
| 3 | 18 Oktober 2025 | Pembinaan K3: Pencegahan & Penanganan Kebakaran di lingkungan kantor | https://www.instagram.com/p/DP7chiJkhxy/ |
| 4 | 29 Oktober 2025 | Kunjungan Kerja dari Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia | https://www.instagram.com/p/DQZNRikv8H/?img_index=5 |



November 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|------------------|--|---|
| 1 | 11 November 2025 | Audit Surveilen LS BBSPJPPI oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang meliputi LSSM BISQA dan LSSML BRISEMA. | https://www.instagram.com/p/DQ6pZPfkudK/?img_index=3 |
| 2 | 14 November 2025 | Kunjungan kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. | https://www.instagram.com/p/DRCP68DEh1J/?img_index=1 |
| 3 | 19 November 2025 | Pelantikan Pejabat Fungsional Pranata Humas dan Penguji Mutu Barang | https://www.instagram.com/p/DROwbUWkqui/?img_index=1 |



y
ndari, S.T, MTM

SKJI -
erlin

**Apit
Pria Nugraha, S.T, M.PP**

PLT Kepala BBSPJPPI -
Kemenperin

**DR. Ir. Heru
Kustanto, M. SI.**

Kepala Pusat PSDN -
Kemenperin

**Muhamad Syarifudin
Edy Nugroho., S.T, M.Si.**

BBSPJPPI -
Kemenperin

**Putri
Amella, S.Biotek**

PT. Sentral Medika Indonesia



Desember 2025

| No | Tanggal | Kegiatan | Link Media |
|----|---------------------|---|---|
| 1 | 1 Desember 2025 | Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-54 | https://www.instagram.com/p/DRtDdlgkjP2/?img_index=1 |
| 2 | 10-11 Desember 2025 | Business Gathering BBSPJPPI 2025 | https://www.instagram.com/p/DSH5iVFEiMv/ |
| 3 | 12-13 Desember 2025 | Serah terima Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik kepada PT. Saprotan Utama Nusantara | https://www.instagram.com/p/DSNZkOMCUms/ |
| 4 | 18 Desember 2025 | Pelatihan Asesor Kompetensi bagi para pegawai calon Asesor LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) BBSPJPPI | https://www.instagram.com/p/DSZ2C5rkppv/ |
| 5 | 22 Desember 2025 | Menerima penghargaan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan kinerja SANGAT BAIK pada Penilaian Kinerja LPK Tahun 2025. | https://www.instagram.com/p/DSkAoSeEq_H/ |



Thank You

CONTACT US

+62 821-3452-5006

bbspjppi.kemenperin@gmail.com

bbspjppi.kemenperin.go.id